



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

MASTER PLAN E-GOVERNMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu didukung dengan suatu sistem pemerintahan yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang didukung dengan penggunaan teknologi dan informasi akan dilakukan pembangunan secara bertahap melalui *Masterplan E-Government* Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang *Masterplan E-Government* di Lingkungan Kabupaten Cilacap;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
6. *Masterplan E-Government* selanjutnya disebut *Masterplan* adalah Dokumen perencanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilaksanakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.

8. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan satu sistem informasi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan atau dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

BAB II MASTERPLAN E-GOVERNMENT

Pasal 2

Masterplan Daerah berfungsi sebagai:

- a. pedoman Pemerintah Daerah dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan.
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan *Smart City*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan *E-Government* meliputi proses perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan *E-Government* yang mengacu kepada Dokumen *Masterplan E-Government* Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

Seluruh ruang lingkup kegiatan *E-Government* dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV DOKUMEN MASTERPLAN

Pasal 5

- (1) Dokumen *Masterplan* merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan yang memuat pengaturan, sebagai berikut :
 - a. perencanaan kebijakan dan regulasi;
 - b. perencanaan kelembagaan dan organisasi;
 - c. perencanaan data dan aplikasi;
 - d. perencanaan infrastruktur;
 - e. perencanaan keberlangsungan sistem.
- (2) Dokumen *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pembiayaan Ruang lingkup kegiatan *E-Government* Daerah, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap; dan
- d. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 91

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
MASTERPLAN E-GOVERNMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global, dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini, untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* salah satu upayanya yaitu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*.

Salah satu ciri utama suatu organisasi yang maju, modern dan memiliki daya saing adalah adanya ketersediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai dalam menunjang pelayanan dan aktifitas utamanya. Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk selanjutnya disingkat TIK memainkan peranan penting dan makin luas dalam berbagai aspek kehidupan dewasa ini. TIK dapat membantu semua jenis kegiatan organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, termasuk di dalamnya bidang pelayanan, pengambilan keputusan manajerial, dan kerja sama kelompok kerja, hingga dapat memperkuat posisi kompetitif suatu organisasi dalam pasar yang cepat sekali berubah. Teknologi informasi dan sistem informasi berbasis internet dalam waktu singkat sudah menjadi bahan yang dibutuhkan untuk keberhasilan suatu organisasi di dunia global yang dinamis saat ini.

Strategi dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah dengan memanfaatkan TIK secara terencana, tepat dan optimal menuju Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sebagai pemerintah daerah yang modern berbasis TIK yang didukung oleh layanan-layanan TIK dan sistem informasi yang handal dalam segenap program dan aktivitasnya.

Seiring dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Cilacap guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel, peranan TIK dirasakan semakin kuat untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, disebutkan bahwa strategi pembangunan Kabupaten Cilacap dalam lima tahun mendatang diarahkan pada “**CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA: Bangga Mbangun Desa**” yang memiliki 4 (empat) pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan sosial budaya.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.
3. Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional
5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

Pada misi kedua mengutamakan pembangunan di bidang peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*. Misi ini diperoleh dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government* (*e-planning, e-budgeting, e-sakip e-monitoring* evaluasi, dan *e-procurement*)

Agar pencapaian sasaran dalam periode beberapa tahun mendatang dapat lebih terarah, dan untuk mendukung misi kedua, tentunya diperlukan sebuah rencana strategis teknologi informasi (*Information Technology Strategic Plan*) sebagai acuan pengembangan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi. Dengan memiliki sebuah acuan yang komprehensif, diharapkan pengembangan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi akan benar-benar berlandaskan pada analisis yang menyeluruh tentang kebutuhan bisnis dan potensi teknologi yang bisa dimanfaatkan serta susunan prioritas yang telah ditetapkan.

Apabila diperhatikan, perkembangan teknologi informasi menjadi sangat pesat dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Perkembangannya juga banyak menimbulkan perubahan paradigma dalam banyak bidang, termasuk didalamnya adalah paradigma penanganan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dimungkinkan karena teknologi ini bisa menyebarkan informasi sangat cepat, dan kecepatan yang ada kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap saat ini.

Pada tahun 2003, Pemerintah telah mengeluarkan arahan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, dimana setiap Kepala Daerah diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional.

Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan maka pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu:

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Usaha Untuk menjamin bahwa sistem tersebut dapat memenuhi harapan yang diinginkan dan juga dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya (*interoperabilitas*), maka diperlukan adanya sebuah strategi yang mengatur tentang infrastruktur komunikasi data dan informasi, infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, dan kelembagaan.

Master Plan e-Government adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan di lingkungan kerja bidang TIK dalam suatu pemerintah daerah. Oleh karenanya diperlukan tahapan identifikasi program dan aktivitas, fasilitas fisik, dan sumber daya dalam membentuk suatu sistem TIK secara terintegrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kegiatan Pembuatan *Master Plane- Government* Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 diperlukan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menjadi daerah berbasis TIK sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan, kemakmuran dan daya saing suatu bangsa, serta diharapkan membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap mewujudkan *e-Government* menuju *good governance* dan *clean government* di Kabupaten Cilacap.

Selaras dengan upaya penerapan *e-Government* dalam pembangunan Kabupaten Cilacap, sebuah kajian Perencanaan Master Plan *e-Government* wajib dibuat untuk menghasilkan rancangan penerapan yang sesuai dengan karakteristik kota/wilayah Kabupaten Cilacap.

Dalam Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi diuraikan Siklus dan Lingkup Perencanaan, bahwa setiap institusi pemerintahan diwajibkan memiliki Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi lima tahunan yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan inisiatif Teknologi Informasi tahunan. Setiap institusi pemerintahan minimal harus memiliki perencanaan atas komponen berikut ini:

A. Arsitektur Informasi

Model informasi organisasi yang mendefinisikan lingkup kebutuhan informasi yang dipetakan ke dalam proses bisnis organisasi terkait.

B. Arsitektur Aplikasi

Model aplikasi organisasi yang mendefinisikan lingkup aplikasi beserta persyaratan dan spesifikasi desain apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengakomodasi seluruh level proses bisnis organisasi seperti: transaksional, operasional, pelaporan, analisa, monitoring dan perencanaan.

C. Arsitektur Infrastruktur Teknologi

Topologi, konfigurasi, dan spesifikasi infrastruktur teknologi beserta pendekatan siklus hidupnya untuk memastikan infrastruktur teknologi yang digunakan organisasi selalu sesuai dengan kebutuhan.

D. Organisasi dan Manajemen

Yaitu struktur organisasi dan deskripsi peran, serta kebijakan dan prosedur untuk menjalankan seluruh proses dalam manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi.

E. Pendekatan dan Roadmap Implementasi

Yaitu pola pendekatan yang digunakan untuk memastikan implementasi seluruh arsitektur beserta organisasi dan manajemen, didukung oleh roadmap implementasi yang mendeskripsikan tahapan-tahapan target implementasi dalam sebuah durasi waktu tertentu.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- j. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- l. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pembinaan *e-Government*;
- m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M/KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- n. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
- o. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- p. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No 57 tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-government Lembaga;
- q. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No 69A tahun 2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk membuat *Master Plan e-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, sehingga nantinya dapat ditentukan aplikasi dan infrastruktur yang akan dikembangkan serta komponen-komponen lain yang dibutuhkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bersih (*clean government*). Sedangkan tujuan kegiatan Pembuatan *Master Plan e-Government* Pemerintah Kabupaten Cilacap ini adalah sebagai berikut:

1. melakukan pendataan kebutuhan aplikasi yang ada di setiap Perangkat Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap.
2. menyusun *Master Plan e-Government* atau tata kelola pemerintahan sebagai titik awal pengembangan *Smart City* di Kabupaten Cilacap
3. menyusun perencanaan desain topologi jaringan yang dapat diterapkan untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Cilacap.
4. menyusun perencanaan aplikasi dan infrastruktur dan pemberian rekomendasi terkait pentahapan implementasi aplikasi dan infrastruktur tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pembuatan *Master Plan e-Government* Pemerintah Kabupaten Cilacap meliputi survei kebutuhan aplikasi, jaringan dan infrastruktur yang dilanjutkan dengan Penyusunan *Master Plan e-Government* yang akan dikembangkan di Kabupaten Cilacap. Adapun ruang lingkup pembahasan dalam dokumen *Master Plan e-Government* Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebijakan dan Regulasi
2. Perencanaan Kelembagaan dan Organisasi
3. Perencanaan Data dan Aplikasi
4. Perencanaan Infrastruktur
5. Perencanaan keberlangsungan sistem

1.5 Prinsip Pengembangan E-Government

Master Plan e-Government Kabupaten Cilacap 2017-2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam mengembangkan TIK, sehingga tidak ada lagi kebijakan yang tumpang tindih terkait pengembangan TIK selama ini.

Pengembangan TIK ini dilakukan secara bertahap dimana secara garis besar dimulai dari Sistem Informasi, kondisi infastruktur, dukungan SDM, dan manajemen tata kelola TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sebagai pedoman acuan dalam pengembangan TIK Kabupaten Cilacap periode 2017 - 2022, *Master Plan e-Government* ini diharapkan tidak terpengaruh dengan adanya pergantian kepemimpinan, karena sudah dibuat dengan prinsip *flexibility* yaitu memberikan panduan yang konsisten namun dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah yang spesifik dan juga dengan prinsip standarisasi yaitu lebih mengedepankan deskripsi manajemen sistem informasi yang bersifat umum dan tipikal, disertai dengan spesifikasi umum dan generik, sehingga dalam batas tertentu terdapat standarisasi sistem informasi yang dapat digunakan secara nasional. Kebutuhan pengembangan TIK di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas, efesiensi dan kualitas hasil kerja di kegiatan operasional di lingkungan manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Pelayanan informasi secara internal dan eksternal, didukung dengan data yang akurat.
3. Adanya data yang akurat, terkini, terstruktur dan terklasifikasi dengan ringkas, menarik dan mudah dibaca agar pengambilan keputusan dapat diambil secara tepat dan akurat.
4. Keamanan yang terjaga serta mampu melakukan *backup* data dan *recovery* ketika terjadi kegagalan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Teknologi informasi dan Komunikasi tersebut di atas, Teknologi informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap harus dibuat terpadu agar konsistensi, keakuratan, dan kekinian data pada setiap sistem informasi dapat dijamin dan dijaga. Pembangunan sistem yang terpadu harus didukung oleh infrastruktur yang

kuat. Infrastruktur merupakan pondasi dari semua pengembangan Teknologi informasi dan Komunikasi yang harus direncanakan dengan baik dan diselaraskan dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan Teknologi informasi dan Komunikasi.

Program pengembangan *e-Government* pada dasarnya adalah cara merealisasikan strategi dalam bentuk aktivitas-aktivitas dan penggunaan sumber daya yang terarah untuk mencapai tujuan strategis. Pengembangan *e-Government* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Efektivitas

Pengembangan *e-Government* harus langsung menuju sasaran dengan memperhatikan semua faktor yang terkait pelaksanaan e-government yang efektif

2. Efisiensi

Akan lebih menguntungkan jika pengembangan *e-Government* bisa bersifat cross-strategy, artinya pengembangan *e-Government* bisa mengakomodasi lebih dari satu strategi. Dengan cara ini sumber daya yang terlibat bisa lebih dioptimalkan.

3. Kontinuitas

Banyak pengembangan *e-Government* yang saling terkait satu dengan lain. pengembangan *e-Government* harus memperhatikan urutan *cause-and-effect* agar kontinuitasnya terjaga.

4. Keberlanjutan

Pengembangan *e-Government* biasanya tidak bisa diselesaikan dalam waktu pendek. Perencanaan pengembangan *e-Government* harus memperhitungkan penahapan (*staging*) yang realistis dan menjamin keberlanjutan dan transisi antara satu tahap dengan tahap berikutnya. Masalah yang sering timbul pada umumnya terkait dengan sistem anggaran atau kekangan-kekangan pada sumber pembiayaan yang bisa diakses.

Profil Daerah

2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Cilacap terletak diantara 1080 4' 30" – 1090 30' 30" (Garis Bujur Timur) serta 7° 30' - 7° 45' 20" (Garis Lintang Selatan). Luas Kabupaten Cilacap tercatat 213.850 Ha (tidak termasuk P.Nusakambangan seluas 11.511 Ha), atau sekitar 6,94 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap secara geografis terdiri dari wilayah perbukitan, dataran rendah dan pesisir.

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, dengan jarak terjauh dari barat ke timur adalah 152 Km, dari Kecamatan Dayeuhluhur sampai Kecamatan Nusawungu dan dari Utara ke Selatan berjarak terjauh 35 Km dari Kecamatan Cilacap kota ke Kecamatan Sampang.

Kabupaten Cilacap memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan
2. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
3. Sebelah Barat : Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat)
4. Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas

Tabel 0.1 Luas Wilayah Kabupaten Cilacap Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	RW	RT
1	Dayeuhluhur	18.506,10	14		118	386
2	Wanareja	18.973,31	16		182	665
3	Majenang	13.856,19	17		167	785
4	Cimanggu	16.744	15		107	446
5	Karangpucung	11.512,43	14		107	417
6	Cipari	12.148	11		80	363
7	Sidareja	5.495,48	10		54	293
8	Kedungreja	7.143	11		93	485
9	Patimuan	7.530	7		79	322
10	Gandrungmangu	14.319,40	14		88	583
11	Bantarsari	9.554	8		67	410
12	Kawunganten	11.743	12		80	468
13	Kampunglaut	14.598	4		39	128
14	Jeruklegi	9.679,46	13		83	432
15	Kesugihan	8.230,62	16		156	690
16	Adipala	6.118,68	16		118	515
17	Maos	2.804,15	10		66	263
18	Sampang	2.730,13	10		72	228
19	Kroya	5.883,39	17		111	550
20	Binangun	5.142,43	17		110	363
21	Nusawungu	6.126,44	17		119	452
22	Cilacap Selatan	910,61		5	73	447
23	Cilacap Tengah	2.217,20		5	80	421
24	Cilacap Utara	1.883,83		5	70	351
25	Pulau Nusa Kambangan	11.511				

Sumber data: BPS, Buku Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2017, 2017

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 tersebut Kecamatan Gandrungmangu merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas mencapai 14.319,40 Ha. Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kroya, Binangun dan Nusawungu dengan total 17 (tujuh belas) Desa. Sedangkan Kecamatan

dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Cilacap Selatan dengan luas wilayah 910,61 Ha. Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Kampung Laut yang memiliki 4 (empat) desa.

Tabel 0.2 Ketinggian Rata-Rata Kecamatan Kabupaten Cilacap

No	Kecamatan	Ketinggian dari Permukaan Laut (m)	Keterangan Tambahan
1	Dayeuhluhur	198	
2	Wanareja	25	
3	Majenang	23	
4	Cimanggu	40	
5	Karangpucung	50	
6	Cipari	50	
7	Sidareja	26	
8	Kedungreja	45	
9	Patimuan	5	<i>Data BMG tidak tersedia, berdasarkan hasil Pendataan Podes 2011, di Ibukota Kecamatan</i>
10	Gandrungmangu	15	
11	Bantarsari	8	<i>Data BMG tidak tersedia, berdasarkan hasil Pendataan Podes 2011, di Ibukota Kecamatan</i>
12	Kawunganten	56	
13	Kampunglaut	1	<i>Data BMG tidak tersedia, berdasarkan hasil Pendataan Podes 2011, di Ibukota Kecamatan</i>
14	Jeruklegi	9	
15	Kesugihan	8	
16	Adipala	8	
17	Maos	8	
18	Sampang	8	<i>Data BMG tidak tersedia, berdasarkan hasil Pendataan Podes 2011, di Ibukota Kecamatan</i>
19	Kroya	10	
20	Binangun	8	
21	Nusawungu	10	
22	Cilacap Selatan	6	
23	Cilacap Tengah	5	
24	Cilacap Utara	6	

Sumber : BPS, Kabupaten Cilacap dalam angka, 2017

Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata-rata 198 meter dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Kampunglaut dengan ketinggian rata-rata 1 meter dari permukaan laut.

Pengembangan sistem pusat pelayanan di wilayah perkotaan Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Kota yang ada pada koridor jalan nasional yang meliputi ibukota di Kecamatan Karangpucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja dan Dayeuhluhur membutuhkan rencana pengembangan yang terintegrasi sebagai pusat pertumbuhan Wilayah Utara.

- b. Kota di pusat Perkotaan Cilacap meliputi kota di Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Jeruklegi dan Kesugihan dikembangkan sebagai pusat pengembangan industri dan perumahan dengan mempertimbangkan pusat pariwisata.
- c. Kota di sekitar jalur Selatan barat mencakup wilayah kota di Kecamatan Sidareja, Kedungreja, Patimuan diupayakan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah perbatasan.
- d. Kota di wilayah tengah Timur meliputi Kecamatan Kroya, Adipala dan Sampang diharapkan menjadi jalur pelayanan perkotaan di sekitarnya dan wilayah kabupaten perbatasan.
- e. Struktur Kota Cilacap adalah berbentuk linier dengan mengikuti jalur penghubung sebagai berikut:
 - (1) Jalur yang membentang dari barat ke timur yang meliputi:
 - Jalur Nasional Ciamis-Yogyakarta.
 - Jalur SP3 Jeruklegi-Batas Prov Jabar.
 - Jalur Cantelan -Sungai Bodo.
 - (2) Jalur yang membentang dari utara ke selatan atau sebaliknya yang meliputi:
 - Jalur Kota Cilacap-Kroya-Perbatasan Banyumas
 - Jalur Kota Cilacap-Maos-Sampang
 - Jalur Kota Cilacap-SP3 Jeruklegi-Wangon

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Cilacap, banyaknya curah hujan tertinggi pada tahun 2016 terjadi pada bulan Oktober (955.0 mm) dan terendah terjadi pada bulan maret (159,3 mm). Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November sebanyak 30 hari, sedangkan jumlah hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Januari dan April sebanyak 19 hari hujan. Suhu maksimum tertinggi tercatat 34.4 °C terjadi pada bulan Januari, sedangkan suhu maksimum terendah 24.9 °C terjadi pada bulan Desember.

Menurut penggunaannya lahan sawah terbagi kedalam berbagai penggunaan yaitu irigasi seluas 47.099 Ha atau sekitar 22,02 persen, tadah hujan seluas 16.431 Ha atau 7,68 persen, Rawa pasang surut seluas 514 Ha atau 0,24 persen, Rawa lebak seluas 694 Ha atau 0,32 persen. Menurut penggunaannya lahan bukan sawah terbagi kedalam berbagai penggunaan yaitu tegal/kebun seluas 41.242 Ha atau sekitar 19,29 persen, ladang/huma seluas 1.547 Ha atau 0,72 persen, perkebunan seluas 12.456 Ha atau 5,82 persen, hutan rakyat seluas 5.872 Ha atau 2,75 persen, tidak diusahakan seluas 142 Ha atau 0,07 persen, tambak, kolam/empang adalah 18.368 Ha atau 8,59 persen, hutan Negara seluas 26.948 Ha atau sebesar 12,60 persen, dan lahan bukan pertanian seluas 42.537 atau sekitar 19,89 persen.

2.2 Kondisi Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap sejak lima tahun terakhir (2012-2016) mengalami fluktuatif, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap sebesar 4,95% terus meningkat pada tahun 2015 menjadi 5,52% dan mengalami penurunan sebesar 5,01 pada tahun 2016. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,28%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan karena produksi pertanian yang turun yang merupakan faktor dominan, penurunan produksi sector kehutanan, investasi yang belum memberikan nilai tambah pada tahun berkenaan serta penurunan kapasitas produksi galian golongan c bahan baku semen. Selain hal tersebut pada tahun 2016 terbit kebijakan mengenai larangan mengeksport bahan tambang mentah, sehingga hal ini menyumbang perlambatan pertumbuhan ekonomi Cilacap.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan Migas Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 PDRB ADHB sebesar Rp.77.450.141,10 juta meningkat menjadi Rp.100.155.799,03 juta pada tahun 2016. Sedangkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tanpa Migas Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 PDRB ADHB sebesar Rp.37.043.557,30 juta meningkat menjadi Rp.53.071.777,80 juta pada tahun 2016. Sektor penyumbang terbesar PDRB ADHB di Kabupaten Cilacap mencakup tiga sektor antara lain yaitu: Industri Pengolahan, sector pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten sekitar meliputi wilayah Barlingmascakeb pada tahun 2016 menunjukkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap pada tahun 2016 sebesar 5,06% berada di urutan ke-3 setelah Kab. Banyumas (6,05%) dan Kab. Banjarnegara (5,41%), sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap masih di bawah capaian Jawa Tengah dan Nasional.

Laju inflasi Kabupaten Cilacap pada tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami penurunan. Laju inflasi Kabupaten Cilacap dari tahun 2012 sebesar 6,44% menurun menjadi 2,77% pada tahun 2016. Laju inflasi Kabupaten Cilacap pada tahun 2016 di atas rata-rata Laju inflasi provinsi Jawa Tengah dan di bawah Nasional masing-masing sebesar 2,36% dan 3,02% serta lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten Banjarnegara (2,87%) namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Purbalingga (1,57%), Kabupaten Banyumas (2,42%), dan Kabupaten Kebumen (2,77%). Capaian inflasi Kabupaten Cilacap tersebut masih di bawah capaian rata-rata Nasional akan tetapi di atas capaian rata-rata inflasi Jawa Tengah pada Tahun 2016.

2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2016 sebanyak 1.785.971 jiwa terdiri dari 895.201 jiwa penduduk laki-laki dan 890.770 jiwa penduduk perempuan dengan Rasio jenis kelamin mencapai 100,4. Jumlah penduduk pada tahun 2016 meningkat 0,33% di bandingkan tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.780.533 jiwa. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 0.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2012-2016

No	Variabel	2012	2013	2014	2015	2016
1	Laki-laki	883.390	885.812	888.928	892.196	895.201
2	Perempuan	880.613	882.690	885.722	888.337	890.770
3	Laki-laki + Perempuan	1.764.003	1.768.502	1.774.649	1.780.533	1.785.971
4	Sex Ratio	100,3	100,4	100,4	100,4	100,4

Sumber: Buku Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2017

Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2012-2016 selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Cilacap sebanyak 1.764.003 jiwa meningkat menjadi sebanyak 1.785.971 jiwa pada tahun 2016. Sedangkan persebaran penduduk di Kabupaten Cilacap juga tidak merata, terlihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Majenang pada tahun 2016 merupakan paling banyak di Kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk sebanyak 128.856 jiwa, sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit berada pada Kecamatan Kampunglout sebanyak 17.263 jiwa. Perincian penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 0.4 Persebaran Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2012-2016

Kecamatan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dayeuhluhur	49.089	49.329	49.677	49.833	49.830
Wanareja	96.332	96.922	97.660	98.494	98.739
Majenang	126.629	127.275	127.769	128.317	128.856
Cimanggu	97.678	97.482	97.237	97.069	97.122
Karangpucung	73.214	73.422	73.642	73.825	73.958
Cipari	61.879	62.135	62.508	63.021	63.172
Sidareja	57.228	57.302	57.403	57.600	57.704
Kedungreja	81.121	80.957	81.093	81.191	81.435
Patimuan	45.841	46.211	46.223	46.348	46.478
Gandrungmangu	104.805	105.095	105.426	105.989	106.190
Bantarsari	69.096	69.387	69.484	69.613	69.970
Kawunganten	80.879	80.812	81.077	81.337	81.435
Kampunglout	17.061	17.163	17.181	17.230	17.263
Jeruklegi	64.179	64.757	65.369	66.140	66.471
Kesugihan	95.961	96.090	96.442	96.737	97.904
Adipala	79.417	79.463	78.842	78.694	79.025
Maos	47.945	47.394	48.731	48.928	48.987
Sampang	37.521	37.574	37.660	37.797	37.816
Kroya	103.322	103.553	103.947	104,28	104.648
Binangun	66.086	66.246	66.314	66.530	66.670
Nusawungu	77.543	77.956	78.010	78.084	78.178
Cilacap Selatan	78.330	78.175	78.512	78.601	78.697
Cilacap Tengah	83.810	84.093	84.261	84.346	84.441
Cilacap Utara	69.037	69.709	70.181	70.613	71.072

Sumber : Buku Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2017

Kepadatan penduduk tertinggi menurut Kecamatan di Kabupaten Cilacap tahun 2016 berada di Kecamatan Cilacap Selatan sebesar 8.639 jiwa/km² dengan jumlah penduduk sebanyak 78.697 jiwa dan luas wilayah sebesar 9,11 km². Kepadatan penduduk di posisi selanjutnya berada di Kecamatan Cilacap Tengah sebesar 3.812 jiwa/km², dengan jumlah penduduk sebanyak 84.441 jiwa dan luas wilayah 22,15 km². Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah yaitu berada di Kecamatan Kampunglout sebesar 118 jiwa/km².

1.6 Kondisi Jaringan Telekomunikasi

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat mampu mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap barang-barang impor baik yang berasal dari luar daerah maupun luar negeri menjadi semakin besar.

Hal ini mendorong meningkatnya kinerja sector perdagangan. Bahkan usaha perdagangan lewat jalur online saat ini telah lazim dilakukan.

Kebutuhan telekomunikasi untuk masyarakat maupun pemerintahan Kabupaten Cilacap dilayani oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi yang ada, sehingga kebutuhan telekomunikasi public seperti telepon kabel maupun selular, internet, televisi dan lain-lain dapat terlayani dengan baik sampai ke pelosok-pelosok wilayah. Akan tetapi untuk kepentingan pemerintahan tidak hanya kebutuhan jaringan telekomunikasi publik saja yang dibutuhkan, kebutuhan jaringan telekomunikasi tertutup atau *private networking* juga sangat dibutuhkan untuk menghindari penyalahgunaan data maupun upaya *hack* data pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya keamanan data pemerintahan dengan jaringan telekomunikasi yang tidak tercampur dengan jaringan publik.

Di lain pihak, jaminan keterbukaan informasi publik mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang tersebut jelas disebutkan bahwa semua masyarakat mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan semua informasi publik yang tidak dikecualikan.

Tabel 0.5 Capaian Kinerja PD Yang Melakukan Update Website Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Total PD	Jumlah PD yang memiliki Web Site	% PD yang memiliki Web Site	Jumlah PD yang melakukan up dating data pada Web Site	% PD yang melakukan up dating data pada Web Site
2012	67	52	77%	12	23%
2013	67	52	77%	15	28%
2014	67	52	77%	16	30%
2015	67	52	77%	18	34%
2016	67	52	77%	18	34%

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Cilacap, 2017

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Masyarakat dapat mengakses Informasi pembangunan daerah melalui *website* resmi pemerintah Kabupaten Cilacap yakni di www.cilacapkab.go.id. Selain *website* resmi tersebut, terdapat 52 (lima puluh dua) dari 67 (enam puluh tujuh) Perangkat Daerah yang telah memiliki *website* seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.5. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan *website* adalah keterbatasan SDM yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Sampai tahun 2016 hanya ada 66,67% SDM yang memiliki keahlian spesifik di bidang tersebut. Sedangkan cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan Tahun 2016 sebesar 70,83%.

Kota Cerdas Cilacap (*smart city*) sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam tahap pengembangan *smart city* melalui penerapan e-government. Beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap sudah menggunakan aplikasi Informatika walaupun belum terintegrasi dalam satu pengelolaan oleh Diskominfo, antara lain Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENBANGDA), POK, Sistem Informasi Jembatan dan Jalan (SIMBAJA) dan e-proc, sedangkan Aplikasi Pelayanan Publik yang telah digunakan adalah e-AKTA, SIAK, PATEN dan SIMPUS.

Komunikasi dan informasi sebagai salah satu kebutuhan yang vital di era teknologi ini juga harus bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Penyebaran informasi salah satunya adalah melalui media elektronik radio. Dari tahun 2012-2016 terdapat 16 penyiaran radio/TV di Kabupaten Cilacap dan pelayanan telekomunikasi. Pelayanan komunikasi dan informasi di Kabupaten Cilacap dilayani oleh PT. Telkom, PT. Indosat Ooredoo, PT XL Axiata dan vendor-vendor lain. Pelayanan komunikasi seluler dan internet sudah mencakup 100% di seluruh wilayah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Cilacap saat ini dalam bidang komunikasi dan informatika adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah, sampai dengan tahun 2016 masih pada peringkat 30 dari 35 kab/kota.
2. Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal, karena belum semua website PD updated (capaian tahun 2016 sebesar 23%).
3. Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (tahun 2016) sebesar 70,83%.

BAB III

Kerangka Berpikir TIK

Pada saat ini di Kabupaten Cilacap telah berlangsung berbagai kegiatan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang sebenarnya adalah merupakan bagian dari pembangunan menuju terciptanya *e-Government*. Kegiatan tersebut mencakup pembangunan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi.

Sistem Informasi atau aplikasi yang akan dibangun harus mampu mendukung kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Dasar kerangka pikir TIK diperlukan agar dalam pengembangan TIK di Kabupaten Cilacap dapat membentuk *e-Government* yang terstandarisasi. Panduan pengembangan *Master plan* dan *Blueprinte-Government* yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dijadikan sebagai salah satu pedoman utama dalam pengembangan *Master Plan e-Government* di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan analisis tahapan pengembangan *e-Government* secara nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap telah memasuki pada tingkat pematangan, dengan dilandasi salah satunya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sudah memiliki situs yaitu www.cilacapkab.go.id selain itu juga telah melakukan pendidikan dan pelatihan dan beberapa kegiatan lainnya.

3.1 Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Cilacap

Pola yang akan dikembangkan adalah memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif, sebagaimana disebutkan dalam isu-isu pembangunan, diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Hal ini juga akan ditandai dengan makin dominannya peran pengetahuan dan penguasaan teknologi, yang diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya sehingga kemajuan yang dicapai menjadikan Cilacap lebih berdaya saing.

Berpedoman pada hal-hal yang sudah dicapai pada proses pembangunan sebelumnya, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Cilacap lima tahun ke depan, maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis untuk mengatasi segala persoalan yang saat ini masih eksis menuju Cilacap baru yang lebih makmur dan sejahtera serta berkeadilan.

Visi pembangunan Daerah tahun 2005–2025 yang tercantum dalam RPJPD adalah: “Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera” Visi Pembangunan Kabupaten Cilacap 20 tahun ke depan diharapkan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu visi Kabupaten Cilacap tidak lepas dari Visi dalam RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah karena penyusunan RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJPD Provinsi. Visi Pembangunan harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat berbudaya dan kesejahteraan yang ingin dicapai Misi.

3.1.1 Visi dan Misi

RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga dan keempat menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kabupaten Cilacap Tahun 2017 -

2022. Visi pembangunan Kabupaten Cilacap berdasarkan analisis visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

**“CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA”
“Bangga Mbangun Desa”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kabupaten Cilacap akan menjadi Kabupaten dengan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang dilaksanakan merata di seluruh kecamatan. Pencapaian Visi di atas juga memperhatikan Bangga Mbangun Desa yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan sosial budaya.

Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Cilacap akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar urusan pemerintahan maupun sarana dan prasarana penunjang lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat memperhatikan aspek lingkungan hidup. Kesejahteraan ini dapat ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka.

Merata, mengandung arti bahwa pembangunan di Kabupaten Cilacap dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan semua wilayah secara berkeadilan. Pembangunan yang merata dapat dilihat dari semakin rendahnya kesenjangan pendapatan antar penduduk dan semakin rendahnya kesenjangan antar wilayah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah sampai ke pelosok desa dan kecamatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat.

Bangga Mbangun Desa merupakan strategi pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita Bupati dan Wakil Bupati pada saat Kampanye “Ayo Kerja Mbangun Desa Menuju Cilacap Sejahtera”. Pengertian ayo kerja adalah suatu ajakan dan upaya yang sungguh sungguh, dengan mengerahkan seluruh daya, upaya, tenaga, fikiran dan aset dari semua komponen pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan pembangunan secara utuh (kafah) dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera. Ayo Kerja Mbangun Desa menuju Cilacap Sejahtera menjadi dasar dan landasan dalam mewujudkan Cilacap to be Singapore of Java.

Cilacap to be Singapore of Java merupakan konsep Kabupaten Cilacap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa bagian Selatan dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan industri terpadu, yang terhubung dengan fasilitas infrastruktur penunjang (Pelabuhan Tanjung Intan, jalan tol Ciamis-Cilacap-Jogjakarta, Pejagan-Cilacap, terkoneksi dengan jalur kereta api) dan di dukung dengan pengembangan pusat jasa dan perdagangan serta pengembangan kawasan wisata dengan menjaga kelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang optimal.

Makna Bangga Mbangun Desa yang terdiri dari 4 (empat) pilar meliputi Pendidikan; Kesehatan; Ekonomi; dan Lingkungan Sosial Budaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 76 tahun 2011 tentang Bangga Mbangun Desa adalah:

1. Sebagai kebijakan dan strategi percepatan (akselerasi) pembangunan;
2. Pedoman bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap secara terpadu dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi perdesaan;
3. Sebagai pendorong semangat dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemajuan desa menuju desa mandiri.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Cilacap Tahun 2016 - 2021 yaitu **“CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA” “Bangga Mbangun Desa”**,

tersebut, ditempuh melalui 5 misi yang merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Cilacap, yaitu:

1. Misi 1: Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga.

Pada Misi ini pemerintah Kabupaten Cilacap akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, penanganan PMKS sesuai standar pelayanan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penataan desa dan pemanfaatan dana desa, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta peningkatan kualitas kebudayaan Kabupaten Cilacap.

2. Misi 2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Cilacap akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government* (*eplanning*, *e-budgeting*, *e-sakip* *e-monitoring* evaluasi, dan *e-procurement*)

3. Misi 3: Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Pada misi ini Kabupaten Cilacap akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

4. Misi 4: Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional.

Pada misi ini Kabupaten Cilacap akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

5. Misi 5: Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), kualitas lingkungan yang memadai, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kabupaten Cilacap dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diperlukan pembangunan merata dengan semangat: **“Bangga Mbangun Desa”**.

Dari visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kabupaten Cilacap tersebut, serta semangat yang dijabarkan dengan slogan **“Bangga Mbangun Desa”**, maka dapat disimpulkan enam kondisi yang hendak dicapai oleh Kabupaten Cilacap, terdiri atas:

1. *Smart Governance*

- Pemimpin yang efektif dan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah rakyat.
- Terkelolanya sumber daya daerah yang berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial.
- Pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional dengan daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan umum.

2. *Smart Economy*

- Sistem pertanian modern sebagai basis pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh, memicu investasi dan industri, menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.
- Kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran, serta perluasan kesempatan kerja.

3. *Smart Living*

- Penataan kawasan yang nyaman untuk semua dimana tersedia ruang publik yang memadai, berwawasan kelestarian lingkungan, pengurangan ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan

4. *Smart Society*

- Penataan kawasan yang nyaman untuk semua, pengurangan ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan
- Peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat dan bertaqwa

5. *Smart Branding*

- Budaya Keteladanan, berbenah, lebih maju, religius

6. *Smart Environment*

- Penataan kawasan yang berwawasan kelestarian lingkungan

Dengan adanya enam komponen kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cilacap memiliki keinginan dalam memajukan pembangunan dengan bantuan teknologi informasi, dimana proses yang diinginkan adalah:

1. Pemimpin efektif yang membutuhkan *Decision Support System*
2. Pengelolaan sumber daya daerah dan infrastruktur yang membutuhkan sistem informasi yang terpadu
3. Pertanian modern dan kemandirian baru yang dapat dicapai jika ada dukungan sistem
4. Penataan wilayah yang harus berbasis data spasial yang tepat dan sesuai.
5. Layanan yang tepat sasaran dan efektif yang membutuhkan sistem informasi yang terpadu

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional dan Provinsi.

Dalam rangka mencapai misi maka tujuan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1: Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga**, memiliki tujuan:
 1. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak
2. **Misi 2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government** memiliki tujuan; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government (transparansi berbasis e-government)
3. **Misi 3: Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat** memiliki tujuan; Meningkatkan kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat.
4. **Misi 4: Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional** memiliki tujuan; Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah.
5. **Misi 5: Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan** memiliki tujuan; Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hasil rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap Berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan** dengan sasaran:
 - a. meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
 - b. meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat.
2. **Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak** dengan sasaran:
 - a. meningkatnya kesejahteraan sosial.
 - b. meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender.
 - c. meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan Anak
3. **Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip good governance dan clean government (transparansi berbasis e-government)** dengan sasaran:
 - a. meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan melayani.
 - b. meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah.
4. **Meningkatkan kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat** dengan sasaran:
 - a. meningkatnya demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik.
 - b. meningkatnya keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
 - c. meningkatnya kesiapsiagaan bencana.
5. **Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah** dengan sasaran:
 - a. meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
 - b. meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi wisata.
 - c. menurunnya pengangguran terbuka.
 - d. meningkatnya nilai investasi.
6. **Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah** dengan sasaran:
 - a. meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur wilayah.
 - b. terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.

3.2 Konsep Pengembangan E-Government

Menurut Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, setiap Gubernur dan Bupati / Walikota diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi

dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional.

Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu:

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Dengan melihat aktifitas yang berkaitan dalam pemanfaatan TIK oleh pemerintah, maka konsep pengembangan *e-Government* di setiap lembaga pemerintah sangat ditentukan oleh:

1. Tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga.
2. Jenis informasi sumberdaya.
3. Jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga.

Hal ini menentukan struktur data dan proses bisnis yang menjadi dasar penyusunan rencana induk *e-Government* di setiap lembaga pemerintah. Jenis layanan yang diberikan dan jenis informasi yang dibutuhkan, menentukan prioritas pengembangan *e-Government* suatu lembaga pemerintah, menyangkut hubungan *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B) dan *Government to Citizen* (G2C).

Pengembangan *e-Government* lembaga, perlu diperhatikan dan disiapkan aspek kepemimpinan (*e-leadership*), aspek kesadaran akan manfaat *e-Government* (*awareness building*), aspek sumber daya manusia dan peraturan perundangan yang mendukung. Seluruh aspek berperan dalam menentukan arsitektur sistem informasi yang akan dibangun (*enterprise architecture*). Aspek tersebut dituangkan dalam pondasi infrastruktur.

Pengembangan *e-Government* di suatu lembaga pemerintah, dilandasi oleh 4 (empat) infrastruktur utama, meliputi:

1. Suprastruktur *e-Government* yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (*e-leadership*), sumberdaya manusia (*human resources*) dan peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan *e-Government* (*regulation*).
2. Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan, yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah.
3. Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metoda berbagi data (*data sharing*), dan sistem pengamanannya, yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik.
4. Infrastruktur sistem informasi yang memuat antara lain sistem informasi layanan publik, sistem informasi antar muka (*interface*), dan sistem informasi *back office* yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Standar Mutu, Jangkauan Layanan dan Pengembangan sistem informasi.

Seluruh infrastruktur tersebut akan dibangun dalam satu kerangka berpikir yang utuh, sehingga konsep pengembangan infrastruktur diarahkan kepada pemanfaatan semaksimal mungkin sumberdaya informasi yang telah ada sebagai modal utama dalam mengembangkan *e-Government*. Pengembangan *e-Government* pada setiap Perangkat Daerah, selain akan meningkatkan pemanfaatan sistem

informasi yang dimiliki, juga diharapkan meningkatkan layanan publik dan operasional pengelolaan Pemerintah secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan konsep pengembangan *e-Government* lembaga tersebut, maka dalam penyusunan master plan *e-Government* Kabupaten Cilacap perlu menelusuri seluruh kegiatan di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.

3.2.1 Penerapan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah

Penerapan *e-Government* di setiap lingkungan pemerintah daerah mengacu kepada pentahapan pengembangan *e-Government* secara nasional dan penerapan ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah, yang mencakup beberapa hal yaitu:

1. Prioritas layanan elektronik yang akan diberikan.
2. Kondisi infrastruktur informasi yang dimiliki.
3. Kondisi kegiatan layanan saat ini.
4. Kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Penerapan *e-Government* di setiap lingkungan pemerintah daerah disesuaikan dengan kondisi yang ada pada setiap perangkat daerah tersebut, sehingga perlu ditelusuri kondisi saat ini (eksisting) dari *e-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sebagai mekanisme awal dalam penerapan *e-Government*. Adapun tahapan pengembangan *e-Government* secara nasional terdiri atas tingkat persiapan, tingkat pematangan, tingkat pemantapan dan tingkat pemanfaatan.

1. Tingkat Persiapan

- a. Pembuatan situs web pemerintah (lihat buku Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah) di perangkat daerah.
- b. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan *e-Government*.
- c. Penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk *Multipurpose Community Center* (MCC), Warung dan kios Internet, dan lain-lain.
- d. Sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal.
- e. Pengembangan motivasi kepemimpinan (*e-leadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat e-government (*awareness building*).
- f. Penyiapan peraturan pendukung.

2. Tingkat Pematangan

- a. Pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (*search engine*), fasilitas tanya jawab dan lain-lain.
- b. Pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (*hyperlink*).

3. Tingkat Pemantapan

- a. Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain.
- b. Penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain (*interoperabilitas*).

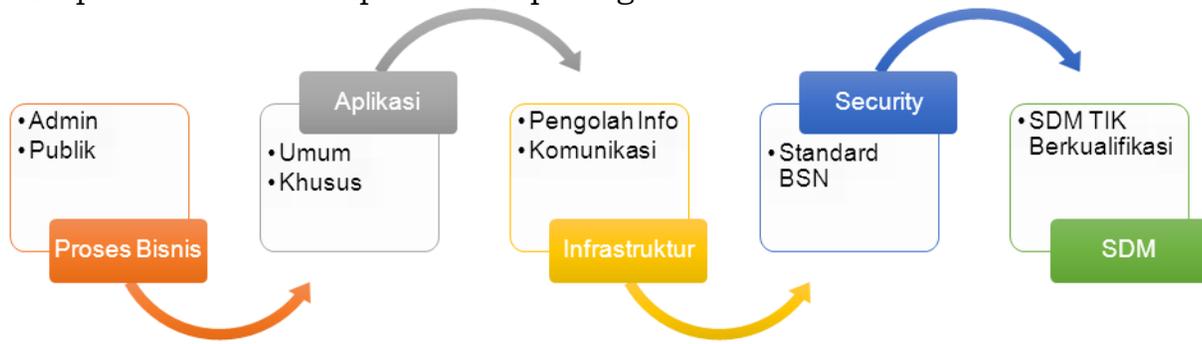
4. Tingkat Pemanfaatan

- a. Pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Bussines*) dan G2C (*Government to Citizen*) yang terintegrasi.
- b. Pengembangan proses layanan *e-Government* yang efektif dan efisien.
- c. Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (*best practice*).

3.2.2 Komponen Pendukung e-Government Berbasis Layanan Kabupaten Cilacap

E-Government yang diterapkan bagi Kabupaten Cilacap merupakan *e-Government* yang berbasis layanan, dimana terdapat beberapa poin yang akan

menjadi komponen pendukung dalam *e-Government* Kabupaten Cilacap. Poin-poin komponen tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 0.1 Proses Pengembangan e-Government Berbasis Layanan

Dari gambar 3.1 tersebut dapat dilihat dalam lima komponen untuk melaksanakan proses pengembangan *e-Government* berbasis layanan, dimana masing-masing komponen memiliki persyaratan dan atau ketentuan tertentu. Persyaratan bagi masing-masing komponen tersebut adalah:

1. **Proses Bisnis**
Pada komponen ini, diperlukan bagi pihak Perangkat Daerah untuk mendefinisikan proses kerja masing-masing Perangkat Daerah, apakah sebagai bagian dari administrasi atau layanan langsung.
2. **Aplikasi**
Untuk komponen aplikasi, setiap Perangkat Daerah perlu memahami aplikasi yang diperlukan untuk administrasi dan aplikasi yang digunakan untuk melayani.
3. **Infrastruktur**
Infrastruktur adalah komponen yang penting, karena tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, layanan tidak akan bisa efektif dan efisien
4. **Security**
Seluruh proses dan aplikasi yang ada harus didukung dengan proyeksi keamanan, untuk mencegah terjadinya pencurian data, kerusakan data dan *system* dan hal lain yang bias mengakibatkan kerugian.
5. **Sumber Daya Manusia**
Seluruh proses harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terlatih, termasuk CIO. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan jalannya suatu aplikasi ataupun system yang akan diterapkan.

3.2.3 Sasaran Pembangunan E-Government

Sasaran pembangunan dari *e-Government* terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

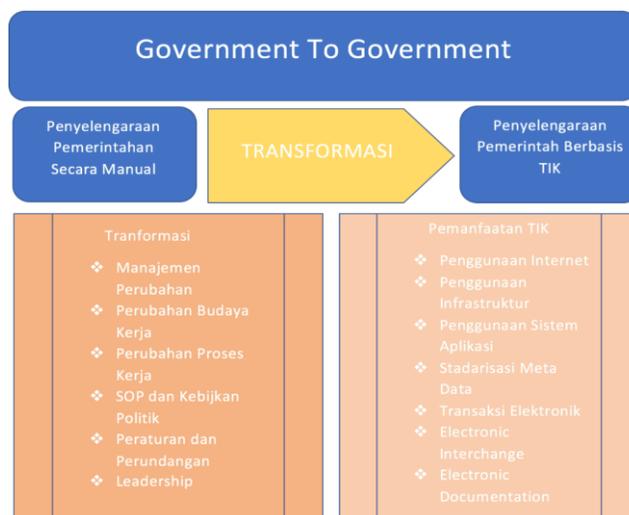
1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

3.2.4 Tahapan Menuju E-Government

Melaksanakan *e-Government* artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) TIK. Dalam arti kata lain adalah melakukan transformasi sistem proses kerja ke sistem yang berbasis elektronik. Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan disesuaikan untuk memungkinkan

berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal. Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformasi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus menggunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik.

Pelaksanaan *e-Government* dilaksanakan dengan proses transformasi dari pemerintah (*government*) yang menyelenggarakan pemerintahan secara manual menjadi pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan berbasis TIK. Proses transformasi tersebut dapat dilihat pada gambar 3.2, dimana dijelaskan bahwa proses tranformasi tersebut diawali dengan perubahan pada proses manual yang terdiri atas manajemen perubahan, perubahan budaya kerja, perubahan proses kerja, SOP dan kebijakan politik, peraturan dan perundangan, serta *leadership* menjadi proses pemanfaatan TIK yang terdiri atas penggunaan internet, infrastruktur, system aplikasi, standarisasi metadata, transaksi elektronik, *electronic*



interchange dan *electronic documentation*.

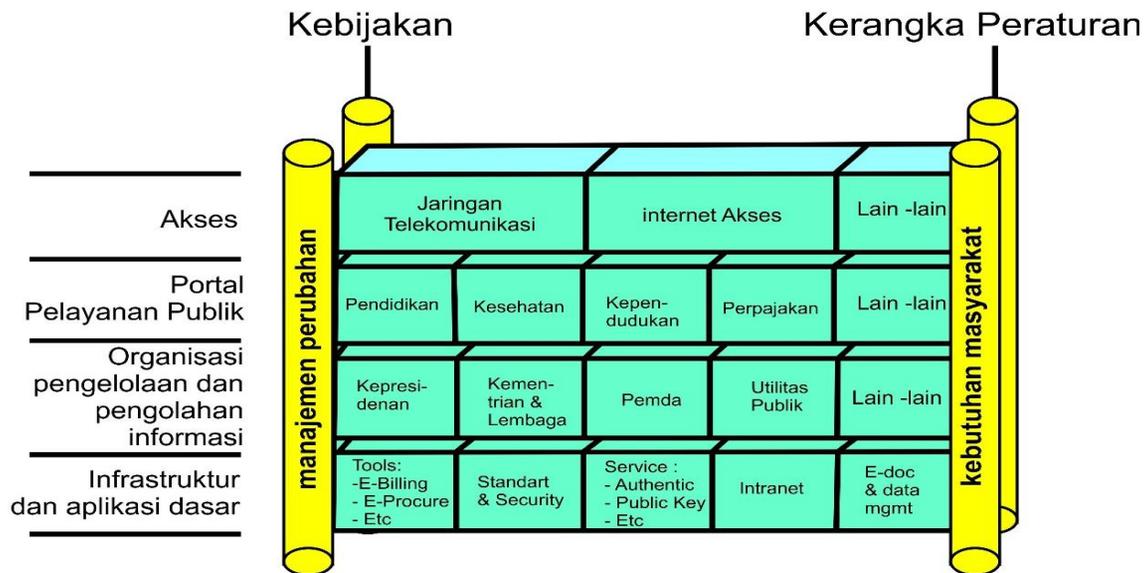
Gambar 0.2 Transformasi e-Government Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap

3.2.5 Kerangka Arsitektur E-Government

Salah satu kata kunci *e-Government* adalah pemanfaatan TIK. Ini artinya bahwa akan ada unsur-unsur TIK seperti sistem informasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan Pemerintah. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan TIK ini berkaitan dengan:

1. Penggunaan Internet.
2. Penggunaan Infrastruktur Telematika.
3. Penggunaan Sistem Informasi.
4. Standarisasi Metadata.
5. Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik.
6. Sistem Dokumentasi Elektronik.

Selanjutnya untuk menjamin keterpaduan serta *interoperabilitas* inter komponen dalam sistem *e-Government* dan juga antar sistem *e-Government* itu sendiri, maka perencanaan dan pengembangan *e-Government* perlu dirumuskan dalam kerangka arsitektur *e-Government*, seperti dijelaskan pada gambar 3.3.



Gambar 0.3 Kerangka Arsitektur e-Government

3.3 Pengembangan E-Government Berbasis Layanan pada Kabupaten Cilacap

Berdasarkan kerangka arsitektur *e-Government* pada gambar 3, secara komprehensif bahwa pengembangan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah harus di dukung dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang handal. Maka dalam penyusunan *Master Plan e-Government* Kabupaten Cilacap perlu penelusuran infrastruktur dan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.

Proses pengembangan e-government berbasis layanan ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

3.3.1 Tahapan Pengembangan E-Government Berbasis Layanan pada Kabupaten Cilacap

Dengan menyesuaikan keadaan dari Kabupaten Cilacap, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan untuk mengembangkan e-Government dari Kabupaten Cilacap. Adapun tahapan yang diperlukan dalam pelaksanaannya dapat dilihat pada gambar 3.4.



Gambar 0.4 Tahapan Pengembangan e-Government pada Kabupaten Cilacap

Dari tahapan pengembangan *e-Government* yang digambarkan pada gambar 3.4 tersebut, dapat diuraikan menjadi beberapa poin, yaitu:

- Melakukan inventarisasi dan kajian dokumen terkait perencanaan, pengembangan, Pelaksanaan TIK
- Melakukan identifikasi kondisi makro penerapan TIK saat ini, hambatan dan kendala penerapan, serta berbagai kebijakan penerapan TIK
- Melakukan identifikasi kondisi teknis (identifikasi dan evaluasi teknis) TIK terapan dan potensi pengembangannya
- Melakukan desain sistem atau arsitektur terintegrasi dalam rangka penerapan teknologi dengan mengacu kepada 3 pilar pokok, yaitu proses

bisnis yang tepat, peraturan (regulasi) terkait dan teknologi terbaik yang sesuai untuk penerapan di Kabupaten Cilacap.

- Berdasarkan hasil desain sistem akan dilakukan desain sub-system dan perangkat dukung.
- Berdasarkan hasil basic desain akan dilakukan penyusunan pentahapan dan spesifikasi dasar dari teknologi yang nantinya diterapkan.

3.3.2 Tujuan Implementasi E-Government

Pemerintahan Daerah melakukan pembuatan *Master Plan E-Government* bertujuan antara lain untuk:

1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan Pemerintah.
2. Terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
3. Perbaiki organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan.

3.3.3 Konsep Perencanaan Pengembangan E-Government Berbasis Layanan pada Kabupaten Cilacap

Selain menentukan komponen dan melaksanakan tahapan dari pengembangan, langkah lain yang harus ditempuh adalah proses perencanaan, dimana proses yang dilaksanakan terdiri atas pembuatan dokumen-dokumen pendukung, yaitu master plan dan roadmap. Penjelasan mengenai keduanya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 0.1 Penjelasan Konsep Master Plan dan Roadmap TIK

Master Plan E-Government	Master Plan Smartcity	Master Plan TIK	Roadmap Technology
Menuju smart-governance	Perencanaan smart-city, dengan memilih pilar prioritas	Perencanaan detail setiap elemen <i>smart-city</i> dengan memperhatikan proses optimal	Perencanaan detail berbasis sistem, perangkat teknologi dan peralatan, termasuk aplikasi
Evaluasi kesenjangan berdasarkan framework I.T.I.L, CoBIT, dll.	Dekripsi perencanaan program TIK disusun berdasar issue strategis, sasaran dan target.	Deskripsi perencanaan dan penerapan dilihat dari proses bisnis yang dilakukan dan disesuaikan dengan ketersediaan teknologi	Deskripsi perencanaan mengacu pada pemilihan optimal produk teknologi (quality vs cost) sesuai proses bisnis yang sedang dilakukan.

BAB IV

Kondisi TIK Kabupaten Cilacap

Kondisi TIK Kabupaten Cilacap saat ini secara umum telah masuk dalam tahap pematangan. Pengembangan TIK Kabupaten Cilacap periode 2017–2021 harus memperhatikan kondisi TIK Kabupaten Cilacap saat ini sebagai tolok ukur mengetahui kebutuhan mendasar pemerintah daerah dalam bidang TIK. Berdasarkan hal tersebut, maka pada bab ini dideskripsikan kondisi TIK Kabupaten Cilacap yang terbagi dalam 3 aspek utama yaitu aspek Kebijakan TIK, Kelembagaan / Organisasi TIK, Aspek Infrastruktur jaringan (LAN, MAN, Internet), Modul Sistem Informasi / Aplikasi, dan aspek Sumber Daya Manusia (SDM).

Analisis kondisi saat ini merupakan kegiatan menganalisis proses bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk mendefinisikan sistem informasi yang relevan digunakan saat ini, mendefinisikan kondisi infrastruktur jaringan dan mendefinisikan keberadaan sumber daya manusia staf pranata komputer. Analisis kondisi saat ini dilakukan dengan memodelkan sistem informasi yang digunakan dan mekanisme pengembangannya ke dalam *framework function government*.

4.1 Kondisi Modul Sistem Informasi / Aplikasi

Master Plan e-Government Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem informasi pemerintahan yang harus diberikan oleh suatu pemerintah daerah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan pemerintah daerah, yang diperlukan guna terselenggaranya sistem pemerintahan daerah. Cetak biru merupakan bentuk *Master Plan e-Government* yang lebih teknis dalam implementasinya.

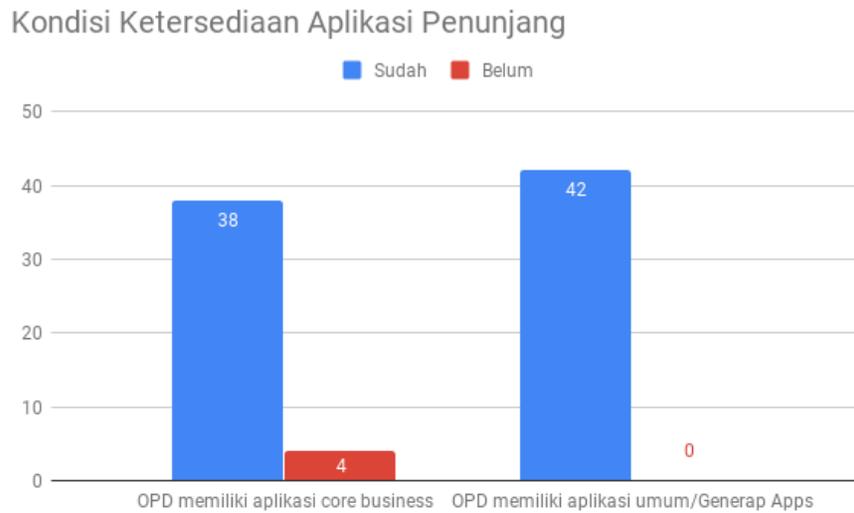
Dokumen *Master Plan* atau Cetak Biru (*Blueprint*) dibuat dengan dua pendekatan yaitu pendekatan fungsi pemerintahan kemudian dikelompokkan menjadi blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen, pembangunan, keuangan, kepegawaian) dan fungsi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi kedinasaan dan kelembagaan. Pengelompokan berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem pemerintahan yang harus diberikan oleh suatu pemerintah daerah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan pemerintah daerah, yang diperlukan guna terselenggaranya sistem pemerintahan daerah. Sistem Pemerintah daerah yang diacu dalam dokumen tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Selain itu dengan pendekatan terhadap orientasi layanan yang disediakan sistem, apakah untuk internal Pemerintah atau masyarakat. Juga apakah fungsi utama sistem tersebut terutama disajikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi pemerintah tertentu atau untuk kebutuhan yang sifatnya umum dan/atau mendasar. Kelompok Blok Fungsi dan bagian-bagiannya (komponen Modul) disusun dalam sebuah Bagan Fungsi yang selanjutnya dalam dokumen *Master Plan E-Government (Blueprint)* ini disebut sebagai Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan.

4.1.1 Ketersediaan Modul Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan aplikasi-aplikasi pendukung bagi Perangkat Daerah yang ada untuk memudahkan kinerja mereka. Aplikasi tersebut terdiri atas berbagai macam jenis, mulai dari website hingga aplikasi internal. Adanya aplikasi/perangkat lunak penunjang kegiatan utama Perangkat Daerah pada Kabupaten Cilacap merupakan salah satu aspek untuk mempermudah kinerja dalam melayani masyarakat, dan melakukan operasional sesuai dengan tugas,

pokok, dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah . Dengan melihat hasil survey yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menggunakan beberapa aplikasi khusus untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat atau kegiatan pemerintahan.



Gambar 0.1 Hasil Responden Tentang Ketersediaan Aplikasi Penunjang

Pada gambar 4.1 dapat terlihat bahwa dari 42 Perangkat Daerah yang menjadi lokasi survey, sebanyak 38 Perangkat Daerah telah memiliki aplikasi yang menunjang core business, dimana sebagian besar dari aplikasi tersebut merupakan hasil pengembangan Dinas Tingkat I atau Kementrian di Pemerintahan Pusat. Sedangkan 4 Perangkat Daerah masih belum memiliki aplikasi penunjang core business. Sebanyak 40 Perangkat Daerah sudah memiliki rencana pengembangan untuk aplikasi yang dikehendaki sebagai penunjang seluruh kegiatan pada masing-masing bidang yang dimiliki setiap Perangkat Daerah .

4.1.2 Pemanfaatan Modul Sistem Informasi

Pemanfaatan Sistem Informasi yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cilacap terbagi atas 2 (dua) kegunaan, yaitu untuk pelaksanaan core business dan untuk aplikasi umum. Beberapa aplikasi untuk pelaksanaan core business yang saat ini ada dan digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Tabel 4.1, dimana setiap Perangkat Daerah pada umumnya telah memiliki aplikasi untuk menunjang core business.

Aplikasi pendukung KPI ini sebagian besar dikembangkan oleh pihak pemerintah pusat atau provinsi, walau ada beberapa yang merupakan hasil inovasi Perangkat Daerah dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Sedangkan aplikasi umum dikembangkan oleh pihak Kominfo sebagai penunjang kegiatan administrasi setiap Perangkat Daerah yang ada. Keberadaan aplikasi pendukung KPI ini belum sepenuhnya otomatis, dalam pengertian masih memiliki proses di dalamnya. Terdapat pula beberapa aplikasi yang susah untuk diambil ataupun diproses datanya karena terenkripsi, seperti yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan.

Tabel 0.1 Daftar Aplikasi di Lingkungan Pemkab Cilacap

No	Unit/ Dinas/ Badan	APLIKASI PENDUKUNG KPI (CORE BUSSINESS APPS)			
		Aplikasi	Uraian Pemanfaatan	Dukungan Keamanan	Dukungan Dokumentasi
1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha	E-SKA (Surat Keterangan Asal)	Surat Keterangan Asal (untuk eksportir)		Ada user manual

APLIKASI PENDUKUNG KPI (CORE BUSSINESS APPS)					
No	Unit/ Dinas/ Badan	Aplikasi	Uraian Pemanfaatan	Dukungan Keamanan	Dukungan Dokumentasi
2	Kecil dan Menengah (DPKUKM)	SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok)	<i>Early Warning System</i> untuk Pemantauan Harga Barang		Ada user manual
		SIHATI (Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi)	Pelaporan monitoring perkembangan harga harian		
		ODS (<i>Online Data System</i>)	Pendataan perkembangan koperasi. Sudah Terintegrasi dengan Provinsi		
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	SIDAKEB (Sistem Data Kebinamargaan)	Informasi proyek Dinas PUPR	Tidak Ada	Tidak ada dokumentasi
		SIJAKAKANCIL	Sistem monitoring proyek	Tidak Ada	Tidak ada dokumentasi
		GIS Tata Ruang	Sistem Informasi Geografis untuk tata ruang	Tidak Ada	Tidak ada dokumentasi
		GIS Bina Marga	Sistem Informasi Geografis untuk kondisi jalan	Tidak Ada	Tidak ada dokumentasi
		eMonDak	Sistem monitoring dana alokasi khusus	Tidak Ada	Tidak ada dokumentasi
3	Dinas Perhubungan	SIMBAJA (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa)	Monitoring kondisi jalan	Tidak Ada	Tidak ada dokumentasi
		SmartKIR	Sistem Informasi untuk proses pendaftaran online, verifikasi, proses pengujian, dan hasil uji KIR		Tidak ada dokumentasi
		Software yang terintegrasi dengan alat uji KIR	Untuk pembacaan data hasil uji KIR.		
		<i>Whatsapp Gateway</i>	Memberikan informasi untuk kendaraan wajib Uji KIR		Tidak ada dokumentasi
4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Wisata Cilacap	Memberikan informasi destinasi wisata melalui aplikasi android maupun website	Tidak Ada	Ada
		Cilacap Tour VR	Virtual Reality Tour untuk pariwisata Cilacap	Tidak Ada	Ada
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Memberikan informasi mengenai kependudukan dan pencatatan sipil	Antivirus Symantec	Ada
		SIAK Konsolidasi			
		Benroll (Aplikasi Rekam KTP-el)	Aplikasi untuk rekam eKTP		

APLIKASI PENDUKUNG KPI (CORE BUSSINESS APPS)					
No	Unit/ Dinas/ Badan	Aplikasi	Uraian Pemanfaatan	Dukungan Keamanan	Dukungan Dokumentasi
6	Dinas Lingkungan Hidup	Bcard Management (Aplikasi Cetak KTP-el)	Aplikasi untuk cetak eKTP		Tidak Ada
		Suplemen SIAK	Aplikasi pemrosesan SIAK		
		Surat Keterangan KTP-el	Aplikasi cetak surat keterangan eKTP		
		Pelayanan Online Adminsuk	Aplikasi pengajuan online		Ada
		SMS Gateway	Pemberitahuan informasi data bermasalah		
		SI INSAN	Sistem Informasi pendataan infrastruktur sanitasi: kendaraan, kapasitas TPA-TPS		
KRISNA	Aplikasi untuk pengalokasian dana khusus				
7	Satpol PP	Tidak ada			
8	Dinas KB PP PA	Statistik Rutin	Laporan Peserta KB Bulanan	Tidak ada	Ada
		SIGA	Sistem informasi Gender dan Anak		
		SIMPONI			
9	Bagian Pemerintahan & Otda	paten.cilacapkab.go.id	Pelayanan perizinan IMB dan Reklame kepada Masyarakat	Tidak ada	Tidak ada
		Aplikasi Penetapan Batas Wilayah (GIS)	Mengolah data tapal batas wilayah dan rupabumi	Antivirus	Tidak ada
10	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	LPSE Versi 4.3		Menggunakan firewall (free OS)	Tidak ada
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DIBI (Data Informasi Bencana Indonesia)	database nasional bencana secara real time	Tidak ada	BIMTEK
		InAWARE	sistem peringatan dini dan sistem pembuatan keputusan dalam pengelolaan bencana		
		Indonesia Disaster Rapid Assessment (InDRA)	Monitoring dan laporan dari personil lapangan		
		inaRISK	informasi lokasi potensi rawan bencana		
		Sistem Informasi Daerah Potensi Rawan Bencana	Informasi potensi rawan bencana kawasan cilacap		
12	Badan Kesatuan Bangsa dan	Tidak ada			

No	Unit/ Dinas/ Badan	APLIKASI PENDUKUNG KPI (CORE BUSSINESS APPS)			
		Aplikasi	Uraian Pemanfaatan	Dukungan Keamanan	Dukungan Dokumentasi
	Politik				
13	Bagian Administrasi Pembangunan	TERRA			
		BANKEU			
		SIMPOK			
		SIPECI			
		SAKIB			
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIGAB			
		Dapodik	Database pendidikan dari PAUD hingga SMP	Ada	Ada
		Aplikasi Ujian Sekolah	Untuk pendataan siswa yang hendak ujian sekolah (SD)		
		Backbone Dapodik	Data Internal		
15	Dinas PSDA	PAI (Pengelolaan Aset Irigasi)	Untuk pengelolaan aset dan perencanaan bidang irigasi	Tidak	Ada
		Aplikasi Weather Underground	Pemantauan cuaca dengan stasiun cuaca yang diletakkan di beberapa wilayah		
		Web GIS RISDA	Untuk pemetaan irigasi, saluran pembuang, sumur bor		
16	Bidang Umum	eLetter	Untuk pengelolaan surat masuk dan pengkategorian jenis agenda surat	Ada	Ada
17	Bagian Kesra	reksobahu.cilacapkab.go.id			
18	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)	E-Simpeg	Manajemen data kepegawaian		
		E-Presensi	Pengelolaan data presensi	Dikelola Dinas Kominfo	Ada
		E-Kinerja		Dikelola Dinas Kominfo	Ada
		E-Fle		Dikelola Dinas Kominfo	Ada
		E-Personal	Data PNS Se-Kabupaten Cilacap	Dikelola Dinas Kominfo	Ada
19	Bagian Humas dan Protokol	Portal web humas.cilacapkab.go.id	Publikasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah	Tidak ada	Tidak ada
20	Bagian Keuangan dan Aset Setda	SIMDA Keuangan	Kelancaran SPJ	SSL	Ada
		SIMDA BMD	Pengelolaan Aset		
		Sistem Persediaan (Inventory)	Menunjang Kelancaran SPJ		
21	Bagian Hukum Setda Cilacap	JDIH --> jdih.cilacapkab.go.id: Jaringan Dokumentasi &	Aplikasi untuk Publikasi Produk Hukum		Tidak ada

APLIKASI PENDUKUNG KPI (CORE BUSSINESS APPS)

No	Unit/ Dinas/ Badan	Aplikasi	Uraian Pemanfaatan	Dukungan Keamanan	Dukungan Dokumentasi
		Informasi Hukum)			
22	Inspektorat	Tidak ada			
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIDESA	Sistem Informasi Desa. Digunakan untuk setiap Desa		
		Siskeudes	Untuk perencanaan, proses, dan pelaporan		
		Prodeskel	Profil desa dan kelurahan.		
		Sipede	Monitoring dana desa + peruntukannya		
		Omspan	Syarat untuk pencairan dana		
		Sistem Informasi Kredit Program	Memonitor subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat		
24	Bagian Perekonomian Setda Cilacap				
25	Kecamatan Cilacap Selatan	SIMDA (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)	sistem ini berjalan untuk mengelola keuangan, untuk pelaporan keuangan, pendapatan daerah dari IMB di kecamatan, dan pengeluaran. Dan untuk penggajian pegawai.		
		SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan)	untuk pendataan, pendaftaran dan pengelolaan kependudukan. Kecamatan sebagai jembatan dan validasi untuk pembuatan KTP, proses pembuatan KTP ada di Disdukcapil, untuk Kartu Keluarga proses pembuatan ada pada kecamatan masing-masing.		
		ESAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)	sistem ini berjalan untuk budgeting dan perencanaan yang berada di kecamatan.		
26	RSUD Cilacap	Pilar SIMRS		tidak ada	tidak ada
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	SIJEMPOL	untuk pelayanan perizinan non oss	ssl(security service layer)	tidak ada
		OSS	untuk pelayanan perizinan perusahaan sesuai pp 24/2008		

No	Unit/ Dinas/ Badan	APLIKASI PENDUKUNG KPI (CORE BUSSINESS APPS)			
		Aplikasi	Uraian Pemanfaatan	Dukungan Keamanan	Dukungan Dokumentasi
28	Dinas Pertanian	SIPJAKI	untuk informasi LUJK secara nasional		
		Perjalanan dinas	perjalanan dinas	tidak ada	tidak ada
29	Dinas Perikanan	KUSUKA (kartu pelaku usulan perikanan)	untuk pendataan, pinjaman dan identitas pelaku	tidak ada	tidak ada
		one data	pendaftaran anggota		
		e service	pendataan kapal		
		OSS	perijinan kapal		
		pangan.cilacap.go.id	sistem informasi harga pangan	tidak ada	tidak ada
30	Dinas Pangan dan Perkebunan	sehati	sistem informasi hasil perkebunan yang mengisi data dari penyuluh tiap kecamatan		
		simpus	rawat inap, rawat jalan, gis penyakit	belum ada	belum ada
		sp2tp	gizi buruk		
		simo	obat		
		simka	kepegawaian		
		bank data	data dari semua pasien		
32	Sekretariat DPRD	tidak ada			
33	Dinas Sosial	siks.mensos.go.id	pendataan keluarga miskin	tidak ada	
		epkh.kemensos.go id	keluarga harapan		
34	RSUD Majenang	Simas	sistem informasi rumah sakit	ada dalam sistem	ada
		registrasi online	pendaftaran online		
		farmasi	untuk obat		
		e-claim			
35	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)	sim keuangan daerah	untuk pengaturan keuangan, inventaris, pengadaan barang jasa	tidak ada	ada
		sirup	untuk rencana pengadaan barang jasa		
		simda	untuk BPPKAD		
		ssp pajak	untuk pajak daerah		
36	Kecamatan Dayeuhluhur	sisukma		tidak ada	tidak ada
		siak			
		paten			
		simpeg			
		lapor.go.id			
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	SIMBAJA	untuk jembatan dan jalan		ada
		SIPECI	untuk penyusunan RKPPD		

No	Unit/ Dinas/ Badan	APLIKASI PENDUKUNG KPI (CORE BUSSINESS APPS)			
		Aplikasi	Uraian Pemanfaatan	Dukungan Keamanan	Dukungan Dokumentasi
38	Daerah (BAPPEDA Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)	E-litbang			
		simda keuangan	digunakan untuk apbd sampai laporan keuangan	tidak ada	ada
		simda barang daerah	aset barang milik daerah		
		Sismiop	untuk pajak bumi dan bangunan		
		Simgaji	untuk penggajian pegawai		
39	Bag Organisasi Setda	Esakip	implementasi kinerja pegawai pemerintah	tidak ada	ada
		Eanjab	untuk analisis jabatan		
		Sisukma	survey kepuasan masyarakat		
40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Inlislite	untuk sirkulasi buku yang ada di perpustakaan		
		Epusda	ebook		
		kunang-kunang	untuk manajemen internet di perpustakaan		
		SKID	untuk surat menyurat dan pengarsipan		
41	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (DISNAKERIN)	Ayokitakerja	untuk penempatan dan pelatihan		
		sisko tkln	pendataan tki		
		Disnakerin	pencari job ke perusahaan di sampaikan melalui web		
42	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)	Administrasi Surat	memakai akses		
		email pemkab		ssl	ada
		e-planing			
		e-budgeting			
		e-spj			
		Sisukma			
		Simpokapbd			

4.1.3 Kondisi Dukungan Keamanan Data dan Aplikasi

Selain parameter ketersediaan aplikasi yang mendukung core bussiness pada setiap Perangkat Daerah, dukungan keamanan juga menjadi salah satu parameter kondisi kesiapan smart city. Aplikasi yang terhubung ke jaringan eksternal yang dapat diakses dari luar Perangkat Daerah, jika tidak terdapat keamanan pada jaringan tersebut, maka data-data yang terdapat di dalam server akan sangat rentan diakses atau diambil oleh pihak-pihak yang semestinya tidak diperkenankan.

Dari hasil survey pada 42 Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Cilacap, sebagian besar Perangkat Daerah belum mengetahui apa dan bagaimana tingkat keamanan pada aplikasi/perangkat lunak yang digunakan. Bahkan ada beberapa temuan mengenai keberadaan penyimpanan data yang terjadi pada beberapa Perangkat Daerah, seperti Sekretariat Daerah Bagian Organisasi. Data-data pada Perangkat Daerah tersebut berada pada pihak ketiga sebagai

pengembang perangkat lunak. Hal tersebut dapat menyebabkan masalah baru terkait dengan kerahasiaan dan keamanan data.

Kasus lainnya yaitu pada Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan. Pada Perangkat Daerah tersebut, data-data buku elektronik (*E-Book*) tidak dimiliki sendiri pada server utamanya, namun berada di pihak ketiga sebagai jasa penyewa yang harus dibayar tahunan oleh Perangkat Daerah terkait. Dalam kontrak sebelumnya mengatakan bahwa ada pembelian buku elektronik oleh pihak ketiga akan tetapi dari Perangkat Daerah Arsip dan Perpustakaan mendapatkan alamat website dari toko buku tersebut dan tidak ada bukti file dari buku elektronik yang sesuai dengan perjanjian yang ada.

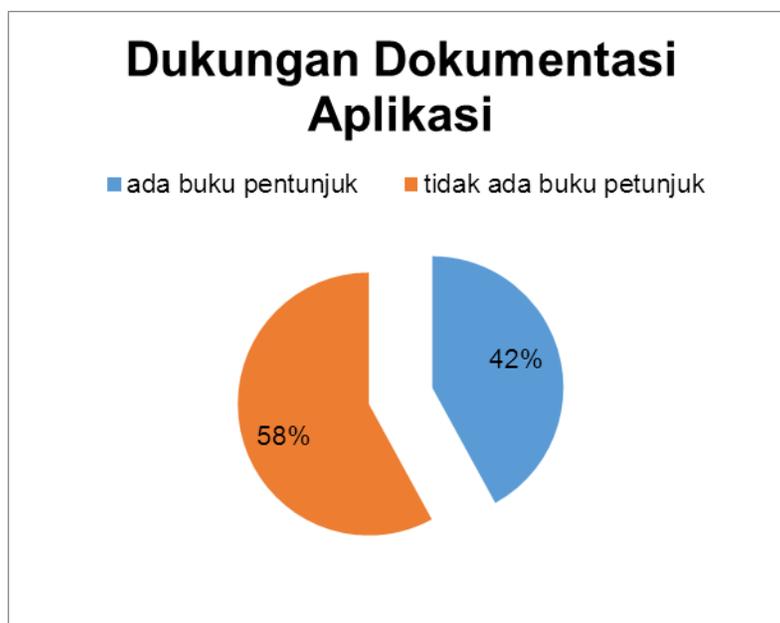
Untuk Perangkat Daerah -Perangkat Daerah yang ada di kabupaten cilacap ada yang sudah memikirkan pengarsipan dan sirkulasi surat-menyurat. Diharapkan dari beberapa Perangkat Daerah tersebut bisa sama satu sama lain dan sudah sehingga pengarsipan dan sirkulasi surat yang ada bisa terpantau dengan rapi dan memudahkan pencarian. Seperti pada Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian memakai aplikasi manual untuk pengarsipan dan surat-menyurat dan juga pada Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan sudah dikembangkan aplikasi surat-menyurat tapi belum selesai dikerjakan pada pihak ketiga, untuk memudahkan surat-menyurat yang ada pada Perangkat Daerah ini.

Untuk keamanan pada Perangkat Daerah dinas kesehatan server yang ada masih bercampur dengan ruang kerja, hal ini sangat dianjurkan mengingat data yang ada sangatlah penting termasuk data-data pasien yang ada di Kabupaten Cilacap, jika ada orang yang berniat jahat tidak begitu susah untuk memutus jaringan ataupun merusak server yang ada. Begitu juga pada BPPKAD server yang digunakan masih digunakan untuk kegiatan ibadah, kondisi seperti ini sangat menghawatirkan terhadap data yang ada.

4.1.4 Kondisi Dukungan Dokumentasi Aplikasi

Dokumentasi pada pengembangan aplikasi perangkat lunak memiliki peran dalam menggambarkan operasi fungsionalitas dari setiap komponen pada perangkat lunak. Dokumentasi aplikasi bertindak sebagai media komunikasi untuk pengembang perangkat lunak, penyimpanan informasi untuk keperluan *maintenance*, bahkan dapat memberi penjelasan kepada pengguna tentang bagaimana cara menggunakan dan mengelola data pada sistem yang ada.

Minimnya ketersediaan dokumentasi aplikasi pada aplikasi yang dimiliki Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Cilacap, menjadi temuan dari hasil survey. Dari 42 Perangkat Daerah yang disurvei, sebagian besar aplikasi dibangun dengan melewati fase dokumentasi. Akibatnya, ketika ada penambahan fitur pada sebuah aplikasi, akan selalu bergantung pada pihak ketiga/pengembang yang sama yang mengembangkan aplikasi tersebut. Dari beberapa Perangkat Daerah jika ada permasalahan dari Aplikasi yang ada masih ketergantungan dari pihak ketiga yang membuat aplikasi tersebut. Seharusnya pihak Perangkat Daerah yang bersangkutan minimal memiliki bagian yang menguasai jika ada permasalahan dari aplikasi yang ada sehingga tidak ketergantungan dari pihak ketiga yang membuat aplikasi.



Gambar 0.2 Kondisi Dukungan Dokumentasi Aplikasi

Untuk buku panduan aplikasi tidak semua memiliki sehingga jika ada kesalahan harus bertanya ke tempat lain yang menggunakan aplikasi yang sama, sebenarnya buku panduan sudah diberikan sejak pelatihan tapi tidak terdokumentasi dengan baik di masing-masing Perangkat Daerah .

4.1.5 Aplikasi yang Direncanakan

Berdasarkan hasil survey, ternyata aplikasi yang telah dimiliki belum menunjang semua kegiatan pada seluruh bidang di masing-masing Perangkat Daerah . Beberapa kegiatan bahkan tidak memiliki aplikasi sehingga masih dilaksanakan secara manual. Hal tersebut akhirnya membuat setiap Perangkat Daerah memiliki keinginan untuk menambah aplikasi penunjang kegiatan lainnya yang belum didukung oleh Teknologi Informasi.

Beberapa aplikasi sudah berada di dalam tahap pengerjaan, namun sebagian besar masih berupa keinginan. Daftar aplikasi yang diharapkan dimiliki oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 0.2 Aplikasi yang Direncanakan

	Unit/Dinas/Badan	Nama Aplikasi	Pengembang	Catatan	Manfaat
1	DPKUKM	Adanya sistem yang terintegrasi antara SP2KP, SIHATI. Karena pelaporan yang diupload adalah sama.	-	Tahap keinginan	-
		Sistem Informasi Online bagi Masyarakat untuk Pencarian Ketersediaan UKM di Kabupaten Cilacap	-	Tahap keinginan	-
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	WebGIS Jalan Kabupaten	Dinas PUPR Cilacap	Tahap Proses	Informasi jalan kabupaten, jembatan, drainase
		Pengembangan SIJAKAKANCIL	Dinas PUPR Cilacap	Tahap Proses	Menambahkan fitur pengaduan dari masyarakat

	Unit/Dinas/Badan	Nama Aplikasi	Pengembang	Catatan	Manfaat
		Sistem pengajuan online permohonan ITR (Informasi Tata Ruang)		Tahap Keinginan	Pengajuan online bagi pihak yang membutuhkan ITR
		WebGIS Tata Ruang		Tahap Keinginan	Informasi tata ruang untuk masyarakat
3	Dinas Perhubungan	E-Lantas	-	Tahap Keinginan	Decision Support System untuk Pengaturan traffic light secara otomatis berdasarkan kepadatan sisi jalan (harus ada tambahan CCTV)
		Command Center		Tahap Keinginan	Untuk integrasi dengan SKPD lain
		E-Surat		Tahap Keinginan	
4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Sistem Informasi Sarana dan Prasarana		Tahap keinginan	Untuk pemantauan kondisi sarana dan prasarana
		Database DISPORAPAR		Tahap keinginan	Untuk pencarian informasi dalam bidang pemuda, olahraga dan pariwisata
		Aplikasi pelaporan pemilik usaha bidang pariwisata		Tahap keinginan	Untuk pelaporan rutin dari pemilik usaha
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Antrian Online	Disdukcapil Kabupaten Cilacap	Dalam Proses	Untuk memudahkan masyarakat yang berdomisili jauh untuk dapat dilayani urusan adminduknya
6	Dinas Lingkungan Hidup	SIPROKLIM KANCIL	Kominfo		Setiap Kampung mengisi data mengenai kelengkapan dalam lingkungan hidup
		Aplikasi penilaian untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkungan hidup		Tahap Keinginan	

	Unit/Dinas/Badan	Nama Aplikasi	Pengembang	Catatan	Manfaat
		Sistem Tracking untuk Monitoring Truk Sampah		Tahap Keinginan	
		Aplikasi penentuan rute optimal untuk Truk Sampah		Tahap Keinginan	
7	Satpol PP	Sistem Pengaduan Ketentraman Masyarakat		Tahap Keinginan	
		E-Arsip		Tahap Keinginan	
		E-Surat		Tahap Keinginan	
		Call Center Kebakaran			
8	Dinas KB PP PA	E-Surat		Tahap Keinginan	
		E-Arsip			
		Aplikasi Pelaporan KDRT Terintegrasi			
		Aplikasi Informasi Tingkat Kerawanan KDRT			
9	Bagian Pemerintahan & Otda	Aplikasi untuk Manajemen Kerjasama dengan Pihak Manapun		Tahap Keinginan	
10	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Tidak ada			
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Monitoring Peralatan		Tahap Keinginan	Untuk memonitor kondisi peralatan pendeteksi bencana dan peringatan dini
		Command Center Bencana			Untuk memonitor kondisi area Cilacap (menampilkan seluruh software kebencanaan)
		Aplikasi Pengaduan dari Masyarakat			Untuk mendapatkan informasi keadaan daerah dari masyarakat
12	Kesatuan Bangsa dan Politik	eSITWIL	KOMINFO	Dalam Proses	untuk melaporkan perkembangan situasi keamanan dan kenyamanan lingkungan di

Unit/Dinas/Badan	Nama Aplikasi	Pengembang	Catatan	Manfaat	
				wilayah Kabupaten Cilacap	
	Aplikasi Penyimpanan Data untuk Penelitian		Tahap Keinginan	untuk menyimpan data yang berhubungan dengan perijinan pelaksanaan penelitian di wilayah Kabupaten Cilacap	
	Pengajuan Online untuk Penelitian			untuk masyarakat dapat melaksanakan pengajuan perijinan penelitian secara online	
13	Bagian Administrasi Pembangunan	Tidak ada			
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah	CV. Art Technology	Dalam tahap sosialisasi	Untuk pelaporan dana BOS
15	Dinas PSDA	Pengembangan RISDA		Masih dalam Proses	Untuk mengetahui kondisi dari saluran yang ada baik irigasi maupun pembuangan dan sumur bor di kabupaten cilacap
		Pelaporan Online Petugas Lapangan		Tahap Keinginan	
		PAI Online berbasis web		Tahap Keinginan	
16	Bidang Umum	eSuker		Tahap Keinginan	Pelayanan nomor surat keluar, melihat nomor surat yang tersedia
		Pengajuan Operasional Online		Tahap Keinginan	Pengajuan operasional (perjalanan dinas, jamuan makan, dsb) secara online
		Penambahan fitur eSurat		Tahap Keinginan	Pelacakan surat dinas, penambahan user
17	Bagian Kesra	E-Hibah			

	Unit/Dinas/Badan	Nama Aplikasi	Pengembang	Catatan	Manfaat
18	BKPPD	Upgrade dan Update SIMPEG		Tahap Keinginan	Penambahan teknologi Bootstrap agar dapat dibuka di mobile phone
					Adanya update alur cuti. Sesuaikan dengan proses bisnis saat ini.
		e-Jabatan		Tahap Keinginan	Jabatan fungsional dan struktural masih ada yang harus ditambah
					Penambahan fitur pemberhentian, pengangkatan kembali dalam jabatan
			Rekomendasi untuk kenaikan jabatan, terintegrasi dengan pengecekan di e-File		
19	Bagian Humas dan Protokol	E-Arsip Dokumen Digital			Sarana pengarsipan dokumen digital dan memudahkan pencarian dokumen
20	Bagian Keuangan dan Aset Setda	SPJ se Setda		Direalisasikan pada Tahun 2020	
21	Bagian Hukum Setda Cilacap	SIMPROKUM	Kominfo	Interface sudah, masih dalam tahap requirement + desain	Mempercepat proses penyusunan produk hukum daerah dan monitoring pengajuan produk hukum
		Aplikasi Pustaka dan Pencarian Produk Hukum		Urgent	Digitalisasi pustaka produk-produk hukum agar dapat diakses oleh Masyarakat secara langsung
22	Inspektorat	SIMWASDA (Sistem Informasi Pengawasan Daerah)	Pihak ketiga	Masih dalam tahap user requirement	Meningkatkan arus pelayanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pengawasan
		E-Surat untuk Internal		Tahap keinginan	

Unit/Dinas/Badan	Nama Aplikasi	Pengembang	Catatan	Manfaat	
			Urgent		
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sistem Pelayanan Online bagi Masyarakat Desa		Tahap keinginan	Aplikasi untuk pelayanan online surat pengantar, permohonan (Administrasi Kependudukan)
24	Bagian Perekonomian Setda Cilacap	Aplikasi untuk koordinasi dengan Dinas terkait dengan Bagian Perekonomian untuk membantu perumusan bahan kebijakan		Tahap keinginan	
25	Kecamatan Cilacap Selatan	Aplikasi pencatatan registrasi			untuk pencatatan registrasi yang ada di kecamatan.
26	RSUD Cilacap	Rekamedis elektronik	Pilar Cilacap		paperles dan elektronik claim bpjs
		Rekamedis elektronik			
		LIS E-renumerasi			
27	DPMPTSP	SIMPATIC	KOMBAS		informasi untuk investasi di kabupaten cilacap
28	Dinas Pertanian	big data pertanian			untuk menerahui komunitas/lahan data sudah ada
29	Dinas Perikanan	statistik perikanan		data sudah ada	untuk pendataan budidaya, tangkapan dan hasil olahan
30	Dinas Pangan dan Perkebunan	aplikasi perkebunan (luas lahan, tanam, komunitas)	belum ada		mengetahui komunitas, luas lahan dan luas tanam
		aplikasi komoditas	pihak ketiga	perlu pemeliharaan	untuk mengetahui komoditas tiap daerah
31	Dinas Kesehatan	antrian online	dinkes	antrian pasien	tidak ada

	Unit/Dinas/Badan	Nama Aplikasi	Pengembang	Catatan	Manfaat
		PSC	dinkes	kegawat darurat	
		spdgt	dinkes dan kemenkes	rujukan	
32	Sekretariat DPRD	aspirasi digital		aspirasi dari masyarakat secara online	tidak ada
33	Dinas Sosial	pmks		penyandang masalah kegiatan sosial	tidak ada
		laporan masyarakat langsung			
34	RSUD MAJENANG	sistem keuangan		untuk memantau keuangan	belum ada
		sim aset		untuk memanataui aset	
35	DISPERKIMTA	aplikasi spj		untuk spj yang ada di internal Perangkat Daerah	belum ada
		aplikasi rusunawa, pemakanan, sedot wc			
		penerangan jalan umum			
		pelayanan penebangan pohon/ ratas			
		pengarsipan/surat menyurat			
		aplikasi jalan			
36	Kec Dayeuhluhur	TNDE			belum ada
37	BAPPELITBANGDA	eplaning			untuk planing, budgeting dan lain2
		usulan masyarakat			usulan masyarakat melalui web
38	BPPKAD	Tidak ada			
39	BAG ORGANISASI SETDA	esakip	kominfo	ingin perubahan pengelola	
		eanjab	kominfo		
40	ARPUS	aplikasi arsip	belum ada		
41	DISNAKERIN	surat online			arsip surat dan disposisi
		cctv			
		pabx			komunikasi antar pegawai
		aplikasi bendahara			untuk pelaporan lpj internal
42	DISKOMINFO	TNDE	INHOUSE		naskah dinas elektronik
		SUPERJON	INHOUSE		spj online

Unit/Dinas/Badan	Nama Aplikasi	Pengembang	Catatan	Manfaat
	GPS Traker	INHOUSE		pergerakan truk sampah
	E-SAKIP	INHOUSE		monev kegiatan
	SIDEWAS	INHOUSE		anggaran

Dari tabel keinginan Perangkat Daerah dalam memiliki tambahan aplikasi penunjang yang dapat meringankan beban kerja mereka, secara garis besar dapat digambarkan dalam bentuk diagram *Mind Map*, yang dapat dilihat pada gambar 4.3 dimana dari penggambaran *mind map* tersebut, dapat terlihat beberapa kali kemunculan untuk aplikasi yang hampir serupa atau mirip. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah total keinginan aplikasi tidak sebanyak yang tergambarkan di *Mind Map*.

4.2 Kondisi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Infrastruktur informasi elektronik pemerintah merupakan gabungan perangkat keras dan lunak yang membentuk fasilitas dasar (*platform*) untuk kegiatan layanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.

Komponen utama yang harus tersedia dari suatu infrastruktur informasi elektronik yang diperlukan adalah 1. Jalur fisik informasi; 2. Jaringan intra pemerintah yang diamankan (*Government Secured Intranet-GSI*); 3. Pusat Manajemen Data Pemerintah (*Government Data Management Centre-GDMC*); 4. Aplikasi-aplikasi dasar untuk mendukung kegiatan *front-office* dan *back-office*; 5. Jaringan informasi global (internet). Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membangun jaringan fisik informasi adalah sebagai berikut:

1. Analisis terhadap tahapan dari Smart City yang akan dibangun.
2. Menetapkan jenis jaringan informasi yang dibutuhkan.
3. Menetapkan jaringan informasi yang perlu dibangun.

Sedangkan langkah guna menetapkan spesifikasi teknis dari seluruh perangkat yang dibutuhkan, meliputi:

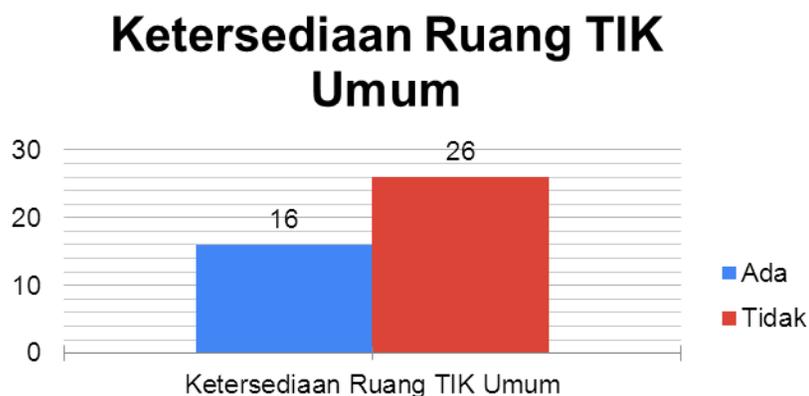
1. Penentuan koneksi internal dan eksternal yang akan dipergunakan.
2. Pemetaan lembaga pemerintah yang terkait dengan kegiatan layanan.
3. Penentuan kebutuhan *bandwidth* sesuai dengan jenis layanan.

4.2.1 Ketersediaan Jalur Fisik Informasi

Jalur fisik informasi yang diperlukan bukan hanya jalur jaringan namun kebutuhan fisik pendukung, seperti server, *storage*, dan ruang TIK. Pendukung-pendukung ini akan dapat membuat suatu aplikasi berjalan dengan lebih sempurna, serta dapat meminimalisir berbagai kesalahan atau tenaga yang diperlukan. Ketersediaan fisik terdiri atas ketersediaan perangkat server, perangkat penyimpanan, ruang server dan ruang TIK itu sendiri.

4.2.1.1 Ketersediaan Ruang TIK dan Manajemen Pemanfaatannya

Ruang TIK merupakan kebutuhan dalam mengelola berbagai aplikasi yang dimiliki, ataupun untuk mengelola server yang dimiliki. Beberapa Perangkat Daerah memiliki ruang khusus TIK, walau tidak memiliki server dan sebaliknya. Keberadaan ruang TIK dianggap penting demi mengawasi kondisi jaringan local dan lalu lalang data. Dari hasil survey, sebanyak 16 Perangkat Daerah di kabupaten Cilacap telah memiliki ruang TIK, sementara sisanya belum. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.4.



Gambar 0.4 Kondisi Ketersediaan Ruang TIK Umum

Beberapa Perangkat Daerah yang memiliki ruang khusus TIK juga tidak seluruhnya memiliki fasilitas yang memadai, yang seharusnya dimiliki oleh ruang khusus TIK atau ruang server. Fasilitas yang seharusnya ada, seperti AC, alarm dan sistem keamanan serta ruang data khusus untuk server. Dari hasil survei

diketahui bahwa sebagian besar Perangkat Daerah memiliki AC di ruang khusus TIK, namun belum memiliki system keamanan khusus. Begitu pula dengan manajemen pemanfaatan. Dari hasil survey yang dapat dilihat pada gambar 4.5, terlihat bahwa 90% lebih Perangkat Daerah telah memiliki manajemen pemanfaatan ruang TIK.



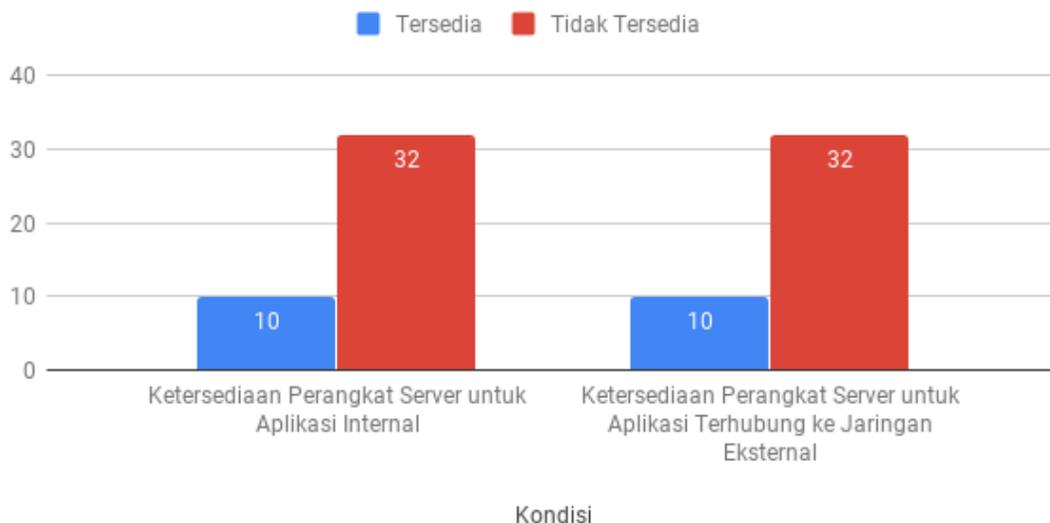
Gambar 0.5 Kondisi Manajemen Pemanfaatan Ruang TIK

4.2.1.2 Ketersediaan Perangkat Server Internal dan External

Dari 42 Perangkat Daerah yang disurvei, tidak banyak yang memiliki server yang terhubung dengan jaringan internal maupun eksternal. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.6, dari hasil rekap survei terlihat bahwa terdapat 10 Perangkat Daerah yang sudah memiliki server yang terhubung dengan jaringan internal, 10 Perangkat Daerah memiliki server yang terhubung ke jaringan eksternal dan sisanya masih belum memiliki.

Beberapa Perangkat Daerah menggunakan server yang dikelola oleh Kominfo, beberapa lainnya, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan server yang disediakan oleh pemerintah pusat atau provinsi, dimana server tersebut dikelola oleh dinas dengan pedoman dan arahan pemerintah pusat atau provinsi. Perangkat Daerah yang memiliki server yang terhubung ke jaringan eksternal merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ketersediaan Perangkat Server yang Terhubung dengan Jaringan Internal dan Eksternal



Gambar 0.6 Kondisi Ketersediaan Server Kab. Cilacap

Sama halnya dengan ketersediaan *server*, tidak semua Perangkat Daerah memiliki media penyimpanan data. Terutama untuk penyimpanan data-data yang dapat diakses oleh *server*. Walaupun suatu Perangkat Daerah memiliki *server*, namun tidak dilengkapi dengan media penyimpanan data. Umumnya yang digunakan adalah media seperti *flashdik* atau *hardisk external*. Alasan yang dikemukakan pada umumnya adalah tidak dapat atau kesulitan dalam mengakses *server*, hingga *space* untuk penyimpanan pada *server* yang kurang mencukupi. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.7, hanya 11 Perangkat Daerah yang memiliki media penyimpanan utama (*main storage*) dan dari 11 tersebut, hanya 6 Perangkat Daerah yang memiliki media penyimpanan cadangan (*secondary storage*). Kondisi yang demikian dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai data yang hilang atau terhapus atau terselip.

Ketersediaan Main dan Secondary Storage sebagai Media Penyimpanan Data



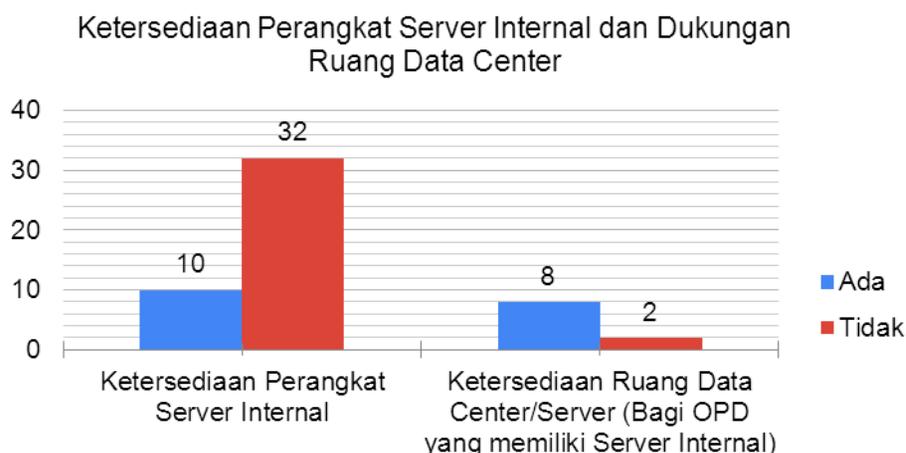
Gambar 0.7 Kondisi Ketersediaan Perangkat Main Storage dan Secondary Storage

4.2.1.3 Ketersediaan Daya Dukung Ruangan Data Center

Selain ruang TIK, ruang server merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan dalam menjalankan proses TIK. Ruang server berperan dalam menjaga kualitas dari server yang digunakan. Dikarenakan kondisi server yang harus menyala 24 jam, maka diharapkan server diletakkan di ruangan khusus

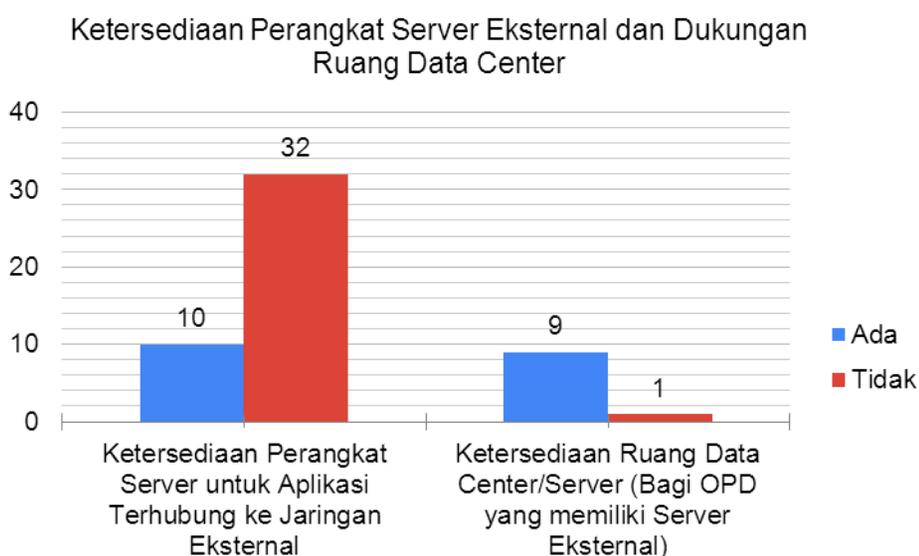
dengan kondisi yang disesuaikan, dengan dukungan manajemen ruang dan system keamanan serta kelistrikan.

Pada kabupaten Cilacap, kondisi ketersediaan ruang server untuk server internal, dapat dilihat pada gambar 4.8, dimana dari 10 Perangkat Daerah yang memiliki server internal, terdapat 8 Perangkat Daerah yang memiliki ruang khusus untuk menempatkan server, dan 2 Perangkat Daerah menyimpan server di ruang kantor biasa. Perangkat server internal merupakan perangkat server yang digunakan dalam mengatur jaringan internal. Sehingga keamanan jaringan dan data, walau tidak serawan jaringan eksternal, masih tetap penting.



Gambar 0.8 Perbandingan Ketersediaan Perangkat Server Internal dengan Dukungan Ruang Data Center

Berbeda dengan server internal yang hanya dapat diakses di dalam Perangkat Daerah, server eksternal dapat diakses dari luar Perangkat Daerah, sehingga kondisi jaringan dan data yang tersimpan lebih rawan dalam hal keamanan. Server ini memerlukan dukungan system keamanan dan ruang yang kuat. Akan tetapi, dari 10 Perangkat Daerah dengan server eksternal hanya 9 yang memilikinya. Kondisi ini, walau dapat dikatakan cukup baik, namun masih kurang.



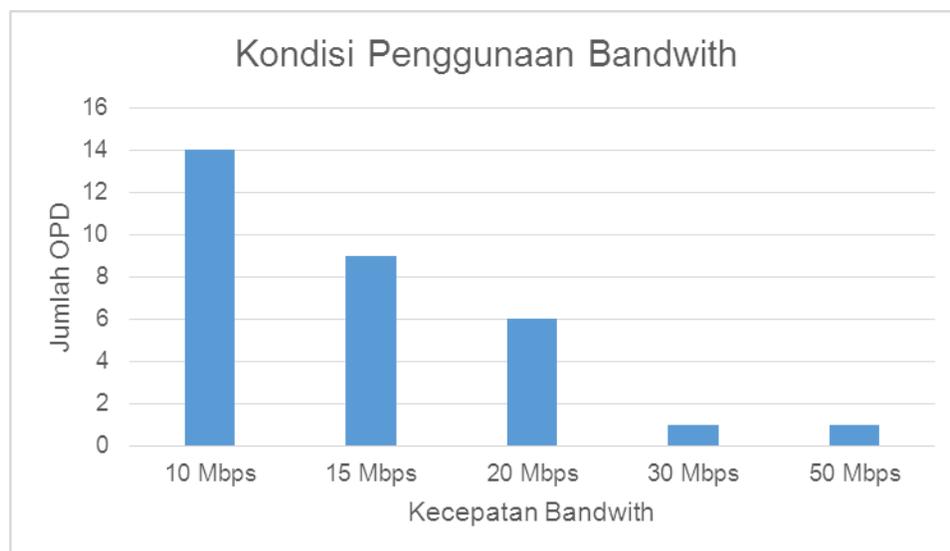
Gambar 0.9 Perbandingan Ketersediaan Perangkat Server External dengan Dukungan Ruang Data Center

4.2.2 Ketersediaan Jaringan sebagai Infrastruktur Informasi Elektronik

Penggunaan internet mempengaruhi proses bisnis di Organisasi Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah) tersebut dalam hal integrasi data dan

informasi, dimana pertukaran data dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Akan tetapi jaringan internet tersebut secara umum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap masih menggunakan kapasitas dan pengaturan yang belum maksimum sehingga penggunaan internet masih kurang memberikan kontribusi dalam aktifitas kerja di setiap Perangkat Daerah.

Kondisi dari konektivitas jaringan internet di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap pada kondisi cukup tinggi. Ini terbukti hasil survei bahwa secara umum setiap Organisasi Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang telah mempergunakan jaringan wireless sebagai media penyebaran konektivitas. Ini juga akan mempengaruhi proses bisnis di Organisasi Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah tersebut dalam fleksibilitas penggunaan jaringan. Jaringan komputer di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap berada pada kondisi memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei, yang ditunjukkan pada Gambar 4.10, bahwa secara umum setiap Organisasi Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah) telah memiliki jaringan Internet, walau tidak semuanya memiliki jaringan internal atau intranet.



Gambar 0.10 Kondisi Penggunaan Bandwith Kabupaten Cilacap

Sangat disadari bahwa jaringan komunikasi masih merupakan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, yang disebabkan antara lain:

1. Keberadaan jaringan cenderung berada di pusat kota.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap belum sepenuhnya memanfaatkan infrastruktur jaringan komunikasi untuk mendukung kegiatan layanan publik.
3. Masih kurangnya kuota kecepatan *bandwith* untuk beberapa Perangkat Daerah yang membutuhkan akses cepat ke luar, dan akses utama.

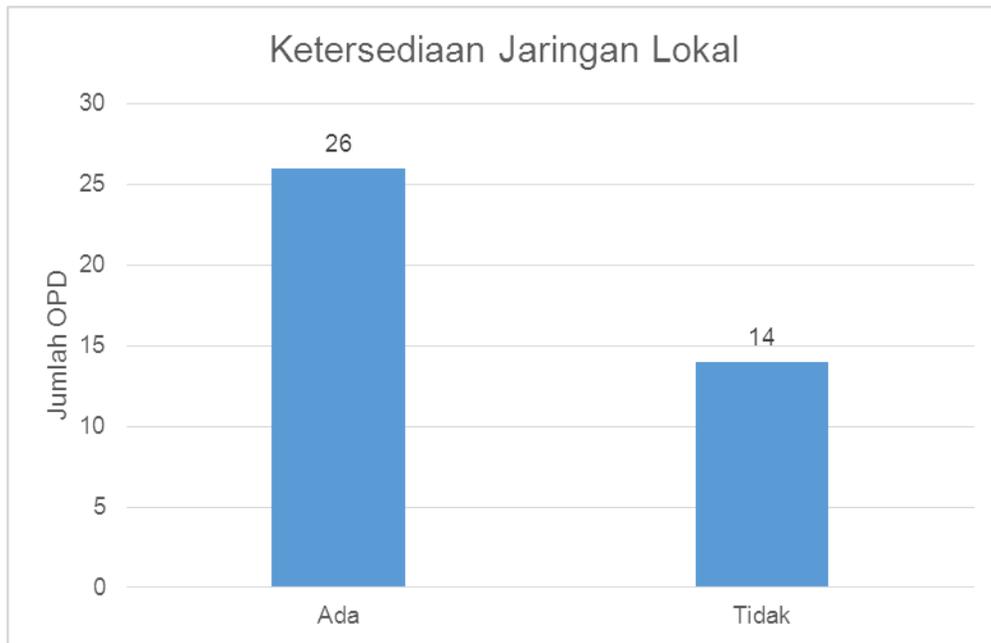
Beberapa jaringan komunikasi yang diharapkan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap terdiri atas:

1. Jaringan Lokal (LAN)

Jaringan Lokal (*Local Area Network* - LAN) merupakan jaringan komputer yang saling terhubung dalam satu gedung atau satu kompleks perkantoran yang berdekatan, yang digunakan untuk komunikasi data dalam suatu area kerja tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Peralatan minimum yang dibutuhkan untuk membangun LAN adalah server, workstation dan perangkat lunaknya, serta perangkat jaringan hub dan jalur komunikasi berupa kabel atau perangkat nirkabel. Jaringan lokal pada umumnya digunakan untuk keperluan e-mail, mengakses basis data serta pertukaran file, data dan informasi.

Kondisi jaringan lokal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.11, dimana dari 42 Perangkat Daerah

yang telah memiliki jaringan lokal sebanyak 26 Perangkat Daerah. Kondisi ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan untuk menunjang kerja.



Gambar 0.11 Kondisi Jaringan Lokal di Kabupaten Cilacap

2. Jaringan Metropolitan (MAN)

Jaringan Metropolitan (*Metropolitan Area Network* - MAN) Merupakan jaringan komputer dengan cakupan area lebih luas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Pada umumnya MAN mencakup area satu kota yang dapat berupa gabungan dari sejumlah LAN yang terpisah. MAN terhubung dengan jalur transmisi yang dinamakan *backbone*. Jaringan MAN ini akan mencakup area Kabupaten Cilacap baru yang dapat berupa gabungan dari sejumlah LAN Organisasi Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang terpisah. *Backbone* jaringan utama di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap masih belum terbentuk, sehingga jaringan antar Organisasi Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah) untuk pertukaran data masih melalui jaringan internet dan manual.

3. Jaringan Internet

Jaringan Internet merupakan jaringan yang terdiri dari sejumlah MAN di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, yang mencakup wilayah tanpa batas atau jaringan komputer yang mendunia. Perpaduan berbagai jenis komputer dan topologi serta jaringan yang saling terhubung satu sama lain atau kumpulan jaringan yang terkoneksi. Internet di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap digunakan sebagai sarana pertukaran data dan informasi tanpa dibatasi oleh jarak fisik, baik ke pemerintah pusat, pelaku bisnis atau masyarakat. Kondisi Jaringan internet di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sudah bersifat terpusat dengan Dinas Kominfo sebagai penanggungjawab jaringan. Setiap Perangkat Daerah mendapat kapasitas kecepatan 10 hingga 20 Mbps, seperti yang terlihat pada tabel 4.3.

Kualitas servis jaringan khususnya internet masih kurang dikarenakan semakin banyaknya pengguna di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Pengaturan jaringan yang tidak optimal mengakibatkan jaringan tidak stabil terhadap masing-masing pengguna. Tidak adanya pengaturan jaringan terutama dalam hal pembatasan pemakaian dan pembagian kuota mengakibatkan *bandwidth* yang diterima oleh masing-masing pengguna masih kurang, sehingga tingkat kepuasan pun menurun.

Tabel 0.3 Kondisi Sistem Jaringan di Kabupaten Cilacap

No	Unit/Dinas/Badan	Bandwith	Keterangan
1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM)	10 Mbps	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	10 Mbps	
3	Dinas Perhubungan	10 Mbps	
4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	10 Mbps	
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Mbps	
6	Dinas Lingkungan Hidup	10 Mbps	
7	Satpol PP	10 Mbps	
8	Dinas KB PP PA	15 Mbps	
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	15 Mbps	
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol)	10 Mbps	
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15 Mbps	
12	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)	15 Mbps	
13	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)	20 Mbps	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10 Mbps	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	15 Mbps	
16	Dinas Pertanian	10 Mbps	
17	Dinas Perikanan	20 Mbps	
18	Dinas Pangan dan Perkebunan	10 Mbps	
19	Dinas Kesehatan	15 Mbps	
20	Dinas Sosial	10 Mbps	
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)	10 Mbps	
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)	20 Mbps	
23	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)	20 Mbps	
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (ARPUS)	10 Mbps	
25	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (DISNAKERIN)	10 Mbps	
26	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)	15 Mbps	
27	Kecamatan Cilacap Selatan	7 Mbps	
28	Kecamatan Dayeuhluhur	7 Mbps	
29	RSUD Cilacap	30 Mbps	
30	RSUD Majenang	15 Mbps	
31	Sekretariat DPRD	20 Mbps	
32	Inspektorat	20 Mbps	
33	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	50 Mbps	Sekretariat Daerah
34	Bidang Umum		
35	Bagian Kesra		
36	Bagian Pemerintahan & Otda		
37	Bagian Humas dan Protokol		
38	Bagian Keuangan dan Aset		
39	Bagian Hukum		
40	Bagian Administrasi Pembangunan		
41	Bagian Perekonomian		
42	Bagian Organisasi		

4. Jaringan Nirkabel

Jaringan nirkabel dikembangkan salah satunya bagi masyarakat dan staf dalam melaksanakan untuk pelayanan pemerintahan daerah. Koneksi jaringan komputer dan internet berbasis jaringan nirkabel perlu diperluas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Sehingga 90% wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tercakup dalam area jaringan nirkabel yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Selain itu didukung juga dengan keberadaan area wireless yang disediakan oleh provider *broadband*. Hal ini mendukung harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menjadi pemerintahan yang *cyber city* di Jawa Tengah. Tingkat optimalisasi peluasan jaringan nirkabel pada setiap Perangkat Daerah dan kepastian jaringan nirkabel di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sebagai keharusan pada pelayanan jaringan ke *end user* / Masyarakat Kabupaten Cilacap.

4.2.3 Pusat Manajemen Data Pemerintahan

Kabupaten Cilacap belum memiliki Pusat Manajemen Data Pemerintah (*Government Data Management Center*). Kebutuhan akan data center Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap merupakan kebutuhan mendasar dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Pengelolaan GDMC tersebut hanya pada pengelolaan website dan aplikasi seluruh pemerintah Kabupaten Cilacap. Sebagai sebuah organisasi besar, dengan unit kerja dan proses bisnis yang sangat banyak, sudah menjadi keharusan bagi Kabupaten Cilacap untuk memiliki Pusat Data (*Data Center*) yang memenuhi standar.

4.3 Kondisi Kelembagaan / Organisasi TIK (Sumber Daya Manusia)

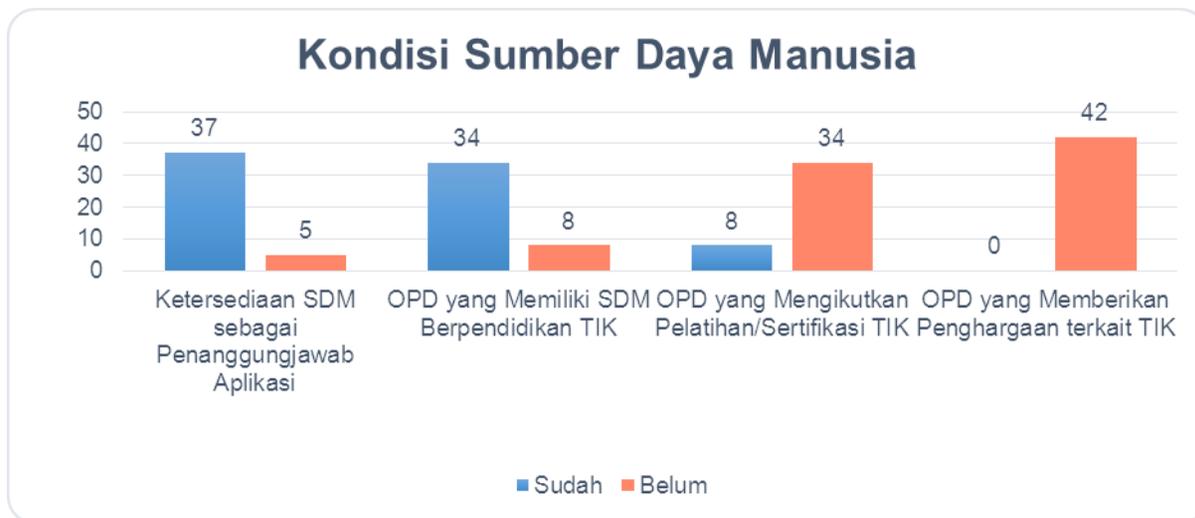
Langkah kunci dalam implementasi proyek SI/TI Pemerintahan Kabupaten Cilacap adalah program pendidikan dan pelatihan. Untuk menangani masalah pengembangan sumber daya manusia, diperlukan inisiatif *knowledge management* yang menitikberatkan pada pelatihan/training, seminar, dan workshop untuk para staf demi menghasilkan keahlian dasar dalam penanganan implementasi SI/TI. Setelah itu pimpinan harus membentuk sebuah tim / lembaga yang khusus dalam penanganan TIK di Pemkab Cilacap, agar fokus pada pengembangan TIK di ranah jasa pelayanan.

4.3.1 Sumber Daya Manusia TIK (Pranata Komputer)

Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer (Kepmenpan 66/KEP/M.PAN/2003). Selanjutnya pada peraturan yang sama pada pasal 4 dinyatakan bahwa tugas pokok pranata komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

Jelas bahwa definisi Pranata Komputer (Prakom) di sini ialah definisi fungsional. Dan jelas pula bahwa fungsi prakom ialah seperti tersebut di atas. Kalau disingkat (supaya gampang diingat), garis besar fungsi tersebut ialah fungsi operator, teknisi, pengembangan (rekayasa), analisa, dan perencanaan.

Berdasarkan hasil survei dan analisis terhadap kondisi SDM IT di Kabupaten Cilacap, yang dapat dilihat pada gambar 4.11, terdapat 34 Perangkat Daerah yang memiliki SDM IT, sedangkan sisanya tidak memiliki SDM yang berpendidikan IT. Hal ini perlu dipertimbangkan, mengingat bahwa diperlukan setidaknya satu SDM dengan pendidikan IT untuk tiap Perangkat Daerah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa para pranata computer ini tidak berlatar belakang pendidikan IT namun dapat menguasai berbagai aplikasi yang nantinya dibutuhkan. Peningkatan kemampuan ini dapat dipelajari dari berbagai pelatihan. Dari 42 Perangkat Daerah, 34 Perangkat Daerah telah mengikutkan pranata komputer mereka ke pelatihan ataupun sertifikasi untuk IT.



Gambar 0.12 Kondisi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap

Oleh karena itu langkah kunci dalam implementasi proyek SI/TI Kabupaten Cilacap adalah program pendidikan dan pelatihan. Untuk menangani masalah pengembangan sumber daya manusia, diperlukan inisiatif *knowledge management* yang menitikberatkan pada pelatihan/training, seminar, dan workshop untuk para staf demi menghasilkan keahlian dasar dalam penanganan implementasi SI/TI.

4.3.2 Permasalahan Pranata Komputer

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah direkap oleh tim konsultan, keadaan Pranata Komputer atau lembaga khusus yang menangani pengembangan dan perencanaan Teknologi Informasi & Komunikasi di wilayah Pemerintahan Kabupaten Cilacap telah terpusat, diatur atau dibina oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi & Informatika (Dinas Kominfo). Walaupun di wilayah Pemerintahan Kabupaten Cilacap ini, beberapa kegiatan TIK termasuk untuk perencanaan dan pengembangannya masih ditentukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Melihat keadaan ini tentu masih akan terlihat adanya ego sektoral di beberapa bidang, karena data yang diolah hanya dikonsumsi oleh Perangkat Daerah itu sendiri, sedangkan kenyataannya data yang diolah oleh Perangkat Daerah tertentu akan dibutuhkan juga oleh Perangkat Daerah lain, sehingga perlu adanya Data Interchange atau pertukaran data antar Perangkat Daerah mutlak harus dilakukan dalam kegiatan Pemerintahan Kabupaten Cilacap.

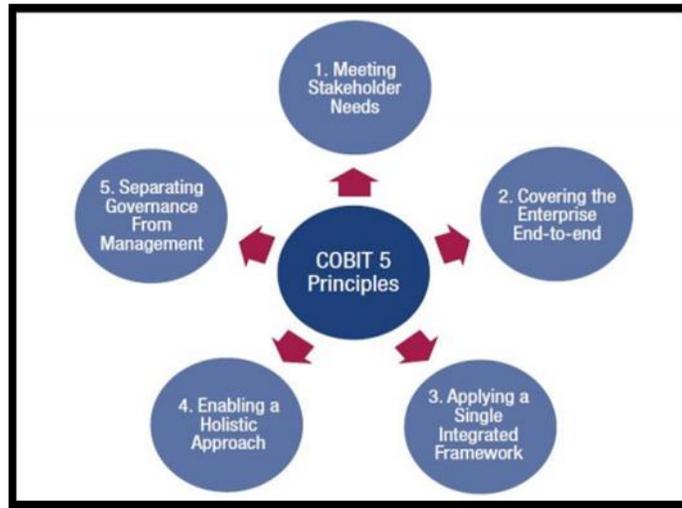
4.3.3 Keberadaan Unit Organisasi Bidang TIK

Berdasarkan hasil survei dan analisis terhadap kemampuan teknologi informasi dari sumber daya manusia (SDM) di seluruh Kabupaten Cilacap didapat gambaran bahwa kemampuan SDM di bidang *Information and Communication Technology* (ICT) sangat bervariasi, mulai yang rendah, menengah sampai yang mahir. Namun sebagian besar SDM hanya memiliki keahlian menggunakan *word processor* dan *excel* serta menggunakan *web*.

4.4 Evaluasi Cobit

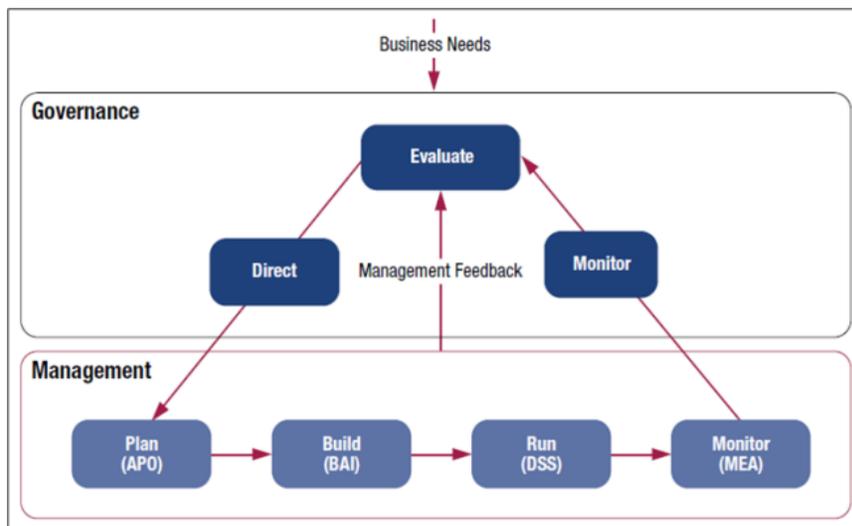
COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*) merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan yang mengarahkan pada Tata Kelola TI dan Manajemen IT yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna (user) untuk menjembatani pemisah antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis. COBIT dikembangkan oleh sebuah lembaga *Information Technology Governance Institute* (ITGI) yang merupakan bagian dari *System Information and Control Association* (ISACA).

Pada COBIT versi 5 terdapat 5 (lima) prinsip kunci tatakelola dan manajemen TI perusahaan, lima prinsip tersebut yaitu sebagai berikut :



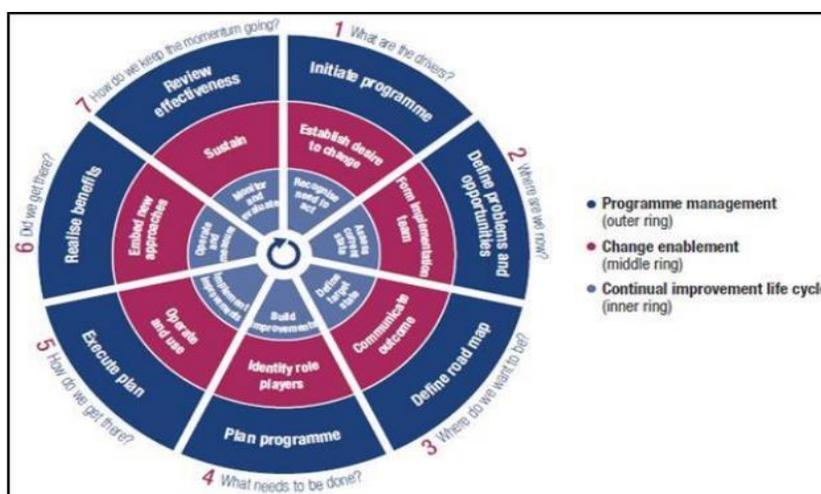
Gambar 0.13 Prinsip COBIT Versi 5

Kerangka kerja COBIT 5 membuat perbedaan yang jelas antara tata kelola dengan manajemen. Kedua disiplin ini memiliki perbedaan dalam hal aktivitas, kebutuhan struktur organisasi dan melayani tujuan yang berbeda.



Gambar 0.14 Kerangka Kerja COBIT 5

Menurut ISACA (2012) ada tujuh tahap yang terdapat dalam siklus hidup (life cycle) implementasi COBIT 5, yang dapat dilihat pada Gambar 4.15 yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :



Gambar 0.15 Tujuh Tahap Siklus Hidup COBIT 5

1. Tahap 1 Apa Penggerakanya ?

Tahap pertama mengidentifikasi penggerak perubahan saat ini dan menciptakan keinginan untuk berubah di level manajemen eksekutif, yang kemudian diwujudkan berupa kasus bisnis. Penggerak perubahan biasanya berupa kejadian internal atau external, dan kondisi atau isu utama yang memberikan dorongan untuk berubah. Contoh dari penggerak perubahan seperti kejadian, tren, masalah kinerja, implementasi perangkat lunak, dan bahkan tujuan perusahaan.

2. Tahap 2 Penilaian Kapabilitas saat ini

Tahap kedua sejalan dengan tujuan yang berhubungan dengan TI dengan strategi dan risiko dan memprioritaskan tujuan perusahaan, tujuan IT, dan proses IT yang paling penting. Dalam COBIT 5 terdapat panduan pemetaan tujuan perusahaan terhadap tujuan IT, proses IT untuk membantu dengan pilihan/penyeleksian. Manajemen perlu tahu kapabilitas yang ada saat ini dan mana kekurangan. Dengan mengetahui tujuan perusahaan dan IT, proses-proses penting yang harus mencapai tingkat kapabilitas juga dapat diketahui.

3. Tahap 3 Menetapkan Target untuk peningkatan

Tahap ketiga yaitu menentukan target untuk perbaikan yang diikuti oleh analisis gap untuk mengidentifikasi solusi potensial. Beberapa solusi bisa berupa *quick wins* dan beberapa tugas jangka panjang yang lebih rumit. Tugas jangka panjang perlu dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah untuk diselesaikan.

4. Tahap 4 Merencanakan solusi praktis

Tahap keempat membahas tentang perencanaan solusi praktis yang layak dilaksanakan dengan mendefinisikan proyek yang didukung dengan kasus bisnis yang bisa dibenarkan, dan mengembangkan rencana perubahan implementasi.

5. Tahap 5 Bagaimana sampai kesana?

Tahap kelima menyediakan pelaksanaan solusi yang disusulkan ke dalam praktek kegiatan sehari-hari dan menetapkan perhitungan dan sistem pemantauan untuk memastikan kesesuaian dengan bisnis tercapai dan kinerja dapat diukur.

6. Tahap 6 Apakah sampai kesana?

Tahap keenam memiliki fokus dalam aktifitas transaksi berkelanjutan dari perbaikan tata kelola dan praktik manajemen yang telah ditingkatkan ke operasi bisnis normal dari pemantauan pencapaian dari peningkatan menggunakan metrik kerja dan keuntungan yang diharapkan.

7. Tahap 7 Bagaimana menjaga momentumnya?

Tahap ketujuh mengevaluasi kesuksesan dari inisiatif secara keseluruhan, mengidentifikasi kebutuhan tata kelola atau manajemen lebih lanjut, dan memperkuat kebutuhan terus-menerus.

4.4.1 Proses Penilaian *Capability Level Proses*

Terdapat 12 Proses yang diukur *Capability* dalam setiap levelnya, dengan dipetakan kedalam proses COBIT menggunakan Domain EDM, APO, BAI, MEA dan DSS, yang terdiri dari 2 (dua) proses Domain EDM, 4 (empat) proses dari APO, 3 (tiga) proses dari BAI, 1 (satu) proses dari MEA dan 2 (dua) proses domain DSS. Dalam menentukan kategori dari tiap hasil penilaian levelnya, suatu proses dikatakan lulus prosesnya dan meraih kategori *Largely achieved* (L) dengan ketentuan range nilai yang diperoleh adalah 50-85%. Sedangkan apabila suatu proses memiliki range berkisar antara >85-100%, ini merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk bisa melanjutkan pada penilaian level kapabilitas selanjutnya ada ketentuan proses sebelumnya harus meraih kategori *Fully achieved* (F) bila ingin melanjutkan pada proses selanjutnya.

Pada kali ini di Kabupaten Cilacap memiliki target *capability level* berada pada level 2 *Predictable Process*. Level *Predictable Process* sendiri merupakan rangkaian proses yang terdiri dari 2 (dua) bagian *Process Measurement* dan *Process Control*.

a. *Process Measurement*

Kegiatan yang dalam *Process Measurement* mengukur sejauh mana hasil pengukuran yang digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan, kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang sudah ditetapkan. Kegiatan berupa tindakan proses atau tindakan produk atau keduanya.

Hasil dari Informasi kebutuhan biasanya mencerminkan manajemen, teknis, proyek, proses atau produk kebutuhan.

b. *Process Control*

Process Control adalah pengukuran sejauh mana proses secara kuantitatif berhasil menghasilkan sebuah proses yang stabil, mampu/kapabel dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan. Penggunaan Tabel Ringkasan mempunyai fungsi untuk mempermudah dalam pengukuran pencapaian *capability level* sehingga level proses yang diukur diketahui berada pada level berapa. Ringkasan pencapaian *capability level* ditunjukkan pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 0.4 Pencapaian *Capability Level*

Ringkasan Hasil Pengukuran	Level 0	Level 1	Level 2		Level 3		Level 4		Level 5	
		PA 1.1	PA 2.1	PA 2.2	PA 3.1	PA 3.2	PA 4.1	PA 4.2	PA 5.1	PA 5.2
Pencapaian Kondisi Yang Diinginkan					3					

Berdasarkan hasil perhitungan pada 12 (dua belas) proses yang terdapat pada framework COBIT 5 yang dievaluasi pada domain EDM dan DSS, maka diperoleh hasil *ability level* yang telah dicapai oleh Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap tergambar dalam Tabel 4.5.

Tabel 0.5 Perhitungan Framework COBIT 5

No	Nama Proses	Target	Kondisi	GAP
----	-------------	--------	---------	-----

			Saat Ini	
1	BAI01 Manajemen Program dan Proyek	3	1	2
2	BAI08 Manajemen Pengetahuan	3	0	3
3	BAI09 Manajemen Aset	3	0	3
4	APO01 Manajemen Kerangka Kerja Teknologi Informasi	3	1	2
5	APO04 Manajemen Inovasi	3	0	3
6	APO07 Manajemen Sumber Daya Manusia	3	1	2
7	APO13 Manajemen Keamanan	3	0	3
8	DSS01 Manage Operations	3	1	2
9	DSS05 Manage Security Services	3	0	3
10	EDM01 Penjaminan pengaturan dan pemeliharaan kerangka kerja tata kelola	3	1	2
11	EDM04 Penjaminan optimalisasi sumber daya	3	0	3
12	MEA01 Monitoring Kesesuaian dan Kinerja Pegawai	3	0	3

Dari data yang didapatkan dari hasil penilaian capability level yang dilakukan pada setiap masing-masing proses, maka langkah selanjutnya ialah melakukan perhitungan untuk mengetahui besarnya rata-rata capability level yang telah dicapai dengan rumus perhitungan rata-rata sebagai berikut :

$$\text{Capability level} = \frac{(0 * y_0) + (1 * y_1) + (2 * y_2) + (3 * y_3) + (4 * y_4) + (5 * y_5)}{z}$$

Keterangan :

$Y_n(y_0...y_5)$: Jumlah proses yang berada di level n

Z : Jumlah proses yang dievaluasi

Merujuk pada hasil data pencapaian proses capability level , maka dapat dihitung rata-rata capability level sebagai berikut :

Capability level

$$0 \times 7 + 1 \times 5 + (2 \times 0) + (3 \times 0) + (4 \times 0) + (5 \times 0) 12$$

$$512$$

$$= 0,4$$

Hasil perhitungan capability level pada semua Perangkat Daerah kabupaten Cilacap didapatkan nilai rata-rata capability level 0 process 0,4 dan memiliki gap sebesar 2,5 untuk mencapai target 3 sebagai implementasi target semua Perangkat Daerah kabupaten Cilacap.

Target pencapaian yang ditetapkan oleh Kabupaten Cilacap adalah 3.00, hasil dari perhitungan capability level Kabupaten Cilacap pada saat ini adalah 1,72 maka untuk mencapai level target yang ditetapkan terdapat gap sebesar 2,28. Untuk menutup gap yang ada pada Kabupaten Cilacap maka diperlukan penyusunan petunjuk SOP yang sesuai dengan COBIT untuk proses yang belum memiliki SOP terutama untuk proses yang saat ini baru berada pada level 0.

4.4.2 Rekomendasi berdasarkan Cobit

Adapun hasil rekomendasi berdasarkan proses perhitungan COBIT 5, dideskripsikan pada Tabel 4.6.

Tabel 0.6 Rekomendasi dari Hasil Perhitungan COBIT

No	Nama Proses	Saran
1	BAI01 Manajemen Program dan Proyek	<p>1. Menjaga pendekatan standar program dan manajemen proyek.</p> <p>Mempertahankan pendekatan standar program dan manajemen proyek yang memungkinkan pemerintahan, tinjauan manajemen, pengambilan keputusan dan manajemen pengiriman kegiatan difokuskan pada pencapaian nilai dan tujuan (persyaratan, risiko, biaya, jadwal, kualitas).</p> <p>2. Memulai program.</p> <p>Memulai program untuk mengkonfirmasi manfaat yang diharapkan dan meninjau serta memperbarui kasus bisnis, mengembangkan realisasi rencana manfaat, dan persetujuan memperoleh dari sponsor untuk melanjutkan.mendapatkan otorisasi untuk melanjutkan.</p> <p>3. Mengelola keterlibatan stakeholder.</p> <p>Mengelola pelibatan stakeholder untuk memastikan pertukaran aktif akurat, konsisten dan tepat waktu yang mencapai semua pihak terkait. Ini termasuk perencanaan, mengidentifikasi dan menarik pemangku kepentingan dan mengelola harapan mereka.</p> <p>4. Mengembangkan dan memelihara rencana program.</p> <p>Merumuskan program untuk meletakkan dasar awal dan posisi untuk eksekusi dengan meresmikan ruang lingkup pekerjaan yang harus diselesaikan dan mengidentifikasi kiriman yang akan memuaskan tujuan dan memberikan nilai.</p> <p>5. Peluncuran dan mengeksekusi program.</p> <p>Peluncuran dan melaksanakan program untuk memperoleh dan mengarahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan manfaat program sebagaimana ditetapkan dalam rencana program.</p> <p>6. Monitor, kontrol dan laporan tentang hasil program.</p>

No	Nama Proses	Saran
		<p>Memantau dan program pengendalian (<i>delivery</i> solusi) dan perusahaan (<i>value/outcome</i>) kinerja rencana sepanjang siklus kehidupan ekonomi penuh investasi.</p> <p>7. Start up dan memulai proyek-proyek dalam program.</p> <p>Menetapkan dan mendokumentasikan sifat dan lingkup proyek untuk mengkonfirmasi dan mengembangkan di antara stakeholder pemahaman umum dari lingkup proyek dan bagaimana kaitannya dengan proyek-proyek lain dalam program investasi-<i>enabled</i> TI secara keseluruhan.</p> <p>8. Rencana proyek .</p> <p>Membangun dan mempertahankan rencana proyek (yang meliputi bisnis dan IT) untuk memandu pelaksanaan proyek dan kontrol sepanjang hidup proyek.</p> <p>9. Mengelola Program dan kualitas proyek.</p> <p>Menyiapkan dan melaksanakan rencana manajemen mutu, proses dan praktek, yang menjelaskan program dan proyek pendekatan kualitas.</p> <p>10. Mengelola Program dan risiko proyek .</p> <p>Meminimalisir risiko spesifik yang terkait dengan program dan proyek melalui sistematis proses perencanaan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengawasi peristiwa yang memiliki potensi untuk menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan.</p> <p>11. Memantau dan kontrol proyek.</p> <p>Kinerja kontrol proyek terhadap kriteria utama kinerja proyek seperti jadwal, kualitas, biaya dan risiko.</p> <p>12. Mengelola sumber daya proyek dan paket pekerjaan.</p> <p>Mengelola proyek dengan paket pekerjaan dengan menempatkan persyaratan formal pada otorisasi dan menerima paket pekerjaan, dan menugaskan dan koordinasi bisnis yang tepat dan sumber daya TI.</p> <p>13. Menutup proyek atau iterasi.</p> <p>Pada akhir setiap proyek, rilis atau iterasi, memerlukan stakeholder proyek untuk</p>

No	Nama Proses	Saran
		<p>memastikan apakah proyek atau hasil iterasi sesuai yang direncanakan dan nilai.</p>
2	BAI08 Manajemen Pengetahuan	<p>1. Memelihara dan memfasilitasi budaya berbagi pengetahuan.</p> <p>Merancang dan menerapkan skema untuk memelihara dan memfasilitasi budaya berbagi pengetahuan.</p> <p>2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumber-sumber informasi.</p> <p>Mengidentifikasi, memvalidasi dan mengklasifikasikan berbagai sumber informasi internal dan eksternal yang diperlukan untuk mengaktifkan penggunaan yang efektif dan pengoperasian proses bisnis dan layanan TI.</p> <p>3. Mengatur dan kontekstualisasi informasi menjadi pengetahuan.</p> <p>Mengatur informasi berdasarkan kriteria klasifikasi. Mengidentifikasi dan menciptakan hubungan yang bermakna antara unsur-unsur informasi dan memungkinkan penggunaan informasi. Mengidentifikasi pemilik dan menentukan dan menerapkan tingkat akses ke sumber pengetahuan.</p> <p>4. Gunakan dan berbagi pengetahuan.</p> <p>Menyebarkan sumber daya yang tersedia pengetahuan kepada para pemangku kepentingan yang relevan dan berkomunikasi bagaimana sumber daya dapat digunakan untuk mengatasi kebutuhan yang berbeda (misalnya, pemecahan masalah, belajar, perencanaan strategis dan pengambilan keputusan).</p> <p>5. Mengevaluasi dan pensiun informasi.</p> <p>Mengukur penggunaan dan mengevaluasi mata uang dan relevansi informasi. Pensiun informasi usang."</p>
3	BAI09 Manajemen Aset	<p>1. Mengidentifikasi dan mencatat aset lancar.</p> <p>Menjaga catatan up-to-date dan akurat semua aset TI yang dibutuhkan untuk memberikan layanan dan memastikan keselarasan dengan manajemen konfigurasi dan manajemen keuangan.</p> <p>2. Mengelola aset kritis.</p>

No	Nama Proses	Saran
		<p>Mengidentifikasi aset yang sangat penting dalam memberikan kemampuan layanan dan mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan mereka keandalan dan ketersediaan untuk mendukung kebutuhan bisnis.</p> <p>3. Mengelola siklus hidup aset. Mengelola aset dari pengadaan untuk pembuangan agar aset dimanfaatkan secara efektif dan efisien mungkin dan dicatat dan dilindungi secara fisik.</p> <p>4. Mengoptimalkan biaya aset. Secara teratur meninjau basis aset keseluruhan untuk mengidentifikasi cara-cara untuk mengoptimalkan biaya dan menjaga keselarasan dengan kebutuhan bisnis.</p> <p>5. Mengelola lisensi. Mengelola lisensi perangkat lunak sehingga jumlah optimal lisensi dipertahankan untuk mendukung bisnis persyaratan dan jumlah lisensi yang dimiliki cukup untuk menutup perangkat lunak yang diinstal di gunakan."</p>
4	APO01 Manajemen Kerangka Kerja Teknologi Informasi	<p>1. Mendefinisikan struktur organisasi</p> <p>Menetapkan suatu struktur organisasional yang mencerminkan kebutuhan bisnis dan prioritas TI. Menyusun struktur manajemen yang dibutuhkan (contoh: komite khusus) dalam pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan efisien.</p> <p>2. Menetapkan peran dan tanggung jawab</p> <p>Menetapkan, menyepakati, dan menyampaikan peran dan tanggungjawab personil TI, dan juga stakeholder lain yang memiliki tanggungjawab terhadap TI perusahaan, serta kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas personil terkait.</p> <p>3. Memelihara enabler sistem manajemen</p> <p>Memelihara enabler sistem manajemen dan lingkungan kendali bagi TI perusahaan, dan memastikan bahwa enabler tersebut terintegrasi dan selaras dengan filosofi dan gaya operasi tata kelola dan manajemen perusahaan. Enabler-enabler ini mencakup komunikasi yang jelas mengenai harapan/kebutuhan. Sistem manajemen sebaiknya menganjurkan untuk bekerja sama dan bekerja tim lintas divisi, menganjurkan kepatuhan dan perbaikan berkelanjutan, dan dapat mengatasi penyimpangan proses (termasuk kegagalan).</p> <p>4. Menyampaikan tujuan dan arahan</p>

No	Nama Proses	Saran
		<p>manajemen</p> <p>Memberikan kesadaran dan pemahaman mengenai tujuan dan arah TI kepada stakeholder dan pengguna terkait di seluruh perusahaan.</p> <p>5. Optimasi penempatan fungsi TI</p> <p>Memposisikan kapabilitas TI dalam struktur organisasional keseluruhan untuk mencerminkan model perusahaan yang relevan terhadap pentingnya TI dalam perusahaan, utamanya mengenai pentingnya kapabilitas TI dalam strategi perusahaan dan ketergantungan operasional pada TI. Garis pelaporan CIO sebaiknya selaras dengan pentingnya TI dalam perusahaan.</p> <p>6. Mendefinisikan kepemilikan informasi (data) dan system</p> <p>Mendefinisikan dan memelihara tanggung jawab dalam kepemilikan informasi (data) dan sistem informasi. Memastikan bahwa pemilik sistem membuat keputusan mengenai klasifikasi informasi dan sistem, serta melindunginya.</p> <p>7. Mengatur perbaikan proses yang berlanjut</p> <p>Mengukur, merencanakan, dan melaksanakan perbaikan proses berkelanjutan dan kematangannya untuk memastikan bahwa proses tersebut mampu memenuhi tujuan perusahaan, tata kelola, manajemen, dan kendali. Mempertimbangkan panduan penerapan proses COBIT, standar baru, prasyarat kepatuhan, peluang otomasi, dan umpan balik pengguna proses, tim proses, dan stakeholder lainnya. Memperbarui proses dan mempertimbangkan dampaknya terhadap enabler proses.</p> <p>8. Menjaga kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur</p> <p>Menyusun prosedur untuk menjaga kepatuhan, pengukuran kinerja kebijakan dan enabler kerangka kerja kendali lainnya, dan untuk menjalankan konsekuensi atas ketidakpatuhan atau kinerja yang kurang. Melacak tren dan kinerja kemudian mempertimbangkannya dalam desain perbaikan kerangka kerja kendali di masa mendatang.</p>
5	APO04 Manajemen Inovasi	<p>1. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi</p> <p>Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk</p>

No	Nama Proses	Saran
		<p>inovasi, dengan mempertimbangkan permasalahan seperti budaya, upah, kerja sama, teknologi, dan mekanisme untuk mempromosikan dan menangkap ide pegawai.</p> <p>2. Memelihara pemahaman terhadap lingkungan perusahaan Bekerja bersama dengan stakeholder terkait untuk memahami hambatan mereka. Memelihara pemahaman yang cukup mengenai strategi perusahaan dan lingkungan persaingan atau hambatan lainnya sehingga peluang untuk teknologi baru dapat teridentifikasi.</p> <p>3. Mengawasi dan meninjau lingkungan teknologi Melakukan pengawasan dan peninjauan sistemik terhadap lingkungan eksternal perusahaan untuk mengidentifikasi teknologi baru yang dapat memberikan nilai potensial. Mengawasi pasar, keadaan persaingan, sektor industri, dan tren hukum dan regulasi untuk dapat menganalisis teknologi baru dan ide inovasi dalam konteks perusahaan.</p> <p>4. Mengukur potensi teknologi baru dan ide inovasi Menganalisis teknologi baru yang teridentifikasi dan/atau saran inovasi TI lainnya. Bekerja bersama dengan stakeholder terkait untuk mengesahkan asumsi mengenai potensi teknologi dan inovasi baru.</p> <p>5. Merekomendasikan inisiatif lebih jauh yang layak Mengevaluasi dan mengawasi hasil pembuktian inisiatif dan, jika memungkinkan, memberikan rekomendasi untuk inisiatif lebih jauh dan mendapatkan dukungan stakeholder.</p> <p>6. Mengawasi penerapan dan penggunaan inovasi Mengawasi penerapan dan penggunaan teknologi baru dan inovasi selama proses integrasi dan adopsi ke dalam siklus hidup ekonomis. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa manfaat yang dijanjikan benar-benar terealisasi dan dapat digunakan sebagai pembelajaran baru.</p>
6	APO07 Manajemen Sumber Daya Manusia	<p>1. Memelihara kepegawaian yang cukup dan layak Mengevaluasi kebutuhan kepegawaian secara rutin setidaknya setahun sekali, atau ketika terjadi perubahan besar pada lingkungan perusahaan, operasional, atau TI. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa</p>

No	Nama Proses	Saran
		<p>perusahaan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk mendukung tujuan dan sasaran perusahaan. Kepegawaian meliputi baik sumber daya internal maupun eksternal.</p> <p>2. Mengidentifikasi personil TI utama/kunci Mengidentifikasi personil TI utama/kunci dan di saat yang sama meminimalkan ketergantungan terhadap seorang individu dalam mengerjakan suatu fungsi kritical melalui dokumentasi pengetahuan, pembagian pengetahuan, perencanaan penggantian, dan persiapan pegawai bantuan.</p> <p>3. Memelihara kemampuan dan kompetensi personil Mendefinisikan dan mengatur kemampuan dan kompetensi yang diperlukan oleh personil. Secara rutin memverifikasi bahwa personil memiliki kompetensi untuk memenuhi peran mereka sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalamannya. Selain itu, juga memverifikasi bahwa kompetensi-kompetensi ini dipelihara melalui program kualifikasi dan sertifikasi jika memungkinkan. Menyediakan pembelajaran dan peluang bagi pegawai untuk memelihara pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi mereka, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan.</p> <p>4. Mengevaluasi kinerja pegawai Melakukan evaluasi kinerja terhadap tujuan perusahaan, standar yang ditetapkan, tanggung jawab kerja, dan kerangka kerja kemampuan dan kompetensi secara tepat waktu dan rutin setidaknya setahun sekali. Pegawai sebaiknya mendapat pelatihan dalam kinerja ketika dibutuhkan.</p> <p>5. Merencanakan dan melacak penggunaan SDM bisnis dan TI Memahami dan melacak permintaan terhadap SDM bisnis dan TI baik untuk kondisi saat ini maupun mendatang. Mengidentifikasi kekurangan pada rencana alokasi sumber daya dan proses rekrutmen bisnis dan TI, serta memberikan masukan pada rencana-rencana tersebut.</p> <p>6. Mengatur staf kontrak Memastikan bahwa konsultan-konsultan dan personil-personil kontrak yang mendukung perusahaan dengan kemampuan TI tersebut mengetahui dan mematuhi kebijakan organisasi serta mampu memenuhi kontrak</p>

No	Nama Proses	Saran
		yang telah disepakati.
7	APO13 Manajemen Keamanan	<p>1. Menetapkan dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) Menetapkan dan memelihara SMKI yang memberikan pendekatan manajemen keamanan informasi yang baku, resmi, dan berlanjut. Menerapkan teknologi dan proses bisnis yang aman sesuai dengan kebutuhan bisnis dan manajemen keamanan perusahaan.</p> <p>2. Mendefinisikan dan mengatur rencana penanganan resiko keamanan informasi Menyusun rencana keamanan informasi sesuai dengan strategi dan arsitektur perusahaan. Memastikan bahwa rekomendasi dalam penerapan keamanan telah diterapkan sebagai bagian dari operasional bisnis.</p> <p>3. Mengawasi dan meninjau SMKI Mengawasi dan menyampaikan secara rutin perlunya perbaikan keamanan informasi yang berlanjut beserta manfaatnya. Mengumpulkan dan menganalisis data mengenai SMKI dan kerentanan sistem, serta meningkatkan efektifitas SMKI secara berkala setidaknya sekali setiap tahun. Merekomendasikan kebiasaan yang mendukung perbaikan keamanan yang berlanjut.</p>
8	DSS01 Manage Operations	<p>1. Melaksanakan prosedur operasional TI. Memelihara dan melaksanakan prosedur operasional dan task operasional dengan andal dan konsisten.</p> <p>2. Mengelola layanan TI outsourcing. Mengelola pengoperasian layanan TI outsourcing untuk menjaga perlindungan terhadap informasi perusahaan dan keandalan dari pelayanan.</p> <p>3. Memonitoring infrastruktur TI. Memonitoring infratraktur TI dan kejadian yang terkait. Menyimpan informasi kronologis yang memadai dalam log operasi untuk memungkinkan rekonstruksi, review dan pemeriksaan urutan waktu operasi dan aktivitas lain disekitarnya atau operasi yang mendukung.</p> <p>4. Mengelola lingkungan TI. Mempertahankan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap factor lingkungan TI. Memasang peralatan dan perangkat khusus untuk memantau dan mengendalikan lingkungan TI.</p> <p>5. Mengelola fasilitas TI.</p>

No	Nama Proses	Saran
		<p>Mengelola fasilitas TI, meliputi listrik dan peralatan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, teknis dan kebutuhan bisnis, spesifikasi vendor, dan pedoman kesehatan dan keselamatan.</p>
9	DSS05 Manage Security Services	<p>1. Melindungi TI terhadap malware. Menerapkan dan memelihara pencegahan, deteksi dan langkah perbaikan (terutama patch keamanan dan kontrol virus yang <i>up to date</i>) pada seluruh perusahaan untuk melindungi system informasi dan TI dari malware (misalnya <i>virus, worm, spyware, spam</i>).</p> <p>2. Mengelola jaringan dan konektivitas keamanan TI. Menggunakan langkah keamanan dan prosedur manajemen terkait untuk melindungi informasi atas semua metode konektivitas.</p> <p>3. Mengelola keamanan endpoint. Memastikan bahwa <i>endpoint</i> (misalnya laptop, desktop, server, dan perangkat mobile dan jaringan atau software) dijamin pada tingkat yang sama atau lebih besar dari persyaratan keamanan yang ditetapkan dari informasi yang diproses, disimpan dan dikirimkan.</p> <p>4. Mengelola identitas pengguna TI dan akses logis. Memastikan bahwa semua pengguna TI memiliki hak akses informasi sesuai dengan kebutuhan bisnisnya dan berkoordinasi dengan unit-unit yang mengelola hak akses dalam proses bisnis.</p> <p>5. Mengelola akses fisik pada asset TI. Mendefinisikan dan menerapkan prosedur untuk memberikan, membatasi dan mencabut akses ke lokasi sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk keadaan darurat. Akses ke lokasi harus benar, resmi, dicatat dan dipantau. Hal ini berlaku untuk semua orang yang memasuki tempat termasuk staf, staf sementara, klien, vendor, pengunjung atau pihak ketiga lainnya.</p> <p>6. Mengelola dokumen dan perangkat output yang sensitive. Membangun pengamanan fisik yang tepat, manajemen persediaan dari asset TI yang sensitive, seperti surat berharga, printer khusus atau security token.</p> <p>7. Memonitoring infrastruktur TI untu kejadian terkait keamanan.</p>

No	Nama Proses	Saran
		<p>Menggunakan alat deteksi gangguan, memantau infrastruktur untuk akses yang tidak sah dan memastikan bahwa kejadian telah terintegrasi dengan manajemen insiden.</p>
10	EDM01 Penjaminan pengaturan dan pemeliharaan kerangka kerja tata kelola	<p>1. Evaluasi tata kelola sistem. mengidentifikasi dan ikut terlibat secara kontinyu dengan para stakeholder perusahaan, memahami dokumentasi tentang persyaratan, dan membuat penilaian pada desain saat ini dan masa depan tata kelola TI perusahaan.</p> <p>2. Mengatur tata kelola sistem . menginformasikan kepemimpinan dan mendapatkan dukungan mereka, membeli dan komitmen. Panduan struktur, proses dan praktek untuk tata kelola TI sejalan dengan prinsip-prinsip yang disepakati desain tata kelola, model pengambilan keputusan dan tingkat otoritas. Mendefinisikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.</p> <p>3. Memantau tata kelola Sistem Memantau efektivitas dan kinerja tata kelola perusahaan tentang TI. Menilai tata kelola sistem dan mekanisme dilaksanakan (termasuk struktur, prinsip-prinsip dan proses) beroperasi secara efektif dan memberikan pengawasan yang tepat untuk TI.</p>
11	EDM04 Penjaminan optimalisasi sumber daya	<p>1. Mengevaluasi pengelolaan sumber daya.</p> <p>Memeriksa dan membuat penilaian secara kontinyu pada kebutuhan saat ini dan masa depan untuk sumber daya terkait TI, kehadak untuk sumber daya (termasuk sumber strategi), dan alokasi dan prinsip manajemen untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan cara yang optimal.</p> <p>2. Mengatur Pengelolaan sumber daya</p> <p>Memastikan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya untuk memungkinkan penggunaan optimal dari sumber daya TI pada siklus kebutuhan perusahaan secara penuh</p> <p>3. Memantau Pengelolaan sumber daya</p> <p>Memantau tujuan utama dan metrik proses pengelolaan sumber daya dan menetapkan jumlah penyimpangan atau masalah akan diidentifikasi, dilacak dan dilaporkan untuk perbaikan."</p>
12	MEA01 Monitoring Kesesuaian dan	<p>1. Meningkatkan Pendekatan Monitoring. Terlibat pada stakeholder agar dapat</p>

No	Nama Proses	Saran
	Kinerja Pegawai	<p>membangun dan mempertahankan aktivitas monitoring untuk tujuan, lingkup dan metode untuk mengukur solusi bisnis dan pelayanan terhadap perusahaan. Mengintegrasikan aktivitas ini dengan sistem manajemen kinerja perusahaan.</p> <p>2. Mengatur Kinerja dan Kesesuaian Target. Bekerja pada stakeholder agar dapat menentukan peninjauan secara berkala untuk menyetujui kinerja dan kesesuaian target dalam sistem pengukuran kinerja</p> <p>3. Pengumpulan, Kinerja Proses dan Kesesuaian Data. Mengumpulkan dan mengolah data dengan tepat waktu dan akurat sesuai dengan aktivitas pada perusahaan.</p> <p>4. Analisa dan Laporan Kinerja. Meninjau secara berkala dan melaporkan kinerja menggunakan metode yang menyediakan pandangan all-round pada kinerja TI dan cocok pada sistem monitoring perusahaan.</p> <p>5. Menjamin Pelaksanaan Tindakan Perbaikan. Membantu pihak stakeholder dalam mengidentifikasi dalam pelacakan tindakan korektif untuk mengatasi kesalahan tindakan.</p>

4.5 Kebutuhan Aplikasi

Ada beberapa aplikasi yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap. Ada beberapa yang sudah proses dan ada beberapa yang memang belum pernah dikerjakan adapun aplikasi-aplikasi tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini :

No	<u>Nama Aplikasi</u>	<u>Pengembangan</u>	<u>Catatan</u>	<u>Manfaat</u>
1	Aplikasi Pustaka dan Pencarian Produk Hukum		Urgent	Digitalisasi pustaka produk-produk hukum agar dapat diakses oleh Masyarakat secara langsung
2	Sistem untuk layanan konsultasi aparat pengawas internal pemerintah (objek: pengguna dana APBD)		Urgent	
3	Antrian Online	Disdukcapil Kabupaten Cilacap	Dalam Proses	Untuk memudahkan masyarakat yang berdomisili jauh untuk dapat dilayani urusan adminduknya
4	eSITWIL	KOMINFO	Dalam Proses	untuk melaporkan perkembangan situasi keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kabupaten Cilacap
5	Pengembangan RISDA		Dalam Proses	Untuk mengetahui kondisi dari saluran yang ada baik irigasi maupun pembuangan dan sumur bor di kabupaten cilacap
6	WebGIS Jalan Kabupaten	Dinas PUPR Cilacap	Dalam Proses	Informasi jalan kabupaten, jembatan, drainase
7	Pengembangan SIJAKAKANCIL	Dinas PUPR Cilacap	Dalam Proses	Menambahkan fitur pengaduan dari masyarakat
8	Rekamedis elektronik	Pilar Cilacap	Dalam Proses	paperles dan elektronik claim bpjs
9	Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah	CV. Art Technology	Dalam tahap sosialisasi	Untuk pelaporan dana BOS
10	SIMPROKUM	Kominfo	Interface sudah, masih dalam tahap requirement + desain	Mempercepat proses penyusunan produk hukum daerah dan monitoring pengajuan produk hukum
11	SIMWASDA (Sistem Informasi Pengawasan	Pihak ketiga	Masih dalam tahap user	Meningkatkan arus pelayanan

No	Nama Aplikasi	Pengembangan	Catatan	Manfaat
	Daerah)		requirement	perencanaan, evaluasi dan pelaporan pengawasan
12	aplikasi perkebunan (luas lahan, tanam, komunitas)	pihak ketiga	perlu pemeliharaan	mengetahui komunitas, luas lahan dan luas tanam/ data ada pada dispabun dan pertanian
13	antrian online	dinkes	Tahap keinginan	tidak ada
14	statistik perikanan		Tahap keinginan	untuk pendataan budidaya, tangkapan dan hasil olahan
15	Adanya sistem yang terintegrasi antara SP2KP, SIHATI. Karena pelaporan yang diupload adalah sama.	-	Tahap keinginan	-
16	Sistem Informasi Online bagi Masyarakat untuk Pencarian Ketersediaan UKM di Kabupaten Cilacap	-	Tahap keinginan	-
17	Sistem pengajuan online permohonan ITR (Informasi Tata Ruang)		Tahap Keinginan	Pengajuan online bagi pihak yang membutuhkan ITR
18	WebGIS Tata Ruang		Tahap Keinginan	Informasi tata ruang untuk masyarakat
19	E-Lantas	-	Tahap Keinginan	Decision Support System untuk Pengaturan traffic light secara otomatis berdasarkan kepadatan sisi jalan (harus ada tambahan CCTV)
20	Command Center		Tahap Keinginan	Untuk integrasi dengan SKPD lain
21	E-Surat		Tahap Keinginan	
22	Sistem Informasi Sarana dan Prasarana		Tahap keinginan	Untuk pemantauan kondisi sarana dan prasarana
23	Database DISPORAPAR		Tahap keinginan	Untuk pencarian informasi dalam bidang pemuda, olahraga dan pariwisata
24	Aplikasi pelaporan pemilik usaha bidang pariwisata		Tahap keinginan	Untuk pelaporan rutin dari pemilik usaha
25	Aplikasi penilaian untuk berbagai		Tahap Keinginan	

No	Nama Aplikasi	Pengembangan	Catatan	Manfaat
	kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkungan hidup			
26	Sistem Tracking untuk Monitoring Truk Sampah		Tahap Keinginan	
27	Aplikasi penentuan rute optimal untuk Truk Sampah		Tahap Keinginan	
28	Sistem Pengaduan Ketentraman Masyarakat		Tahap Keinginan	
29	E-Arsip		Tahap Keinginan	
30	E-Surat		Tahap Keinginan	
31	Aplikasi Pelaporan KDRT Terintegrasi		Tahap Keinginan	
32	Aplikasi Informasi Tingkat Kerawanan KDRT		Tahap Keinginan	
33	Aplikasi untuk Manajemen Kerjasama dengan Pihak Manapun		Tahap Keinginan	
34	Sistem Monitoring Peralatan		Tahap Keinginan	Untuk memonitor kondisi peralatan pendeteksi bencana dan peringatan dini
35	Aplikasi Pengaduan dari Masyarakat		Tahap Keinginan	Untuk mendapatkan informasi keadaan daerah dari masyarakat
36	Aplikasi Penyimpanan Data untuk Penelitian		Tahap Keinginan	untuk menyimpan data yang berhubungan dengan perijinan pelaksanaan penelitian di wilayah Kabupaten Cilacap
37	Pengajuan Online untuk Penelitian		Tahap Keinginan	untuk masyarakat dapat melaksanakan pengajuan perijinan penelitian secara online
38	Pelaporan Online Petugas Lapangan		Tahap Keinginan	
39	PAI Online berbasis web		Tahap Keinginan	
40	eSuker		Tahap Keinginan	Pelayanan nomor surat keluar, melihat nomor surat yang tersedia
41	Pengajuan Operasional Online		Tahap Keinginan	Pengajuan operasional (perjalanan dinas,

No	<u>Nama Aplikasi</u>	<u>Pengembangan</u>	<u>Catatan</u>	<u>Manfaat</u>
				jamuan makan, dsb) secara online
42	Penambahan fitur eSurat		Tahap Keinginan	Pelacakan surat dinas, penambahan user
43	Upgrade dan Update SIMPEG		Tahap Keinginan	Penambahan teknologi Bootstrap agar dapat dibuka di mobile phone, Adanya update alur cuti. Sesuaikan dengan proses bisnis saat ini.
44	e-Jabatan		Tahap Keinginan	Penambahan fitur pemberhentian, pengangkatan kembali dalam jabatan, Rekomendasi untuk kenaikan jabatan, terintegrasi dengan pengecekan di e-File
45	Sistem Pelayanan Online bagi Masyarakat Desa		Tahap keinginan	Aplikasi untuk pelayanan online surat pengantar, permohonan (Administrasi Kependudukan)
46	Aplikasi untuk koordinasi dengan Dinas terkait dengan Bagian Perekonomian untuk membantu perumusan bahan kebijakan		Tahap keinginan	
47	SIPROKLIM KANCIL	Kominfo	Tahap keinginan	Setiap Kampung mengisi data mengenai kelengkapan dalam lingkungan hidup
48	Call Center Kebakaran		Tahap keinginan	
49	E-Hibah		Tahap keinginan	
50	Aplikasi pencatatan registrasi		Tahap keinginan	untuk pencatatan registrasi yang ada di kecamatan.
51	LIS		Tahap keinginan	
52	E-renumerasi		Tahap keinginan	
53	SIMPATIC	KOMBAS	Tahap keinginan	informasi untuk investasi di kabupaten cilacap
54	lis		Tahap	

No	<u>Nama Aplikasi</u>	Pengembangan	Catatan	Manfaat
			keinginan	
55	aplikasi rusunawa, pemakanan, sedot wc		Tahap keinginan	
56	penerangan jalan umum		Tahap keinginan	
57	pelayanan penebangan pohon/ ratas		Tahap keinginan	
58	aplikasi jalan		Tahap keinginan	
59	TNDE		Tahap keinginan	belum ada
60	usulan masyarakat		Tahap keinginan	usulan masyarakat melalui web
61	cctv		Tahap keinginan	
62	pabx		Tahap keinginan	komunikasi antar pegawai
63	TNDE	INHOUSE	Tahap keinginan	naskah dinas elektronik
64	SUPERJON	INHOUSE	Tahap keinginan	spj online
65	GPS Traker	INHOUSE	Tahap keinginan	pergerakan truk sampah
66	E-SAKIP	INHOUSE	Tahap keinginan	monev kegiatan
67	SIDEWAS	INHOUSE	Tahap keinginan	anggaran
68	aspirasi digital		Tahap keinginan	aspirasi dari masyarakat secara online
69	PSC	dinkes	Tahap keinginan	kegawat daruratan
70	pmks		Tahap keinginan	penyandang masalah kegiatan sosial
71	spdgt	dinkes dan kemenkes	Tahap keinginan	rujukan

BAB 5
PROGRAM PENGEMBANGAN & QUICK-WIN
SMART-CITY KABUPATEN CILACAP

5.1 Program Pengembangan Umum

5.1.1 Kabupaten Cilacap Harus Cerdas

Memperhatikan keinginan menjadikan Cilacap menjadi “Singapore of Java” jelas membutuhkan upaya yang tidak ringan, dengan luasan yang harus dikelola, jumlah kecamatan, jumlah desa, jumlah kelurahan dan dengan penduduk hampir 2 juta jiwa Cilacap membutuhkan sentuhan teknologi ada andalan perdagangan, perikanan, kehutanan, perkebunan, serta energi dan sumber daya mineral dapat secara efektif dan efisien berkontribusi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan citra Cilacap menjadi lebih moncer di mata kota dan kabupaten lain, khususnya di Jawa-Tengah.



KAB. CILACAP

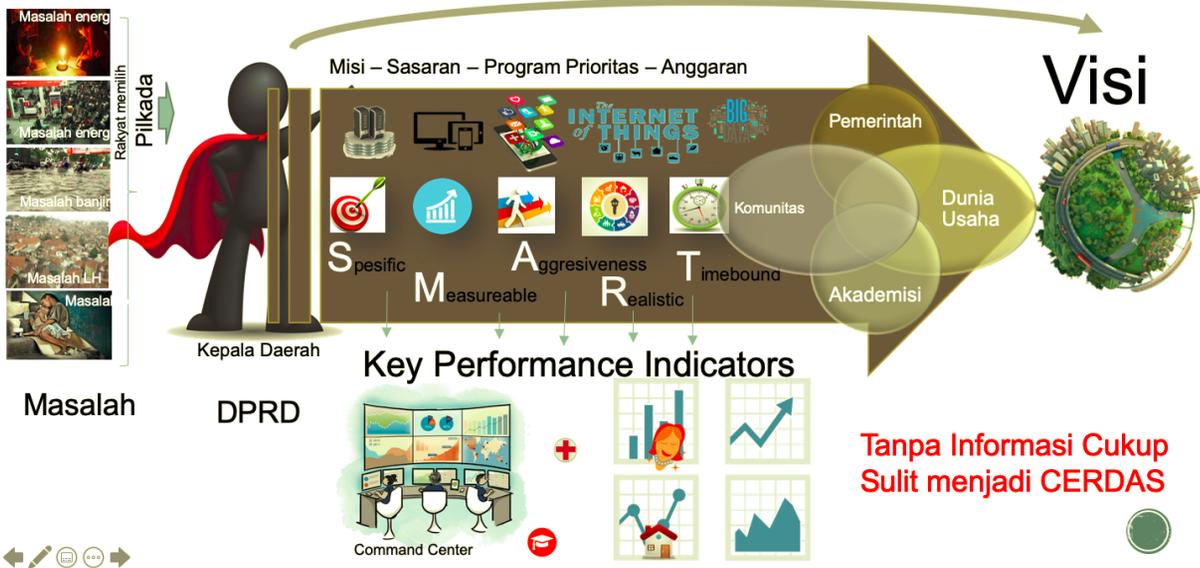
- 225.360,840 Ha
- 24 Kecamatan
- 269 desa
- 15 Kelurahan
- 1.860.240 Jiwa
- Andalan → Perdagangan, perikanan, kehutanan & perkebunan, serta energi dan sumber-daya mineral

“Singapore of Java” ?

Gambar 5.1 Cilacap, the “Singapore of Java”

Dalam kondisi tersebut, jelas dibutuhkan pendekatan cerdas, yang diantaranya dilakukan melalui pendekatan Smart-city. Dengan pendekatan smart-city, seluruh permasalahan dan keinginan dari masyarakat akan dapat dikelola sesuai dengan visi, misi, sasaran, serta disesuaikan dengan prioritas dan anggaran. Dengan pendekatan smart-city, pemerintah daerah bersama DPRD akan mampu melakukan semua kegiatan tata-kelola dan layanan kepada masyarakat dengan sasaran yang semakin spesifik, terukur, secara tepat, sesuai dengan masalah di lapangan dalam sesingkat mungkin. Semuanya akan menjadi lebih mudah dilakukan dengan bantuan sistem informasi yang semakin bagus, dalam rangka meningkatkan semua indikator kinerja utama di kabupaten cilacap.

CERDAS = SMART



Gambar 5.2 Pendekatan Smart-City di Kabupaten Cilacap

Tanpa upaya yang terarah dan terukur, semua indicator tata-kelola, kualitas hidup, lingkungan masyarakat ekonomi akan sangat sulit untuk dicapai. Ada kemungkinan semua indicator meningkat, tetapi belum tentu menjangkau target yang diinginkan. Maka, program smart-city harus dilakukan dengan mapping yang bagus dari kondisi yang saat ini ada.



Gambar 5.3 Korelasi Indeks Nasional dengan Smart-city

5.1.2 Program Utama Pendukung SPBE

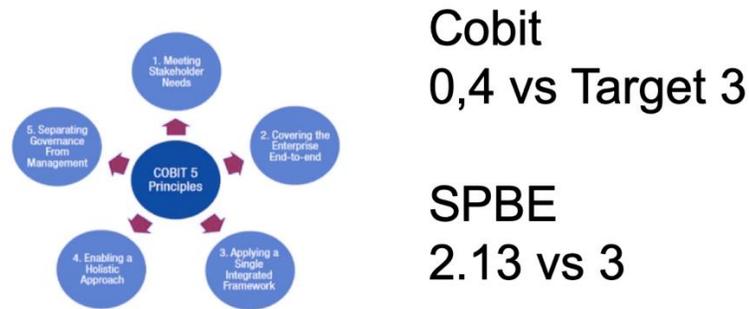
Mengacu kepada Perpres 95/2018, semua aktifitas pemerintahan harus dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik (SPBE = sistem pemerintahan berbasis elektronik). Maka, program utama pembangunan di Kabupaten Cilacap harus diarahkan minimal menjadi sarana untuk mendukung terlaksananya SPBE. Hasil terakhir evaluasi SPBE Kabupaten Cilacap menunjukkan Cilacap mempunyai nilai 2,13 (Cukup). Walaupun sudah lebih bagus dari rata-rata kabupaten (1,77), tetapi masih di bawah rata-rata provinsi (2,27). Karena telah terbit surat edaran Menteri dalam negeri terkait percepatan SPBE, maka program utama yang harus dilakukan adalah Program Pendukung Percepatan SPBE.

- INDEK SPBE CILACAP 2,13
 - NASIONAL 1,98
 - KABUPATEN 1,77
 - KOTA 2,17
 - KEMENTERIAN 2,97
 - LPNK 2,73
 - Provinsi 2,27
 - Lembaga Lain 2,27

- YANG SUDAH DI 3 KEATAS
 - Administrasi Pemerintahan 3,14
- Yang Masih dibawah 3
 - Kebijakan SPBE * 1,59
 - Tata kelola 1,29
 - Layanan 1,80
 - Tata-kelola * 1,43
 - Kelembagaan 1,00
 - Stra & Ren. 1,50
 - TIK 1,67
 - Layanan SPBE * 2,67
 - Adpemerintahan 3.14
 - Layanan Publik 1,83

Sebagai kabupaten di Jawa, sudah selayaknya lebih baik dari rata-rata nasional, tetapi dari detail domain indikator, masih banyak hal yang perlu dilakukan melalui inovasi yang terstruktur dan terencana, agar rata-rata 3.

Mengacu kepada arahan SPBE, maka program utama ini harus diarahkan untuk mempersempit Gap antara kondisi minimal normative (Baik) dengan kondisi saat ini, sebagai contoh Program harus dapat meminimalkan hasil asesmen Cobit, dari 0.4 menjadi 3 selain mendekati indeks SPBE 2.13 ke 3.



Gambar 5.4 Hasil Gap Analysis Cobit dan SPBE

Selain itu, memperhatikan keberlangsungan program 100 smart-city, Kabupaten Cilacap tidak boleh lagi masuk ke dalam kota “gagal” dengan “improvement negative” sebagaimana tergambar dari hasil asesmen kementerian Kominfo, bahwa hanya 8% dari “kota cerdas” mampu menunjukkan kemajuan positif. Artinya, 92% kota yang mengaku “cerdas” dikembangkan dengan tidak berdasarkan pada konsep yang baik dalam rangka menyelesaikan permasalahan kota atau kabupaten masing-masing.

NO	KAB/KOTA	DIMENSI					RATA-RATA BOBOT	TINGKAT IMPROVEMENT
		BASELINE (0.1)	OUTPUT (0.2)	OUTCOME (0.4)	IMPACT (0.1)	QUICKWIN (0.2)		
1	Kab. Bandung	2,66	2,90	3,27	3,25	3,80	3,24	0,64
2	Kab. Bantul	2,89	3,00	3,00	3,10	3,13	3,03	0,17
3	Kab. Batang	3,24	3,18	3,16	3,15	3,42	3,22	-0,01
4	Kab. Bitar	3,42	3,05	3,29	3,20	3,40	3,27	-0,18
5	Kab. Blora	3,00	2,33	2,84	2,90	2,96	2,78	-0,25
6	Kab. Bogor	2,35	2,18	2,53	2,65	2,51	2,45	0,11
7	Kab. Boyolali	3,23	2,45	2,69	2,45	2,71	2,68	-0,65
8	Kab. Cirebon	3,00	2,08	2,42	2,50	2,27	2,39	-0,69
9	Kab. Deli Serdang	3,21	2,50	2,53	2,95	3,22	2,77	-0,41
10	Kab. Grobogan	2,78	2,88	2,65	2,85	2,67	2,73	-0,07
11	Kab. Indramayu	3,00	2,58	2,38	2,40	2,22	2,45	-0,61
12	Kab. Jember	3,04	1,80	2,33	2,60	2,36	2,33	-0,77
13	Kab. Jepara	2,97	2,40	2,65	2,50	2,82	2,65	-0,38
14	Kab. Kendal	2,64	2,25	2,33	2,35	2,44	2,37	-0,30
15	Kab. Kulonprogo	3,26	2,90	2,87	2,80	2,73	2,88	-0,43
16	Kab. Kutai Timur	2,78	2,23	2,44	2,50	2,89	2,53	-0,27
17	Kab. Lamongan	2,68	2,33	2,67	2,60	2,64	2,59	-0,12
18	Kab. Langkat	3,05	2,38	1,96	2,40	2,22	2,25	-0,81
19	Kab. Luwu Timur	2,42	2,08	2,42	2,35	2,67	2,39	-0,05
20	Kab. Magelang	3,08	2,28	2,58	2,70	2,82	2,63	-0,49
21	Kab. Morowali	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-2,69
22	Kab. Muara Enim	2,93	2,35	2,31	2,70	2,51	2,46	-0,46
23	Kab. Musi Banyuasin	2,41	2,00	2,15	2,15	2,04	2,12	-0,32
24	Kab. Pasuruan	3,00	2,33	2,49	2,85	3,04	2,66	-0,32
25	Kab. Pati	3,09	2,68	2,60	2,35	2,51	2,62	-0,56
26	Kab. Pematang	3,04	2,58	3,24	3,10	3,18	3,06	-0,02
27	Kab. Solok	3,00	2,40	2,55	2,50	2,58	2,56	-0,50
28	Kab. Sukoharjo	3,05	3,08	2,98	3,00	3,09	3,03	-0,01
29	Kab. Sumbawa	3,07	2,60	2,56	2,60	2,96	2,70	-0,39
30	Kab. Sumenep	2,94	1,88	2,45	2,45	2,44	2,38	-0,63

Gambar 5.5 Ilustrasi Impromenet Negatif Program Smart-city

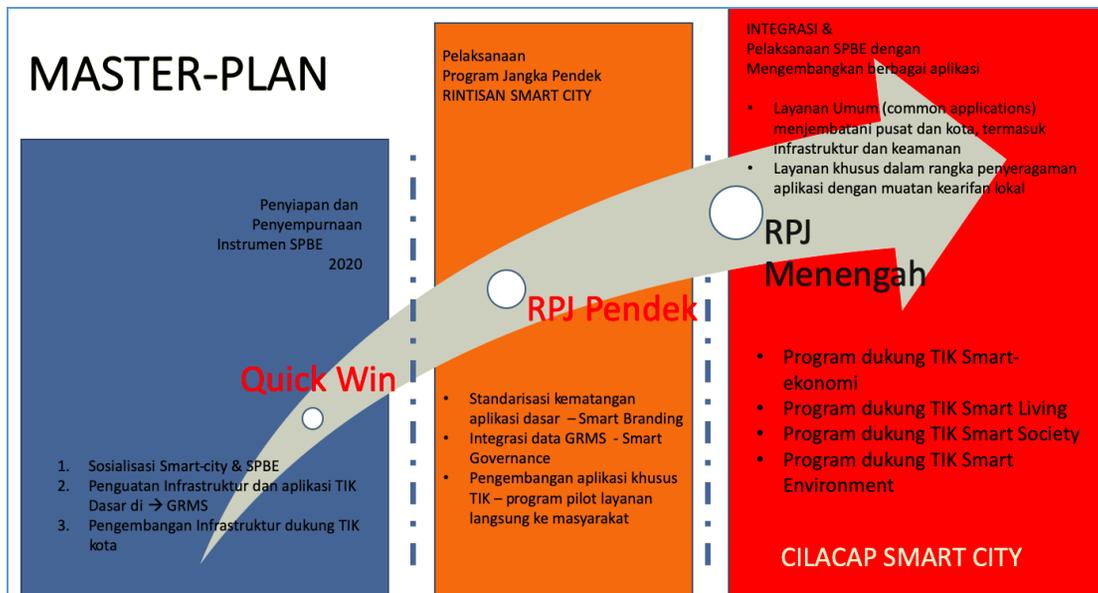
Dari tabel di atas terlihat, bahwa seluruh kota yang terdaftar telah mempunyai baseline yang baik, tetapi sebagian besar tidak melakukan program yang bagus, sehingga tidak berkembang dan ataupun malah mundur.

Mengacu kepada SE Mendagri No. 555/13100/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka paling tidak terdapat 3 hal yang harus dikerjakan, yaitu:

- Digitalisasi dengan SPBE sebagai upaya dan langkah nyata reformasi birokrasi: kebijakan, tata-kelola dan layanan
- Penganggaran berbasis kinerja, integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga kinerja dan monev; integrasi layanan kepegawaian, dokumentasi dan pengaduan
- Penyediaan video conference.

Maka dari itulah program utama dari roadmap Smart-city dilakukan dalam rangka sinkronisasi Master Plan dengan Surat Edaran Mendagri No. 555/13100/SJ tersebut. Melalui langkah awal tersebut, diharapkan Cilacap dapat mempercepat waktu untuk mewujudkan VISI-MISI Cilacap Smart-city, melalui STRATEGI PEMBANGUNAN TIK yang terarah, melalui RENCANA AKSI yang berkesinambungan, dengan dimulai dengan program QUICK-WIN sebagai langkah awal mengikuti PETA jalan untuk merealisasikan Smart Governance, Smart Branding, Smart Ekonomi, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment di Kabupaten Cilacap. Berikut ini adalah gambaran besar dari proses yang akan dilalui.

- Di Tahun 2020 akan lebih banyak ke proses sosialisasi, identifikasi awal dan integrasi fungsi-fungsi dasar
- Hingga tahun 2022, Kabupaten Cilacap telah masuk ke kelompok Smart City yang didukung oleh standarisasi aplikasi dan layanan, mulai layanan administrasi hingga layanan khusus untuk masyarakat di era industry 4.0 dan Society 5.0.
- Setelah 2022, maka diharapkan Kabupaten Cilacap telah mampu berubah dari rintisan smart-city menjadi smart city yang mandiri dalam rangka menjalankan SPBE secara penuh.



Gambar 5.6 Rencana Aksi Cilacap Smart-city

Dari pandangan global master-plan, maka secara umum, dapat dilakukan breakdown kegiatan per-tahun untuk merealisasikan program tahunan sebagaimana di tabel berikut ini. Di mana di tahun 2020, diharapkan Kabupaten Cilacap telah mampu memenuhi surat edaran Mendagri yang terdiri dari integrasi aplikasi administrasi dan mempunyai sarana telekonferen.

Master Plan e-Government Kabupaten Cilacap tahun 2020-2024

Quick Win	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Quick Win 1 (*) Sistem Video Conference Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Tata-kelola dan kelembagaan SPBE Strategi dan perencanaan percepatan layanan SPBE Penyusunan Proses Bisnis GRMS 	Review Proses Bisnis dan Kebijakan tata-kelola, kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi	Review Proses Bisnis dan Kebijakan tata-kelola, kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi	Review Proses Bisnis dan Kebijakan tata-kelola, kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi	Review Proses Bisnis dan Kebijakan tata-kelola, kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi	Review Proses Bisnis dan Kebijakan tata-kelola, kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi
Quick Win 2 (*) Integrasi Pran, Anggaran, pengadaan BJ, monev kinerja		Penguatan Data Center dan Administrasi Data Center	Intensifikasi pemanfaatan jaringan & backbone FO utk layanan TIK	Integrasi dan pemanfaatan gudang data kabupaten	Rintisan pengembangan sistem Big-data sebagai <i>decision support</i>	Rintisan Pengembangan penerapan <i>Internet of Things</i>
Quick Win 3 <ul style="list-style-type: none"> Rintisan e-Kinerja kepegawaian, persuratan dan pengaduan layanan publik Rintisan e-UMKM, e-cash 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi layanan administrasi existing, khususnya GRMS → pendampingan penyusunan proses bisnis Aplikasi Dashboard Management Support 	Rintisan layanan publik berbasis elektronik = <i>Internet of Services</i> → rintisan aplikasi khusus untuk publik	Penerapan layanan publik berbasis elektronik di sektor smart branding & smart ekonomi, e-tourism, e-Commerce, e-money, e-farming, e-nelayan	Penerapan layanan publik berbasis elektronik di sektor smart living (<i>harmony, health, mobility</i>)	Penerapan layanan publik berbasis elektronik di sektor smart Society & People (<i>community, learning, security</i>)	Penerapan layanan publik berbasis elektronik di sektor smart environment (<i>protection, waste, energy</i>)
Quick Win	Implementasi sistem pendukung			Kajian/studi		
				Pengembangan sistem dan integrasi sistem		

Gambar 5.7 Master Plan e-Government Kabupaten Cilacap tahun 2020-2024

5.2 Quick Win

Sebagaimana dijelaskan di atas, di tahun 2020 dilaksanakan program *Quick Win*, khususnya dalam rangka melaksanakan program percepatan sesuai Surat Edaran Mendagri No. 555/13100/SJ tentang percepatan SPBE.

5.2.1 Program Penyediaan Teleconference Kabupaten Cilacap

Mengacu Surat Edaran Mendagri No. 555/13100/SJ seluruh kota dan provinsi diminta untuk mempunyai sistem teleconference, dalam rangka mempercepat koordinasi antara kota dengan provinsi dan pusat. Untuk merealisasikan hal ini, pemerintah kota Cilacap dapat menggunakan berbagai pendekatan praktis disesuaikan dengan kemampuan kota, misalnya:

- Pendekatan software, saat ini telah banyak software yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi teleconference, misalnya yang berbasis “*Skype*”. Hanya dibutuhkan sumber daya yang tidak terlalu mahal untuk membuat sistem teleconference dapat dilakukan.
- Pendekatan aplikasi Mobile, yang secara praktis sudah sangat bisa digunakan untuk teleconference, termasuk video call.
- Pendekatan hardware, yang memang membutuhkan sumber daya lebih mahal, termasuk jaringan yang diamankan.

Kegiatan ini diberi kode K20-01

Teleconference Platform

The top 5 video conferencing apps for remote businesses

- Skype for Business. First and foremost, Skype for Business is a Microsoft product, so it already has quite a reputation. ...
- Join.me. Join.me are striving for simplicity. ...
- RingCentral Meetings. RingCentral Meetings is Turbine's personal favourite. ...
- Google Hangouts. ...
- Cisco WebEx.

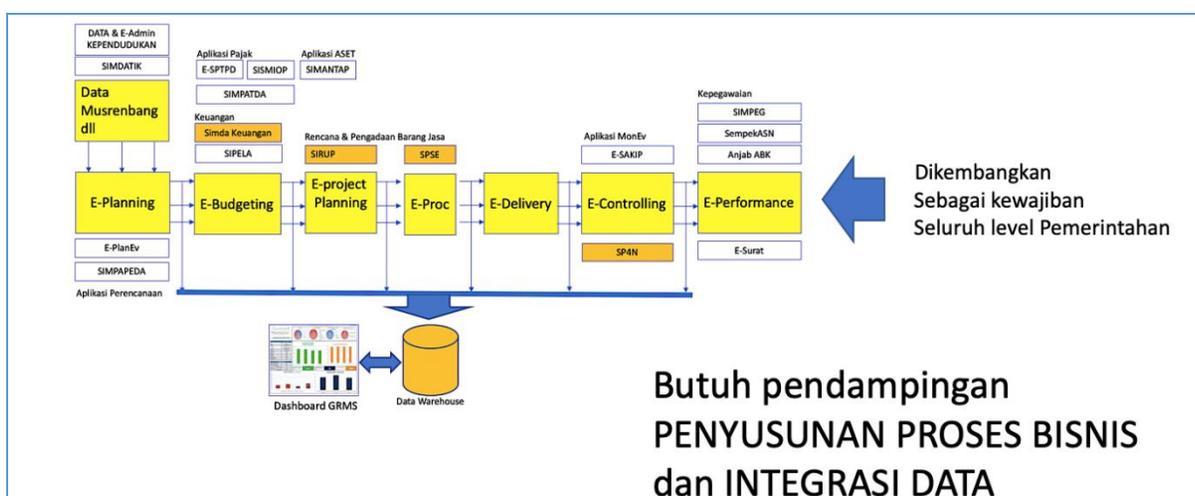
- Apps Software
- H/W Terminal
- Access
- Network



Gambar 5.8 Pendekatan Implementasi Teleconference

5.2.2 Program Integrasi Aplikasi Perencanaan, Anggaran, PBJ dan Monev

Mengacu Surat Edaran Mendagri No. 555/13100/SJ seluruh kota dan provinsi juga diminta untuk melakukan integrasi aplikasi, khususnya yang terkait dengan **Aplikasi Perencanaan, Anggaran, PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) dan Monev**. Dalam terminology manajemen, yang akan kita integrasikan ini, masuk dalam keluarga GRMS (government resource management system). Urgensi integrasi ini lebih pada upaya minimalisasi terjadinya salah administrasi dan menghindari praktek korupsi akibat sistem yang tidak terintegrasi.



Gambar 5.9 Integrasi Data GRMS

Dari diagram di atas, ditunjukkan kondisi ideal dari sebuah sistem GRMS, di mana dari musrenbang, pengisian e-planning, e-budgeting, e-project planning, pengadaan barang jasa, asset dan delivery, hingga monev kinerja semestinya berada dalam satu sistem yang terpadu. Dengan sistem terpadu, maka semua data dari awal hingga akhir dapat tersimpan di Gudang data yang sama, dan dapat digunakan untuk pelaksanaan operasinal, alat bantu pengambilan keputusan dan dalam rangka diseminasi informasi untuk keterbukaan informasi public.

Harus disadari, bahwa selama ini terdapat berbagai kendala pada saat integrasi sistem GRMS, maka dari itu perlu sebuah terobosan agar integrasi dilakukan tanpa merusak atau tergantung pada aplikasi awal yang terpisah dan dikembangkan oleh pihak-pihak yang berbeda. Untuk itu terdapat dua kegiatan penting pada aktifitas ini, yaitu:

- **K20-02 Kegiatan penyusunan proses bisnis GRMS**
- **K20-03 Kegiatan pengembangan aplikasi “Integrator” untuk melakukan integrasi data sesuai hasil penyusunan proses bisnis.**

5.2.3 Pengembangan e-Kinerja kepegawaian, Persuratan dan Pengaduan Layanan publik

Seperti juga di kota lain, Kabupaten Cilacap sudah mempunyai keinginan untuk membayar TPP dan Tukin yang dilakukan dalam rangka memberi penghargaan atas kinerja ASN di Kabupaten Cilacap. Hanya saja proses untuk menuju ke sana, masih sangat terkendala pada ketersediaan aplikasi yang mumpuni untuk melakukan semuanya. Untuk itu, maka masih dalam tahun pertama diperlukan kegiatan pembangunan, percepatan penerapan 3 aplikasi besar dengan basis data yang terintegrasi dengan sistem GRMS.

- **K20-04 Aplikasi Kinerja Kepegawaian**
- **K20-05 Aplikasi e-Persuratan**
- **K20-06 Aplikasi Pengaduan Layanan Publik**
- **K20-07 Aplikasi Dashboard Management Support**



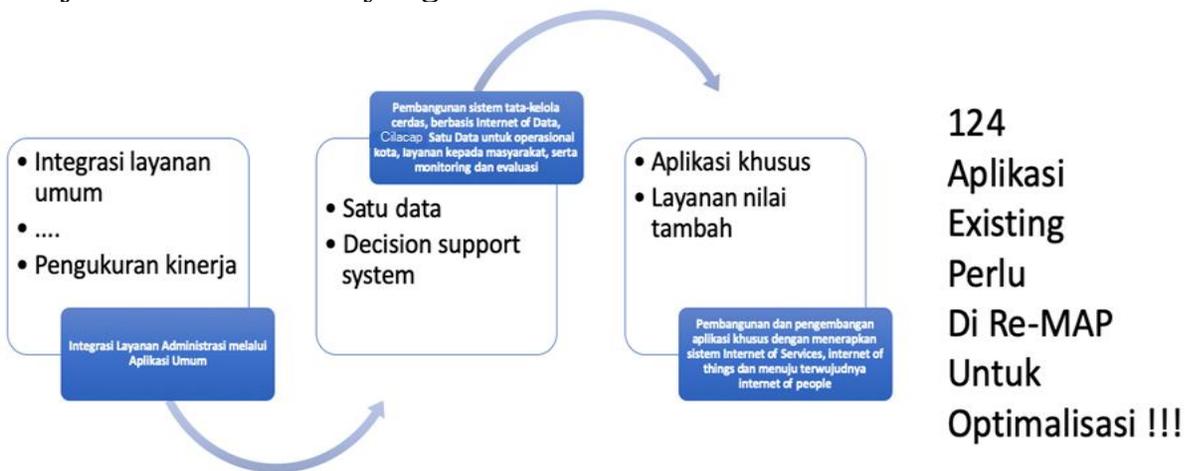
5.2.4 Aplikasi lanjutan di 2021-2024

Langkah di tahun 2021-2024 harus dilakukan secara hari-hati, karena sistem IT mempunyai siklus yang sangat pendek. Selama periode ini Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu selalu melakukan review, mulai dari ide/konsep, realisasi, penggunaan dan fase pergantian teknologi (phasing-out).



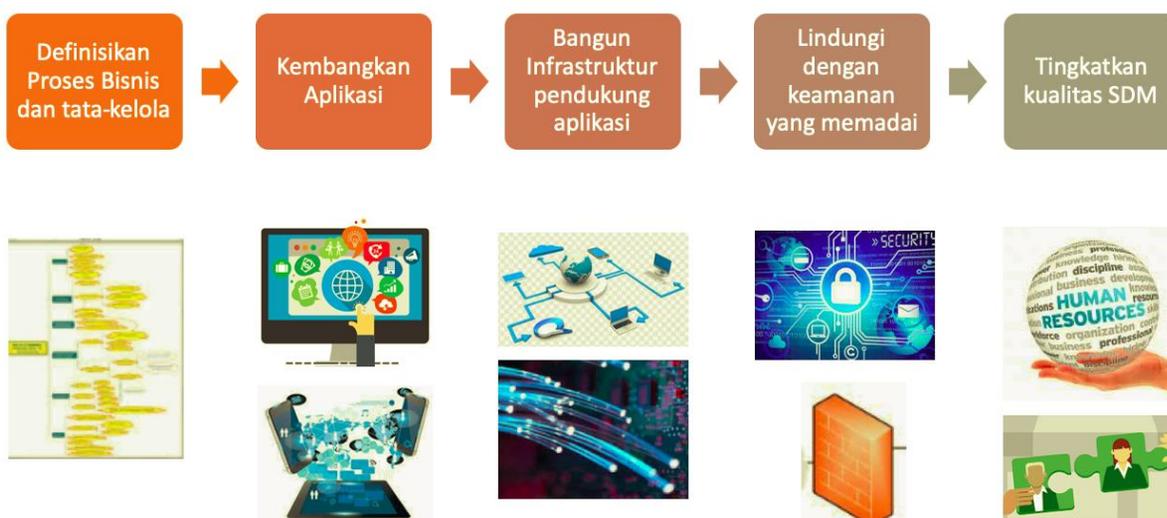
Gambar 5.10 Siklus Penerapan TIK untuk Smart-city

Pada dasarnya, 124 aplikasi yang saat ini ada perlu dipetakan kembali agar menjadi satu kesatuan yang memberi nilai tambah.



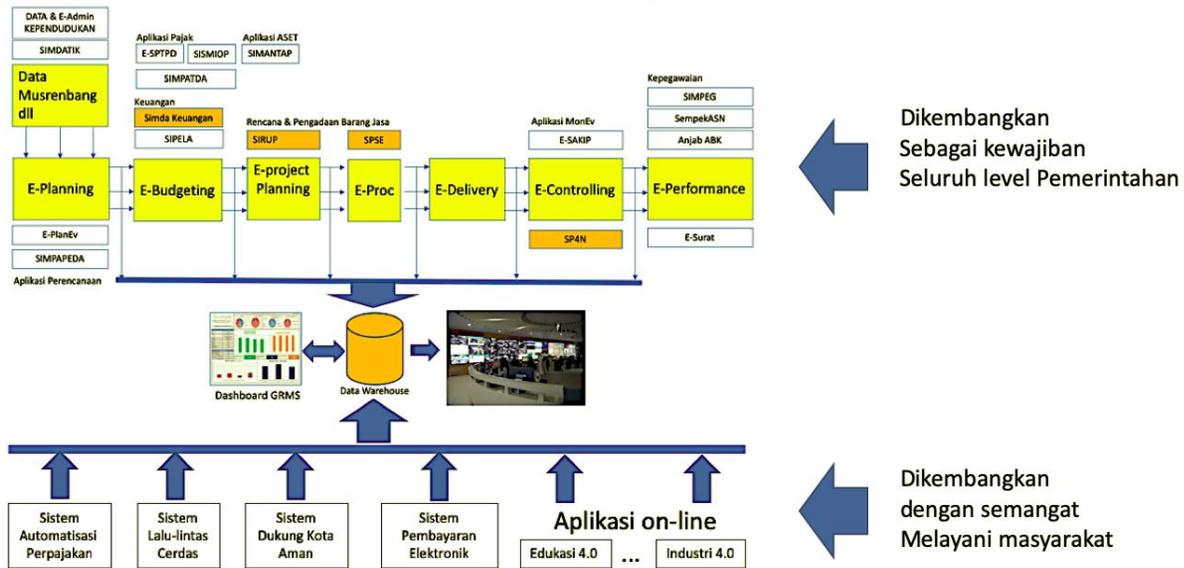
Gambar 5.11 Dari integrasi dasar ke aplikasi khusus bernilai tambah

Yang harus diingat adalah proses menuju smart-city harus selaras dengan Perpres 95/2018 tentang SPBE, di mana semua harus dimulai dari pemahaman proses bisnis yang benar, sebelum mengembangkan aplikasi dan berinvestasi infrastruktur, termasuk melakukan upaya pengamanan dan pengembangan SDM.



Gambar 5.12 Urutan Proses menuju SPBE

Apabila proses tersebut telah difahami, maka proses pengembangan selanjutnya akan tidak terlalu sulit untuk direalisasikan. Dengan demikian, penambahan fitur aplikasi sebanyak apapun akan dengan mudah direalisasikan dan diterapkan. Gambar berikut memberikan ilustrasi lanjutan dari integrasi tahap pertama di tahun 2020 ke tahun berikutnya.



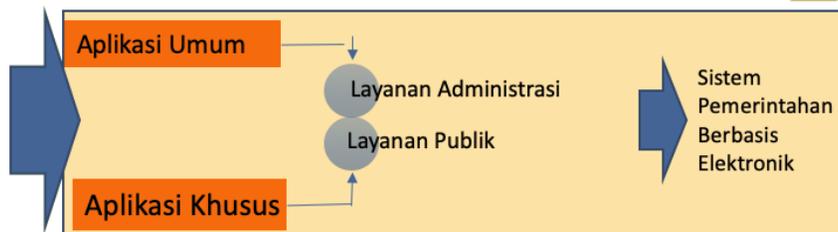
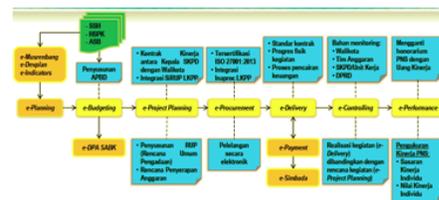
Gamabr 5.13 Integrasi Penuh Aplikasi Layanan

Pada akhirnya sebuah kota cerdas hanya mengenal layanan umum dan layanan khusus dalam rangka melayani warganya.

Percepatan SPBE KEHARUSAN !!

- Pendefinisian PROSES BISNIS
- Unifikasi Format Data dan Informasi → SATU DATA
- Pembangunan dan pengembangan APLIKASI
- Pembangunan Infrastruktur Informasi dan Komunikasi
 - Real-time Data Capture & Processing
 - Data Center & Storage
 - Jaringan Intra dan komunikasi penghubung
- Security
- Pembangunan SDM

Perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain.



Aplikasi khusus yang dibuat untuk mendukung operasional/ tupoksi direktorat hingga seksi tertentu.



Gambar 5.14 Target akhir Smart-city- layanan cerdas

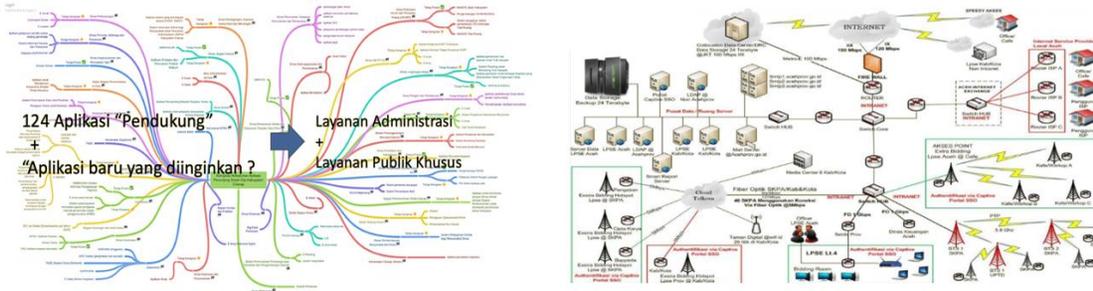
Sehingga program yang dikembangkan adalah murni dalam rangka pelayanan, dengan prioritas yang disesuaikan dengan hasil musrenbang dan usulan prioritas lainnya.

Prioritas 1 Generik	Prioritas 2 Ekonomi	Prioritas 3 Lingkungan	Prioritas 4
GRMS	E-Industri & Commerce –	E-Energi	E-Branding
Edu 4.0 & SDM	E-Farming & Pangan –	E-KelolaSampah	E-Multimoda-MultiArea
E-Health	E-Pariwisata –	E-AntiPolusi
E-Kebencanaan & Keamanan	E-Investasi & Perijinan	E-Tataruang
E-JaringSosial	E-UMKM
Decision Suport System BIG Data	Intelligent Transport & Mobility & E-Maritim

Gambar 5.15 Ilustrasi Program Lanjutan yang dapat dikembangkan secara bertahap

5.3 Disain Awal Infrastruktur Dukung

Sebagaimana dijelaskan di atas, semua proses bisnis yang didukung aplikasi akan membutuhkan dukungan infrastruktur. Dari contoh di bawah ini, apabila aplikasi makin banyak, maka infrastruktur juga akan semakin kompleks dan butuh investasi lebih banyak.



Gambar 5.16 Aplikasi dan Infrastruktur Jaringan

Dari evaluasi, dari sisi infrastruktur yang perlu dilakukan adalah:

- KL-01 Memperkuat command center dengan Data Warehouse yang mencukupi
- KL-02 Mengoptimalkan Jaringan Cilacap
- KL-03 Memulai Pembangunan Jaringan F/O Backbone

Pembangunan Ruang Executive ini adalah contoh untuk memperkuat command center dengan Data Warehouse yang mencukupi.

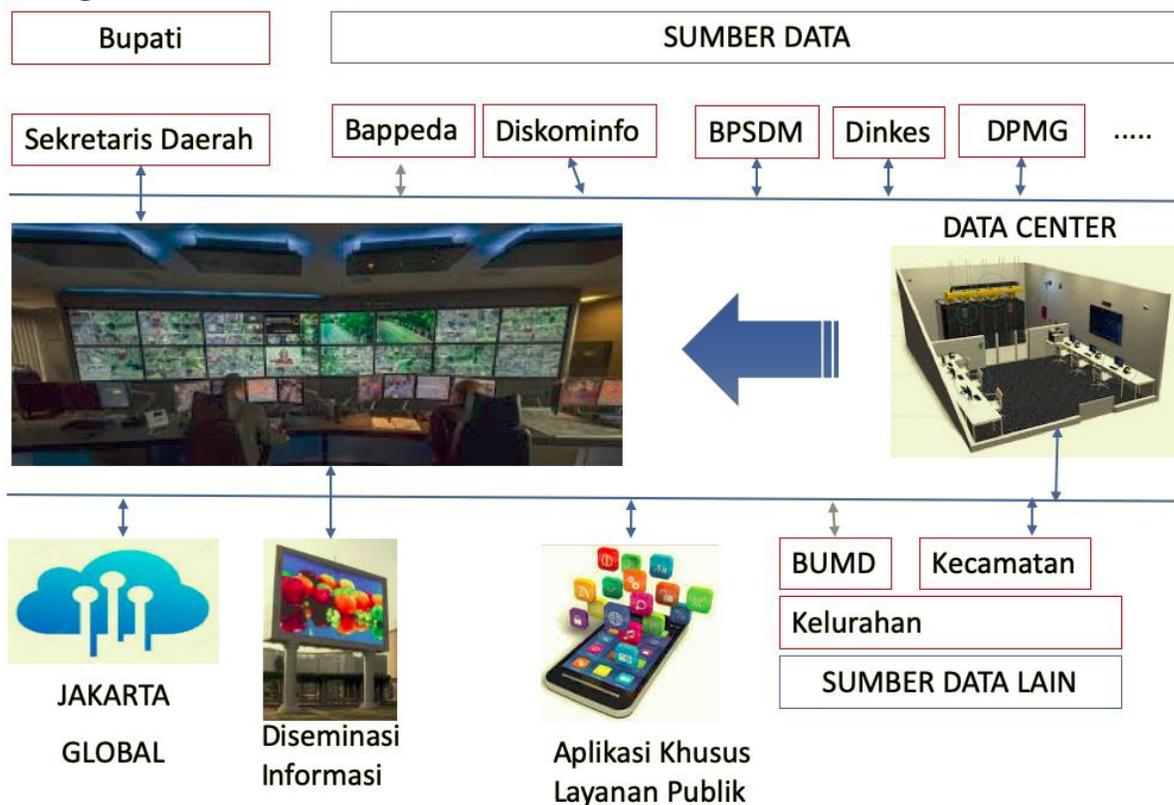


Gambar 5.17 Ruang Executive Lounge – Decision Support



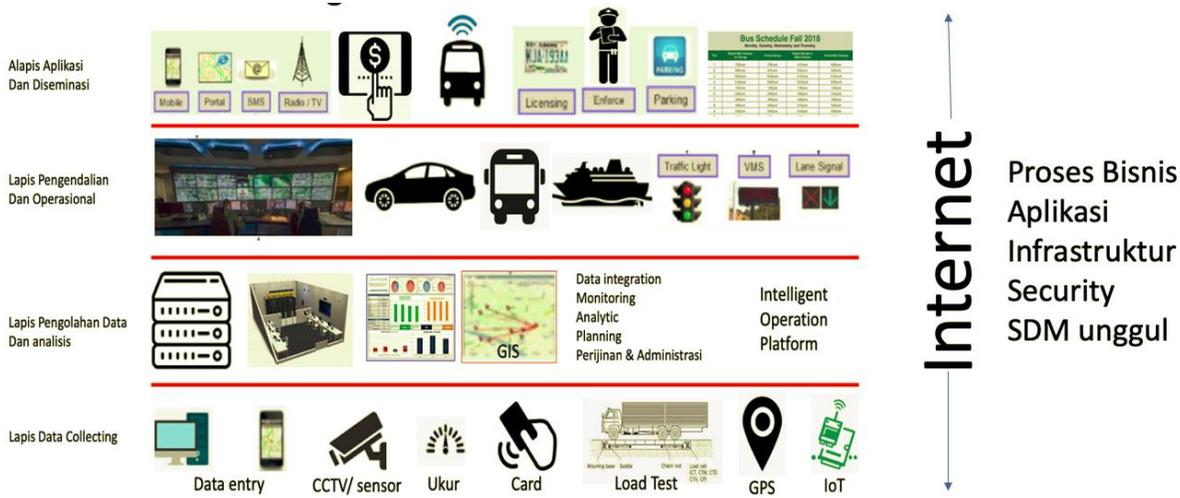


Dari program yang ada, maka diharapkan di tahun-tahun berikutnya dapat dianggarkan dengan memperkuat aplikasi dengan proses bisnis yang semakin difahami. Pada akhirnya, infrastruktur kotapun akan semakin solid dan terpadu. Satu kabupaten hanya akan punya satu kesatuan infrastruktur untuk melayani berbagai aplikasi terpadu melalui backbone yang sama. Pelaporan ke Jakarta, diseminasi informasi, aplikasi mobile, hingga aplikasi layanan administrasi dan layanan khusus lain dapat dilakukan dari satu platform untuk semua fitur yang mungkin.



Gambar 5.18 Cilacap Satu Data – Satu Infrastruktur – untuk Layanan

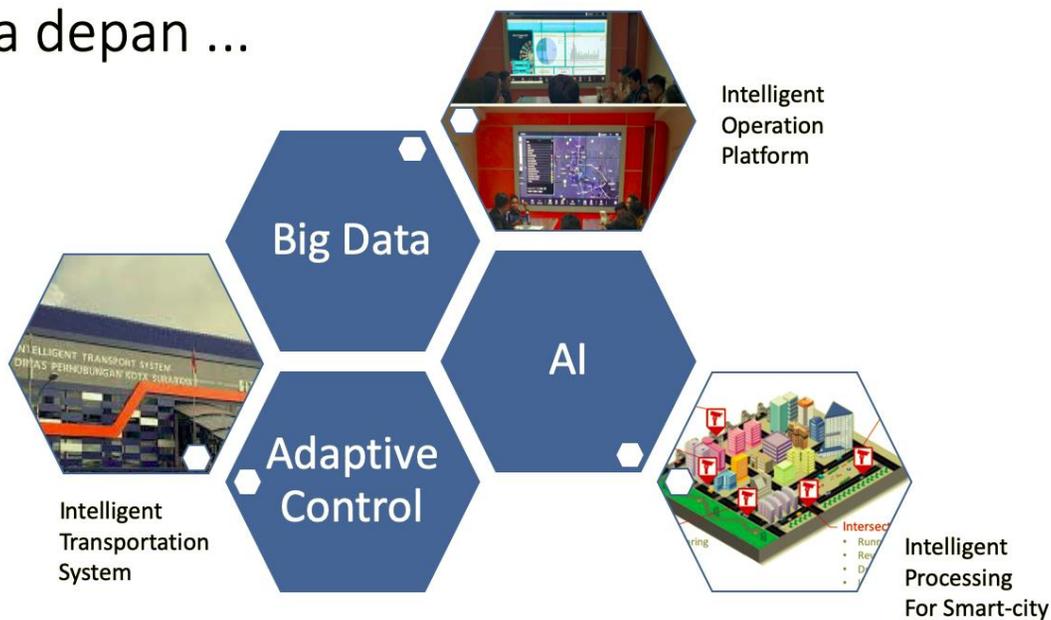
Pada akhirnya, Cilacap hanya akan mengenal satu platform terintegrasi dengan arsitektur bertingkat sesuai impian Perpres 95/2018, sebuah platform yang menjalankan proses bisnis berbasis aplikasi digital, mempunyai sarana-prasarana pengolahan data dan analisis. Hasil pengolahan data, akan digunakan untuk pengambilan keputusan, pengendalian dan operasional, serta aplikasi di masyarakat.



Gambar 5.19 Arsitektur bertingkat untuk merealisasikan SMART-CITY CILACAP

Intinya, bila pendekatan tersebut dijalankan, CILACAP SMART-CITY akan siap masuk era industry 4.0 dan mewujudkan Society 5.0. Sebuah kota yang sudah menerapkan data (BIG-DATA), Kecerdasan Buatan (AI=Artificial Intelligent) dan kendali cerdas.

Masa depan ...



Gambar 5.20 CILACAP DI ERA INDUSTRY 4.0

Hingga 5 tahun ke depan, bila dilakukan secara konsisten, maka CILACAP akan benar-benar menjadi kota CERDAS yang sebenarnya.

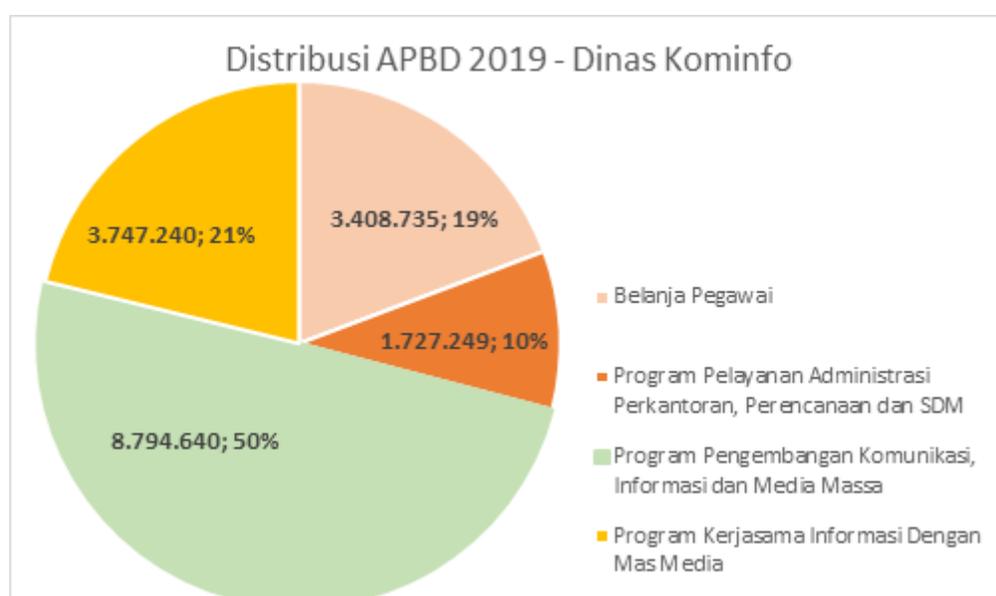
5.4 Transformasi Organisasi Dinas Kominfo

Jika mempertimbangkan peta kegiatan Dinas Kominfo dan Informatika, dapat dijelaskan dalam Gambar 5.6 di bawah, bahwa implementasi RPJMD 2017-2022, di bidang Kominfo di tahun APBD 2019 ini telah melampaui dari target Rp. 12.604.133.000,- (dua belas milyar enam ratus empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 17.677.864.000,- (tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

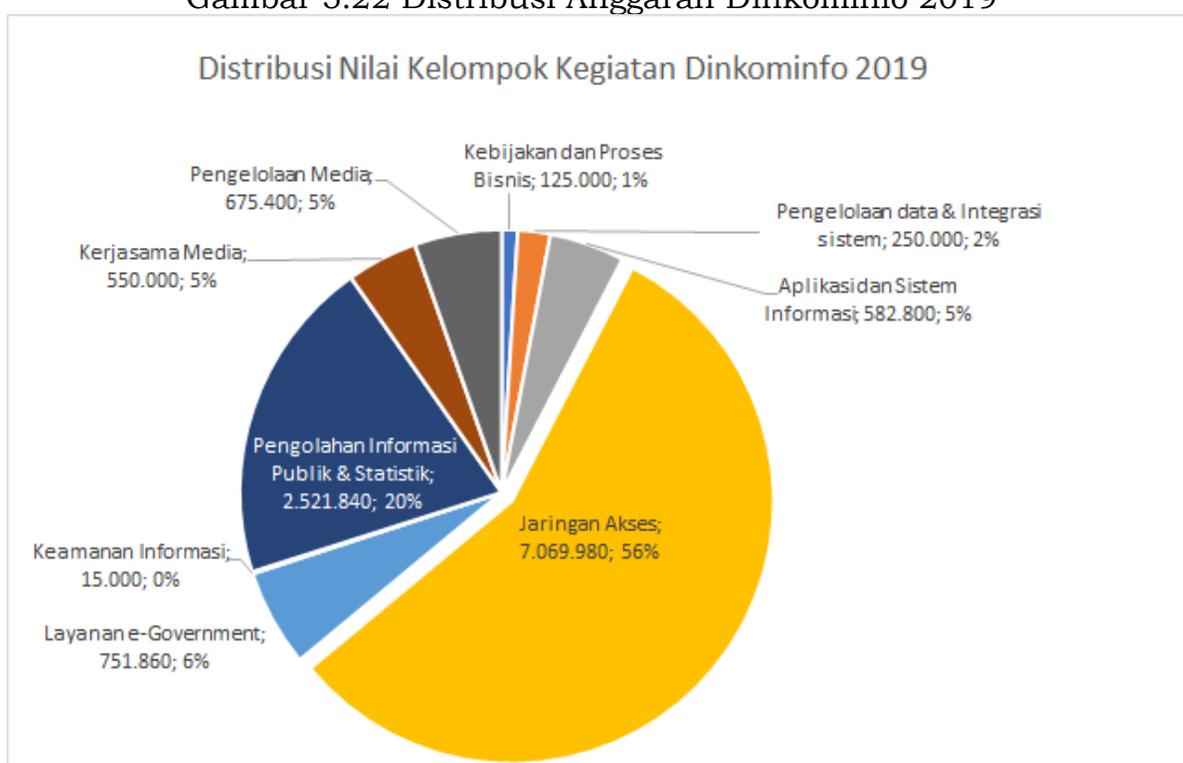
No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	APBD 2019	2020	2021	2022	Target Akhir RPJMD
1.	Persandian										
	1. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah		Rp. x1000			35.000	15.000	50.000	75.000	100.000	260.000
		Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Pusat dan Provinsi	%		100	100		100	100	100	100
2.	Komunikasi dan Informatika		Rp. x1000	2.432.327	3.678.952	12.319.100	17.412.864	11.845.000	12.345.000	13.050.000	55.670.379
	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Rp. x1000	1.706.521	1.070.000	8.809.200		8.700.000	9.025.000	9.400.000	38.710.721
		Persentase Aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi %	%	10	30	50		60	75	75	75
	2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media		Rp. x1000	725.806	2.608.952	3.509.900		3.145.000	3.320.000	3.650.000	16.959.658
		Persentase Website update %	%	23	50	60		70	75	80	80
	3. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan		Rp. x1000	13	21	33		46	58	71	71
		Persentase penyebaran informasi melalui mass media	%	100	100	100		100	100	100	100
3.	Statistik										
	1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Rp. x1000	380.721	235.000	250.000	250.000	300.000	300.000	325.000	1.790.721
		Persentase pemanfaatan dokumen statistik %	%	100	100	100		100	100	100	100
DINAS KOMINFO			Rp. x1000	2.813.061	3.913.973	12.604.133	17.677.864	12.195.046	12.720.058	13.475.071	57.721.171

Gambar 5.21 RPJMD 2017-2022 dan Realisasi APBD 2019 Kabupaten Cilacap

Dari informasi belanja Dinas Kominfo tahun 2019 tersebut distribusi terbesar adalah untuk Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa (50%), disusul Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media (21%), Belanja Pegawai (19%) dan Pelayanan Perkantoran, Perencanaan dan SDM (10%) .



Gambar 5.22 Distribusi Anggaran Dinkominfo 2019



Dari

Gambar 5.23 Distribusi Anggaran Pengelolaan Operasional dan Pengembangan TIK

Gambar 5.23 menunjukkan distribusi anggaran pengelolaan operasional dan pengembangan TIK. Kelompok anggaran disesuaikan dengan kegiatan untuk mendukung proses e-Government yang mendukung smart city, tabel di bawah. Tampak anggaran terbesar untuk layanan akses jaringan TIK (56% dari anggaran pengelolaan operasional dan pengembangan TIK, tahun 2019), sedangkan anggaran terkecil adalah Keamanan Informasi (0,1%). Dengan evaluasi sebaran anggaran yang ada ini, nantinya perlu melakukan transformasi kegiatan dalam implementasi master plan 2020-2024. Sehingga perlu kajian transformasi kegiatan dan organisasi dalam penanganan kegiatan Smart City ke depan.

Kegiatan		Kegiatan baru	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
2	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Inform	21	Kebijakan dan Proses Bisnis
2	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	22	Pengelolaan data & Integrasi sistem
2	Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Cilacap	23	Aplikasi dan Sistem Informasi
2	Peningkatan Akses Internet di Kabupaten Cilacap	24	Jaringan Akses
2	Perencanaan eGovernment	25	Layanan e-Government
2	Peningkatan Mutu Pelayanan LPSE Kabupaten Cilacap.	25	Layanan e-Government
2	Bimbingan Teknis Keamanan Informasi	26	Keamanan Informasi
0	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media		
3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	27	Pengolahan Informasi Publik & Statistik
3	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	27	Pengolahan Informasi Publik & Statistik
3	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	27	Pengolahan Informasi Publik & Statistik
3	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Peringatan Hari Ja	27	Pengolahan Informasi Publik & Statistik
3	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	27	Pengolahan Informasi Publik & Statistik
3	Peningkatan Pelayanan PPID kepada Masyarakat di Kabupaten Cilac	27	Pengolahan Informasi Publik & Statistik
3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Kal	27	Pengolahan Informasi Publik & Statistik
3	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)	27	Pengolahan Informasi Publik & Statistik
3	Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Cilaca	27	Pengolahan Informasi Publik & Statistik
3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tra	28	Kerjasama Media
3	Media Gathering	28	Kerjasama Media
3	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	29	Pengelolaan Media
3	Peningkatan SDM Pengelola Website	29	Pengelolaan Media
3	Peningkatan dan Pengembangan LPPL Radio Bercahaya FM	29	Pengelolaan Media
3	Fasilitasi Pemilihan Alat Kelengkapan LPPL Bercahaya FM	29	Pengelolaan Media

Saat ini struktur organisasi Dinas Kominfo masih mengacu pada struktur Dinas Kominfo Klas C, dengan struktur seperti digambarkan pada gambar 5.24.

ORGANISASI DINKOMINFO



Gambar 5.24 Struktur Organisasi Dinkominfo saat ini (2019)

Mengingat peran Dinas Kominfo dalam implementasi master plan e-Government 2020-2024 akan memiliki tugas pokok dan fungsi yang lebih berat dari pada saat ini, maka perlu dikembangkan strukturnya sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi sebagai leading sector pengembangan e-Government dan Smart City Kabupaten Cilacap.

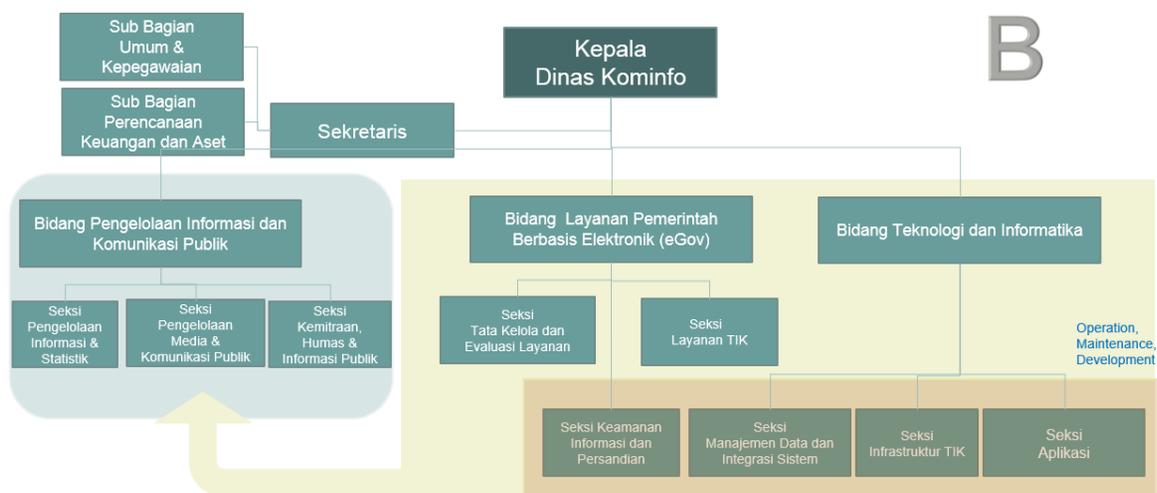
Rancangan dasar pengembangan organisasi akan menambah satu bidang, namun pembagian bidang utama meliputi:

- Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Seksi Pengelolaan Informasi & Statistik
 - Seksi Pengelolaan Media & Komunikasi Publik
 - Seksi Kemitraan, Humas & Informasi Publik
- Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (eGov)
 - Seksi Tata Kelola dan Evaluasi Layanan
 - Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
 - Seksi Layanan TIK
- Bidang Teknologi dan Informatika
 - Seksi Manajemen Data dan Integrasi Sistem
 - Seksi Infrastruktur TIK
 - Seksi Aplikasi

Didukung oleh Sekretaris, yang dibantu oleh :

- Sub Bagian Umum & Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset

ORGANISASI DINKOMINFO



Gambar 5.25 Draft Rancangan Struktur Organisasi Dinas Kominfo ke depan

BAB VI PENUTUP

Menjadi sebuah *Smart City* bukanlah berinvestasi produk, tetapi berinvestasi proses. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merekomendasikan menyusun proses bisnis sebelum melakukan pengembangan aplikasi dan membangun infrastruktur, sehingga harus disertai dengan pemahaman tentang *security* dan Sumber Daya Manusia Informasi Teknologi.

Laporan masterplan ini disusun dengan metode deskriptif untuk mewadahi ide-ide pokok dalam mengembangkan *Smart City* di Kabupaten Cilacap. Detail program dan aktifitas akan disampaikan dalam Lampiran tersendiri, karena perubahan di bidang TIK yang sangat cepat.

Dalam proses implementasinya, jelas dibutuhkan banyak pertimbangan sehingga dibutuhkan payung kelembagaan agar dapat mewadahi semua masukan dan merealisasikannya dalam implementasi jangka panjang. Adanya Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* dan Peraturan Bupati tentang Dewan *Smart City* akan menjadi awal yang baik dari sisi kelembagaan dan tata kelola.

BUPATI



TATTO SUWARTO